



# LAPORAN KINERJA KPPU

TAHUN  
ANGGARAN  
2022



**PERNYATAAN TELAH DIREVIU**  
**KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA**

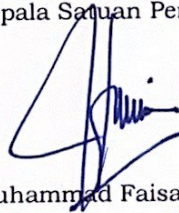
Kami telah mereviu Laporan Kinerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha untuk Tahun Anggaran 2022 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, 28 Februari 2023

Kepala Satuan Pengawasan Internal



Muhammad Faisal

## KATA PENGANTAR

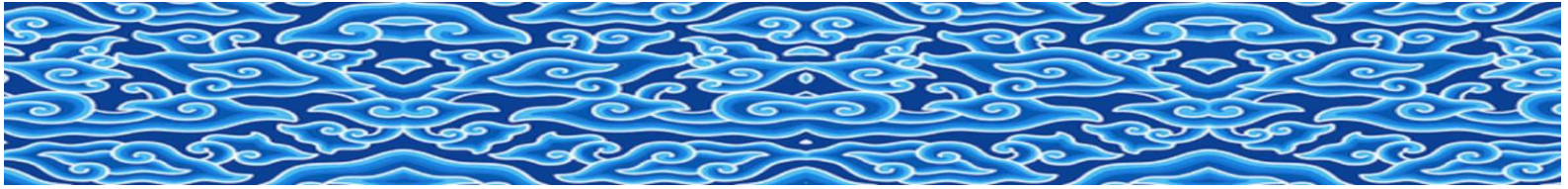


Alhamdulillah Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia – Nya sehingga kami berkesempatan melaksanakan seluruh target capaian dalam rangka pemenuhan kontribusi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024. Saat ini tingkat persaingan usaha yang sehat di Indonesia masih sedikit tinggi. Angka Indeks Persaingan Usaha yang menjadi salah satu indikator RPJMN adalah 4,87 indeks poin dari skala 7. Indeks Persaingan Usaha secara komprehensif merupakan gambaran persaingan usaha sektoral, daerah dan nasional secara keseluruhan. Pada target RPJMN, di tahun 2024 angka tersebut harus mencapai 5 indeks poin.

Kami akan terus berusaha agar iklim usaha yang sehat dan pelayanan KPPU terhadap masyarakat terus membaik, karena keduanya adalah sinergi yang tepat untuk menegaskan bahwa Persaingan Usaha yang sehat tentunya dapat tercipta dengan dukungan pelaku usaha dan masyarakat umum. Pada tahun 2022, peran KPPU sebagai pengawas cukup terbatas dan lebih banyak kepada pengawasan atas perilaku pelaku usaha dan melakukan penegakan hukum atas perilaku yang melanggar. Dari sisi kebijakan, KPPU lebih banyak memberikan rekomendasi kebijakan persaingan kepada Pemerintah. Aspek penting lain yang mencirikan adanya upaya untuk menciptakan iklim usaha yang sehat adalah perubahan yang berkesinambungan di berbagai pemangku kepentingan. Perubahan tersebut menjadi materi pengawasan kami untuk dapat menyempurnakan pencapaian - pencapaian yang telah diraih pada tahun sebelumnya.

Seluruh kebijakan yang ditempuh oleh KPPU adalah upaya peningkatan efektivitas pengawasan, harmonisasi kebijakan, dan mendukung pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi. Laporan Kinerja Tahun 2022 merupakan cerminan sinergi antara Pemerintah dengan KPPU. Secara khusus kami mengapresiasi Pemerintah, baik di pusat maupun di daerah, yang telah menciptakan dan melaksanakan berbagai kebijakan yang menciptakan kondisi persaingan yang sehat maupun kemitraan yang adil.

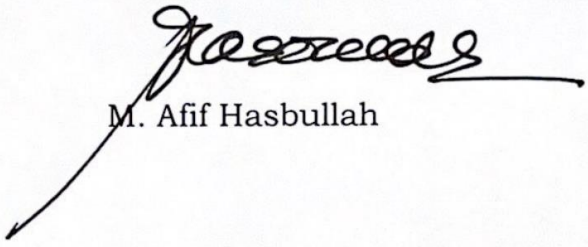
Sinergi kebijakan sektoral dan dukungan kelembagaan sangat diperlukan dalam mewujudkan tujuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Kami juga melakukan evaluasi dan menyusun langkah – langkah strategis untuk pelaksanaan tugas dan fungsi KPPU pada tahun – tahun berikutnya. Selama masa pandemi, KPPU turut mendukung kebijakan pemulihan ekonomi nasional melalui relaksasi penegakkan hukum persaingan usaha. Pada tahun ini juga kami memfokuskan pelaksanaan seluruh tugas dan fungsi KPPU



sebagai percepatan pencapaian target RPJMN 2020 – 2024. Akhirnya, saya berharap agar pada tahun mendatang kita senantiasa mendapat lindungannya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi untuk pertumbuhan ekonomi nasional.

Salam Persaingan Sehat! Kerja Bersama untuk Indonesia Maju !

Jakarta, 28 Februari 2023  
Ketua Komisi Pengawas Persaingan  
Usaha



M. Afif Hasbullah

## RINGKASAN EKSEKUTIF

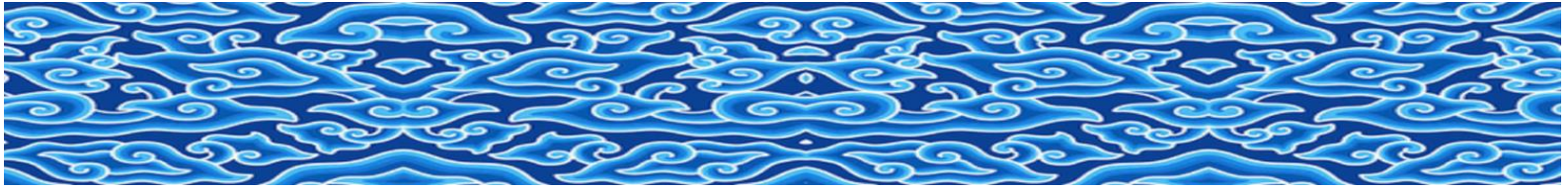
Penyusunan Laporan Kinerja KPPU TA 2022 adalah pemenuhan tanggung jawab Kementerian/Lembaga/Instansi dalam mematuhi Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada Laporan Kinerja KPPU TA 2022, para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dan masyarakat dapat mencermati berbagai informasi utama tentang tugas, fungsi dan peran KPPU dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional. Informasi yang dicantumkan dalam Laporan ini akan direviu oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Capaian kinerja sebagaimana Perjanjian Kinerja yang disepakati telah dipenuhi sesuai target bahkan terdapat beberapa kinerja yang terlampaui targetnya. Pemenuhan capaian tersebut mencerminkan bahwa komitmen KPPU terjaga di tengah disrupsi nasional dan pergantian pimpinan Ketua pada bulan September 2022. Hal ini menunjukkan bahwa KPPU telah mencermati kondisi yang dihadapi pada tahun 2022 dan mengimplementasikannya dengan baik dalam pemanfaatan anggaran dan sumber daya lainnya yang dimiliki oleh KPPU.

Berikut adalah penjelasan umum dari target dan akuntabilitas kinerja KPPU:

1. Hasil pengukuran kinerja tingkat Lembaga yaitu kinerja KPPU TA 2022 pada 2 (dua) Sasaran Strategis yang dijabarkan dalam 3 (tiga) Indikator Kinerja Sasaran Strategis, menunjukkan bahwa 2 (dua) indikator kinerja telah mencapai target (100%) dan 1 (satu) indikator kinerja mencapai angka 98,39%;
2. Nilai Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1.1 pada Indeks Persepsi Persaingan Usaha melebihi target TA 2022 yaitu realisasi 4.87 dengan target 4.7 atau realisasi capaian sebesar 104%;
3. Nilai Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1.2 pada Persentase penyelesaian proses penegakan hukum persaingan usaha yang sesuai dengan peraturan berlaku sebesar 111% yang terealisasi 100% dari target 90%;
4. Nilai Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2 pada Indeks tingkat efektivitas pemanfaatan *e-government* (Percepatan dan kemudahan pelayanan, transparansi pelayanan, kepastian waktu dan keamanan data, skala 1 - 100) tercapai sebesar 98.39% yang terealisasi 77.73 dari target 79;

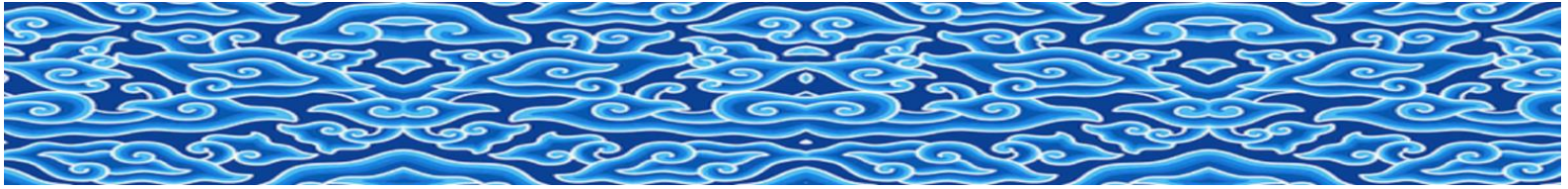
- 
5. Komisi Pengawas Persaingan Usaha pada TA 2022 memperoleh anggaran total sebesar Rp 135.642.994.000,-, dengan alokasi anggaran untuk Sasaran Strategis 1 adalah sebesar Rp 34.778.671.000,- (53.36%) dari total anggaran KPPU non-operasional sebesar Rp 65.174.768.000,- dan untuk melaksanakan SS-1 dikelompokkan kedalam anggaran *Core*. Sedangkan alokasi anggaran untuk Sasaran Strategis 2 adalah sebesar Rp 30.396.097.000,- (46.64%) dari total anggaran KPPU non-operasional Rp 65.174.768.000,- dan untuk melaksanakan SS-2 dikelompokkan ke dalam anggaran *supporting*;
  6. Realisasi anggaran KPPU yang terdiri 2 (dua) Program TA 2022 sebesar Rp 134.014.621.930,- atau mencapai 98.80% dari total pagu sebesar Rp 135.642.665.000,- .
  7. Faktor pendukung yang berperan dalam capaian kinerja KPPU dalam kondisi disrupsi nasional dan pergantian kepemimpinan Ketua KPPU adalah :
    - a. Sinergi antara KPPU dan Pemerintah yang semakin tertata dan saling mendukung dalam berbagai kebijakan yang pro persaingan usaha.
    - b. Dukungan dari Kementerian Keuangan terhadap pemanfaatan anggaran yang bersumber dari PNBPN dan relokasi anggaran yang semula digunakan untuk *automatic adjustment*.
    - c. Digitalisasi layanan untuk mendukung capaian target dengan melihat kesesuaian antara upaya pencapaian target dan perubahan format kegiatan menjadi digital.
    - d. Penilaian kinerja yang telah diformalkan dalam bentuk Peraturan Komisi sehingga terdapat dukungan motivasi bagi pegawai KPPU untuk menunjukkan kinerja yang baik.

Tahun 2022 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Strategis KPPU pada periode 2020 – 2024, serta adanya pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (UU Cipta Kerja) memberikan dampak pada perluasan tugas dan fungsi KPPU terkait kemitraan yang tercantum dalam peraturan turunan dari UU Cipta Kerja yaitu:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
2. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Perluasan tugas dan fungsi tersebut membutuhkan optimalisasi anggaran dan tetap menjaga pemenuhan target kinerja yang telah disepakati dalam Renstra KPPU 2020-2024, maka langkah – langkah untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja di tahun 2022 adalah:

1. Pengundangan Peraturan internal KPPU dalam rangka penyiapan dasar hukum dan perbaikan dasar yang ada di KPPU sehingga terdapat acuan baik bagi KPPU maupun *stakeholder* lainnya.
2. Digitalisasi tata cara layanan KPPU untuk penanganan tindak lanjut dari laporan masyarakat sehingga dapat tertangani dengan baik.

- 
3. Melakukan perbaikan dalam manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) sesuai dengan status KPPU sebagai Lembaga bantuan Negara (*state auxiliary body*) dalam rangka persiapan proses alih status pegawai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  4. Menata komunikasi dan koordinasi lintas instansi yang lebih intensif untuk mencari solusi dalam hal pelaksanaan program/kegiatan yang bersifat lintas Kementerian/Lembaga.
  5. Melakukan penataan Manajemen SDM di KPPU Pusat maupun di Kantor Wilayah



## DAFTAR ISI

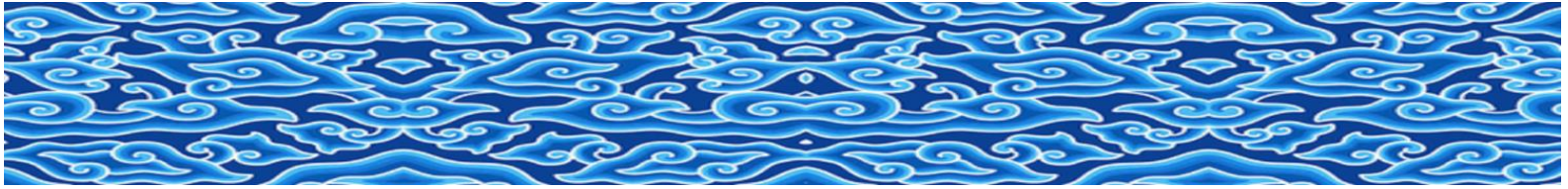
KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL .....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
LAMPIRAN .....	ix
BAB I .....	2
PENDAHULUAN .....	2
A. TUGAS DAN FUNGSI.....	2
B. ORGANISASI KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) .....	4
C. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI .....	5
D. SISTEMATIKA PELAPORAN .....	6
BAB II.....	9
PERENCANAAN KINERJA .....	9
A. RENCANA STRATEGIS .....	9
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA.....	15
C. TARGET KINERJA TAHUN 2022 .....	16
D. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 .....	18
BAB III .....	21
AKUNTABILITAS KINERJA .....	22
A. CAPAIAN KINERJA TA 2022 .....	22
B. ANALISIS EFISIENSI .....	38
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN .....	42
BAB IV.....	46
PENUTUP.....	46
A. KESIMPULAN KINERJA TAHUNAN .....	46
B. RENCANA TINDAK TAHUN BERIKUTNYA .....	47





## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Tugas dan Fungsi KPPU .....	3
Tabel 1.2	Jumlah Pegawai KPPU TA 2022 .....	5
Tabel 1.3	Sasaran Strategis (SS) dalam Renstra KPPU 2020-2024 .....	6
Tabel 2.1	Indikator Kinerja Sasaran Strategis KPPU Berdasarkan Renstra KPPU 2020-2024 .....	15
Tabel 2.2	Rincian Alokasi Anggaran KPPU TA 2022 .....	17
Tabel 2.3	Indikator Kinerja Sasaran Strategis KPPU Berdasarkan Renstra KPPU 2020-2024 .....	17
Tabel 2.4	Indikator Kinerja Utama KPPU pada Sasaran Strategis Berdasarkan Renstra KPPU 2020-2024 .....	18
Tabel 2.5	Alokasi Anggaran per Unit Kerja Eselon 1 KPPU TA 2022 .....	19
Tabel 3.1	Ringkasan Kinerja Sasaran Strategis Komisi Pengawas Persaingan Usaha TA 2022 .....	22
Tabel 3.2	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis TA 2022 (Indeks Persepsi Persaingan Usaha).....	24
Tabel 3.3	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis TA 2022 (Penyelesaian Proses Penegakan Hukum Persaingan Usaha Yang Sesuai dengan Peraturan Berlaku).....	30
Tabel 3.4	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis TA 2022 (Indeks Tingkat efektivitas pemanfaatan <i>e-government</i> ).....	33
Tabel 3.5	Rekapitulasi Nilai Indeks terkait layanan pada Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Eselon II di Sekretariat Jenderal TA 2022 .....	34
Tabel 3.6	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis TA 2021 dan 2022 .....	39
Tabel 3.7	Perbandingan Nilai Indeks Persaingan Usaha Tahun 2022 dan 2021..	40
Tabel 3.8	Rekapitulasi Realisasi Anggaran berdasarkan Sasaran Strategis TA 2022 .....	43

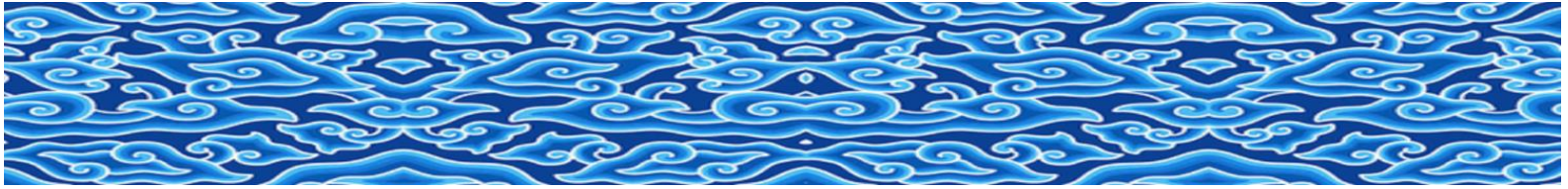


## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi KPPU .....	4
Gambar 2.1	Amanat Pembangunan dalam RPJMN 2020-2024.....	10
Gambar 2.2	Penjelasan Kontribusi KPPU dalam PN-1 dalam.....	11
Gambar 2.3	Penjelasan Kontribusi KPPU dalam PN-1 dalam.....	12
Gambar 2.4	Alokasi Anggaran KPPU TA 2022 .....	13
Gambar 2.5	Rincian Anggaran Program Prioritas Nasional TA 2022 .....	14
Gambar 2.6	Persentase Alokasi Anggaran per Unit Eselon I KPPU TA 2022 .....	19
Gambar 3.1	Peta Persaingan Usaha di Provinsi di Indonesia TA 2022 .....	26
Gambar 3.2	Grafik Indeks Persaingan Usaha Dimensi Keseluruhan Menurut Bobot PCA dan Bobot Sama Tingkat Provinsi di Indonesia TA 2022 .....	28
Gambar 3.3	Rata-rata Dimensi Persaingan Usaha .....	28
Gambar 3.4	Hasil Nilai Indeks SPBE KPPU TA 2022 dan 2021.....	37
Gambar 3.5	Grafik Analisis Efisiensi SS-1 dan SS-2 .....	39
Gambar 3.6	Grafik Perbandingan Penyerapan Anggaran KPPU .....	43

## LAMPIRAN

- Lampiran I : 1. Perjanjian Kinerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha TA 2022  
2. Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 22/KPPU/Kep.1/VI/2020 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Komisi Pengawas Persaingan Usaha Tahun 2020-2024
- Lampiran II : 1. Rekapitulasi Capaian Target Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) KPPU TA 2022 (Sasaran Strategis)  
2. Penjelasan Indeks Persaingan Usaha TA 2022  
3. Rekapitulasi Putusan KPPU yang dibatalkan di Tingkat Pengadilan Negeri/Pengadilan Niaga TA 2022  
4. Rincian Anggaran dan Target Output (KRO/RO) Kegiatan KPPU TA 2022 pada Program Pengawasan Persaingan Usaha Pendukung Prioritas Nasional  
5. Rincian Anggaran dan Target Output (KRO/RO) Kegiatan KPPU TA 2022 pada Program Dukungan Manajemen Kegiatan Operasional Pendukung Pencapaian Prioritas Nasional  
6. Rekapitulasi Perbandingan Pagu Akhir dan Realisasi Anggaran KPPU TA 2021 dan 2022  
7. Perbandingan Rincian Pendapatan PNBPN dari Denda Persaingan Usaha TA 2021 dan 2022  
8. Pagu dan Realisasi Anggaran KPPU TA 2022 (menurut Sasaran Strategis)  
9. Rekapitulasi Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Sasaran Strategis KPPU TA 2022 dan 2021
- Lampiran III : 1. Rekapitulasi rata-rata capaian Indikator Kinerja Program Eselon II Pada Kedeputian Bidang Penegakan Hukum dan Kedeputian Kajian dan Advokasi TA 2022  
2. Rekapitulasi rata-rata capaian Indikator Kinerja Program Eselon II Pada Sekretariat Jenderal TA 2022  
3. Rekapitulasi Capaian Target Indikator Kinerja Kegiatan (Eselon II) pada Kedeputian Penegakan Hukum TA 2022  
4. Rekapitulasi Capaian Target Indikator Kinerja Kegiatan (Eselon II) pada Kedeputian Kajian dan Advokasi TA 2022

- 
5. Rekapitulasi Capaian Target Indikator Kinerja Kegiatan (Eselon II) pada Sekretariat Jenderal TA 2022
  6. Penjelasan kebutuhan, kondisi kompetensi dan jumlah pegawai KPPU menurut *Road Map* SDM 2020 – 2024
  7. Persentase Penyebaran SDM berdasarkan data *Eksisting* Pegawai KPPU (per 31 Desember 2021)
  8. Persentase Perbandingan Alokasi Anggaran di *Core* dan *Supporting* TA 2021
  9. Rekapitulasi Rincian Pagu dan Realisasi Anggaran Kegiatan KPPU TA 2022 dan Output (KRO/RO) Kegiatan pada Program Pengawasan Persaingan Usaha untuk pencapaian Prioritas Nasional (PN-1)
  10. Rekapitulasi Rincian Pagu dan Realisasi Anggaran Kegiatan KPPU TA 2022 dan Output (KRO/RO) Kegiatan pada Program Dukungan Manajemen untuk Kegiatan Pendukung Operasional Prioritas Nasional

BAB I

# PENDAHULUAN

LAPORAN KINERJA KPPU TAHUN 2022

**Peningkatan investasi.**  
Momentum trust/kepercayaan dunia kepada Indonesia ini harus betul-betul kita manfaatkan untuk menarik investasi masuk *capital inflow* sebanyak-banyaknya sehingga memperkuat fundamental kita.

Bapak H. Ir. Joko Widodo  
Presiden Republik Indonesia

(Disampaikan dalam kegiatan Outlook  
Perekonomian 2023, 21 Desember 2022)

 KPPUINDONESIA

 @KPPU

 @kppu\_ri

 KPPUOFFICIAL



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Persaingan usaha yang sehat diawasi oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan merupakan perwujudan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi dunia usaha, sehingga tercipta kompetisi yang sehat dan adil. Dalam perannya sesuai amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang merupakan lembaga Negara yang dibiayai APBN juga diwajibkan mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan, hal itu sesuai dengan amanat Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Salah satu bentuk akuntabilitas adalah berupa Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja juga merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan penjelasan tersebut, Laporan Kinerja KPPU Tahun Anggaran 2022 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dan masyarakat atas penggunaan anggaran negara (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dan sumber-sumber anggaran lain yang diperbolehkan oleh peraturan perundangan selama masa satu Tahun Anggaran 2022.

#### **A. TUGAS DAN FUNGSI**

Tugas dan fungsi KPPU tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2008 tentang perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Pada periode RPJMN 2020 -2024 sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, Kabinet Kerja telah menetapkan 7 Prioritas Nasional (PN) dan “ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan” menjadi prioritas pertama dengan arah kebijakannya yang tertuang pada Program Prioritas (PP) Nomor 5 (lima) dan 6 (enam) sebagai berikut:

- a. Program Prioritas Nomor 5 (lima) penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan koperasi
  - Kegiatan prioritas: peningkatan kemitraan usaha antara usaha mikro kecil dan usaha menengah besar
- b. Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi
  - Kegiatan Prioritas: perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi termasuk reformasi ketenagakerjaan

Penjelasan rinci tentang tugas dan fungsi KPPU dijelaskan dalam Tabel 1.1:

Tabel 1.1 Tugas dan Fungsi KPPU

Tugas	Fungsi
1. Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16; 2. Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24; 3. Melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28; 4. Mengambil tindakan sesuai dengan wewenang Komisi sebagaimana diatur dalam Pasal 36; 5. Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat; 6. Menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan Undang-Undang Persaingan Usaha; 7. Memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja Komisi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.	1. Penilaian terhadap perjanjian, kegiatan usaha, dan penyalahgunaan posisi dominan; 2. Pengambilan tindakan sebagai pelaksanaan kewenangan; 3. Pengawasan dan penanganan perkara dugaan pelanggaran pelaksanaan Kemitraan; dan 4. Pelaksanaan administratif.

Sumber: UU No. 5 Tahun 1999

## B. ORGANISASI KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)

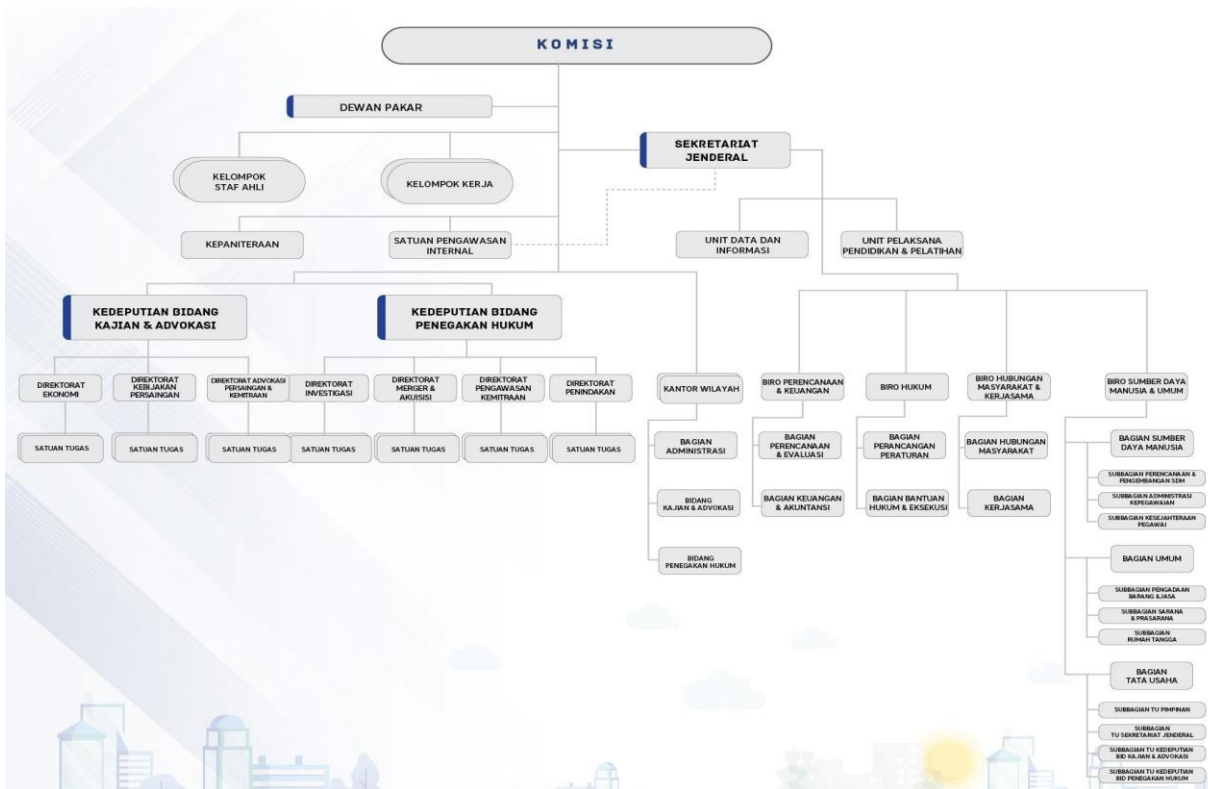
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2008 tentang perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha, organisasi KPPU terdiri dari Ketua Komisi, Anggota Komisi yang dibantu Sekretariat. Sekretariat itu sendiri terdiri:

1. Sekretariat Jenderal;
2. Kedeputian Bidang Kajian dan Advokasi;
3. Kedeputian Bidang Penegakan Hukum.

Ketua dan Anggota Komisi juga dibantu oleh 1 (satu) unsur pengawas dan 4 (empat) unsur pendukung yakni:

1. Satuan Pengawasan Internal;
2. Kepaniteraan;
3. Kelompok Kerja;
4. Kelompok Staf Ahli; dan
5. Kantor Wilayah.

Selanjutnya penjabaran organisasi dan tata kerja KPPU ditetapkan dengan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2019 dengan bagan sebagai berikut:



Sumber: KPPU, 2022

Gambar 1.1 Struktur Organisasi KPPU



KPPU sebagai Lembaga Non Struktural (LNS) dipimpin oleh Ketua dan Wakil Ketua yang merupakan bagian dari 9 orang Komisioner berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 81/P Tahun 2018 tentang Pemberhentian Dengan Hormat dan Pengangkatan Keanggotaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Berdasarkan Pasal 34 ayat 2 dalam UU No 5 tahun 1999, dicantumkan bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Komisi dibantu oleh Sekretariat. Saat ini jumlah pegawai Sekretariat KPPU sampai dengan 31 Desember 2022 adalah 411 pegawai dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.2 Jumlah Pegawai KPPU TA 2022

No.	Unit Eselon I	Jumlah
1.	Sekretariat Jenderal	193 Pegawai
2.	Kedeputian Bidang Kajian dan Advokasi	28 Pegawai
3.	Kedeputian Bidang Penegakan Hukum	74 Pegawai
4.	Kantor Wilayah	116 Pegawai
	<b>TOTAL</b>	<b>411 Pegawai</b>

Sumber: KPPU, 2022

### C. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Persaingan sehat adalah pencapaian utama KPPU dalam melaksanakan UU Nomor 5 Tahun 1999 sejak tahun 2000. KPPU mendukung terwujudnya bangsa yang berdaya saing dan kemandirian ekonomi secara nasional.

KPPU juga berkontribusi dalam Agenda Pembangunan Pertama sesuai dengan pelaksanaan Prioritas Nasional (PN): Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas. Sasaran PN tersebut adalah:

1. Sasaran pertama, Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan; dan
2. Sasaran kedua, Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian

Amanat PN di atas diturunkan oleh KPPU pada Rencana Strategis (Renstra) KPPU 2020-2024 yang telah diundangkan melalui Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 602 pada tanggal 11 Juni 2020. Pada Renstra 2020-2024 ditetapkan 2 (dua) Sasaran Strategis yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan untuk mewujudkan visi misi Presiden 2019-2024.

Sasaran Strategis KPPU dijelaskan dalam Tabel 1.3 sebagai berikut:

Tabel 1.3 Sasaran Strategis (SS) dalam Renstra KPPU 2020-2024

NO	SASARAN STRATEGIS (SS)	INDIKATOR KINERJA SS
1	Terwujudnya kepastian hukum persaingan usaha untuk menjamin iklim investasi yang sehat dengan advokasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat, penegakan hukum persaingan usaha dan pengawasan pelaksanaan kemitraan yang sehat	1.1. Tingkat persaingan usaha yang sehat sesuai dengan prinsip-prinsip UU No.5/1999 (Indeks Persepsi Persaingan Usaha, skala 1-7)
		1.2. Persentase penyelesaian proses penegakan hukum persaingan usaha yang sesuai dengan peraturan berlaku
2	Terwujudnya kualitas layanan manajemen baik internal maupun eksternal melalui <i>e-government</i>	Indeks Tingkat efektivitas pemanfaatan <i>e-government</i> (Percepatan dan kemudahan pelayanan, transparansi pelayanan, kepastian waktu dan keamanan data, skala 1-100)

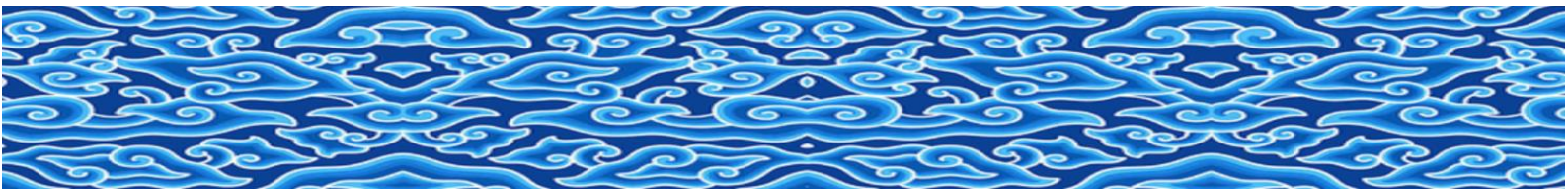
Sumber: Renstra KPPU 2020-2024

Pada Tahun Anggaran 2022 KPPU termasuk Lembaga yang terdampak kondisi adanya Pandemi Covid-19 sehingga KPPU melakukan penyesuaian output dan format pelaksanaan program dan kegiatan.

#### D. SISTEMATIKA PELAPORAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja KPPU Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan  
Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi tentang tugas dan fungsi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.
2. Bab II Perencanaan Kinerja  
Pada bab ini diuraikan mengenai Rencana Strategis, Prioritas Nasional dan Renja tahun 2022 serta rencana kerja dan anggaran serta diuraikan mengenai pengukuran kinerja organisasi.
3. Bab III Akuntabilitas Kinerja  
Membandingkan, menganalisis dan menjabarkan kinerja KPPU tahun 2022 yang diukur dari pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dari seluruh Sasaran Strategis terhadap target yang telah ditetapkan. Pada subbab ini juga menjelaskan rata-rata capaian kinerja dari keseluruhan Sasaran Strategis, apakah telah menunjang keberhasilan ataupun kegagalan/penurunan pencapaian kinerja.



4. Bab IV Penutup

Menjelaskan simpulan menyeluruh dari keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja KPPU tahun 2022 serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di tahun mendatang.

BAB II

# PERENCANAAN KINERJA

LAPORAN KINERJA KPPU TAHUN 2022



## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. RENCANA STRATEGIS**

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1999 memiliki peran sebagai lembaga penegakan hukum dan advokasi persaingan usaha. KPPU melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang pengawasan persaingan usaha yang mendukung keberhasilan Visi Misi Presiden, sesuai yang diamanatkan dalam RPJMN 2020-2024.

#### **Visi:**

**“Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong”**

KPPU merancang Rencana Strategis yang selaras dengan Visi Misi Presiden dan merupakan panduan/acuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Dalam pencapaian Visi KPPU tersebut, maka KPPU melaksanakan Sembilan Misi Presiden dan Wakil Presiden 2020-2024 sebagai berikut:

- 1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;**
- 2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;**
- 3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;**
- 4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;**
- 5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;**
- 6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;**
- 7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;**
- 8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan**
- 9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan**

Selanjutnya tujuan Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah:

**“Meningkatkan persaingan usaha dan kemitraan sehat untuk mendorong perekonomian nasional yang berkeadilan dan berkesinambungan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat”**

Untuk mendukung pencapaian tujuan, telah ditetapkan 2 (dua) Sasaran Strategis, yang merupakan kondisi yang ingin dicapai oleh KPPU sebagai berikut:

1. Terwujudnya kepastian hukum persaingan usaha untuk menjamin iklim investasi yang sehat dengan advokasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat, penegakan hukum persaingan usaha dan pengawasan pelaksanaan kemitraan yang sehat;
2. Terwujudnya kualitas layanan manajemen baik internal maupun eksternal melalui *e-government*

**Prioritas Nasional**

Dalam amanat pembangunan pada RPJMN 2020-2024 dijelaskan keterkaitan antara Misi Presiden, Arahan Presiden dan Agenda Pembangunan yang menjadi pedoman Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam menyusun dan menjalankan program pembangunan. Dalam hal penugasan KPPU yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024, maka pencapaian sasaran pembangunan, indikator yang bermuara pada pencapaian target pembangunan yang ditugaskan kepada KPPU pada RPJMN 2020-2024, KPPU harus bersinergi dengan Kementerian/Lembaga terkait.



Sumber: RPJMN 2020-2024

Gambar 2.1 Amanat Pembangunan dalam RPJMN 2020-2024

**Agenda Pembangunan/Prioritas Nasional ke-satu (PN-1)**  
Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan

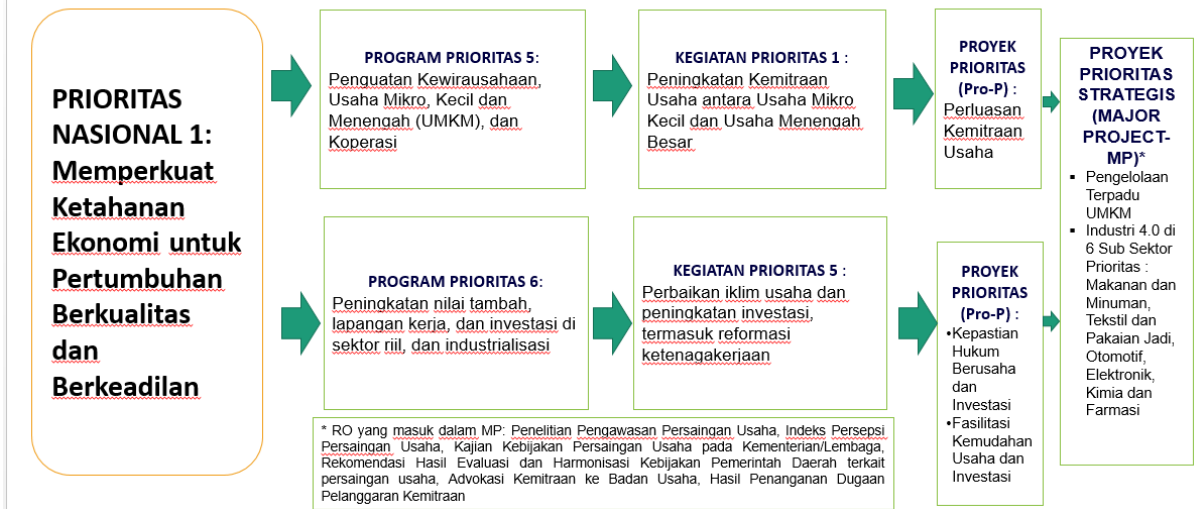


Sumber: RPJMN 2020-2024

Gambar 2.2 Penjelasan Kontribusi KPPU dalam PN-1 dalam RPJMN 2020-2024

Dengan mengacu pada Renstra KPPU 2020-2024 yang telah disahkan melalui Peraturan KPPU Nomor 2 tahun 2020 tentang Rencana Strategis KPPU Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 602) pada tanggal 11 Juni 2020, maka indeks persaingan usaha dapat digunakan untuk mengukur kinerja KPPU dari sisi hasil (*outcome*) akhir dari berbagai proses dan output yang telah dilakukan dan digunakan KPPU untuk mendorong persaingan usaha yang sehat agar terjadi efisiensi ekonomi nasional yang menjadi tujuan pembentukan UU Nomor 5 Tahun 1999 dan Renstra KPPU 2020-2024.

## DUKUNGAN KPPU PADA PN, PP, KP Pro-P, MP TAHUN ANGGARAN 2022



Sumber: Bappenas, 2022

Gambar 2.3 Penjelasan Kontribusi KPPU dalam PN-1 dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) TA 2022

Sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2022 yang diterbitkan tanggal 30 Desember 2021, dijelaskan bahwa Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 memuat arah kebijakan nasional 1 (satu) tahun yang merupakan komitmen Pemerintah untuk memberikan kepastian kebijakan, pendanaan, kerangka regulasi, kerangka pelayanan umum, dan investasi dalam melaksanakan pembangunan nasional yang berkesinambungan

KPPU dalam RKP 2022 mendukung pencapaian Prioritas Nasional Kesatu **(PN-1) yaitu Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan**. Pencapaian keberhasilan target PN-1 tersebut, KPPU bersinergi dengan Kementerian/Lembaga terkait lainnya. Dari PN-1 tersebut, diturunkan ke dalam Program Prioritas (PP) sebagai pedoman teknis bagi Kementerian/Lembaga. Dalam PN-1 sendiri terbagi ke dalam 8 (delapan) PP.

PN-1 yang dalam turunannya melalui PP yang sudah ditetapkan tersebut, menyebutkan bahwa KPPU mendapat amanat penugasan dalam RPJMN 2020-2024 untuk 2 (dua) PP yaitu PP 5 : Penguatan Kewirausahaan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), dan Koperasi dan PP 6:

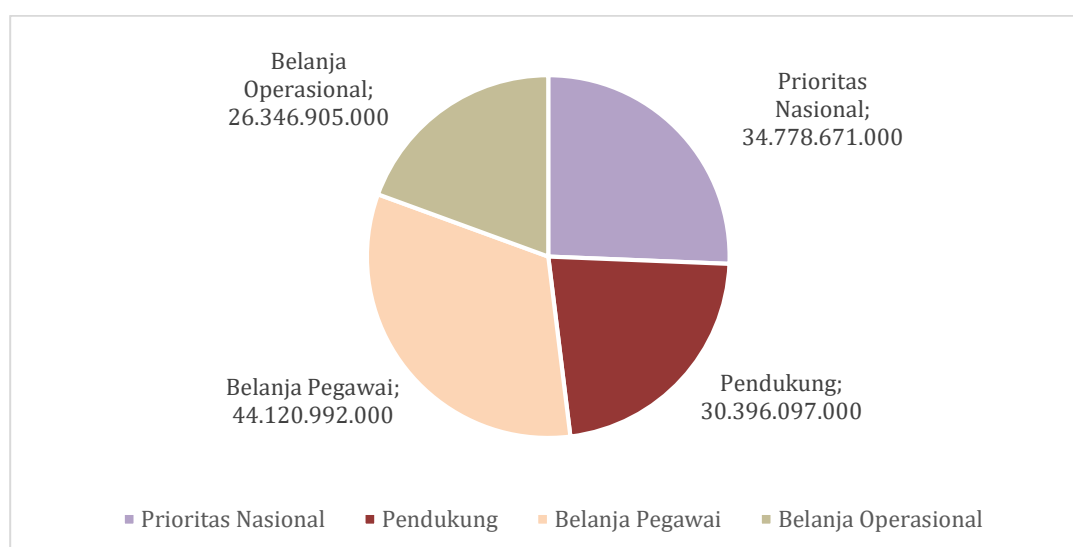


## Peningkatan Nilai Tambah Lapangan Kerja dan Investasi di Sektor Riil dan Industrialisasi.

Pada TA 2022, KPPU melaksanakan 2 (dua) Program yaitu Program Pengawasan Persaingan Usaha dan Program Dukungan Manajemen. Dukungan KPPU terhadap pencapaian PN-1 dilaksanakan melalui pelaksanaan Program Pengawasan Persaingan Usaha. Total alokasi anggaran KPPU pada Pagu Awal TA 2022 sebesar **Rp 99.726.648.000,-** (sembilan puluh sembilan miliar tujuh ratus dua puluh enam juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dengan Pagu Akhir menjadi sebesar **Rp 135.642.665.000,-** (seratus tiga puluh lima miliar enam ratus empat puluh dua juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) karena KPPU mendapatkan tambahan pemanfaatan PNBP khususnya dari denda persaingan usaha, sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-748/MK.02/2021 tanggal 20 Agustus 2021 tentang Persetujuan Penggunaan Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Kementerian Negara/Lembaga, maka KPPU dapat memanfaatkan sebesar 44% dari PNBP. Penggunaan PNBP dapat dialokasikan untuk kegiatan dalam rangka:

- 1) Penyediaan dan peningkatan layanan yang berkualitas dan terukur pada KPPU; dan/atau
- 2) Mendorong peningkatan PNBP pada KPPU.

Alokasi Anggaran KPPU TA 2022 untuk mendukung PN-1 dijelaskan sebagai berikut:



Sumber: KPPU, data 2022 diolah

Gambar 2.4 Alokasi Anggaran KPPU TA 2022

Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 2 (dua) program yaitu Program Pengawasan Persaingan Usaha dan Program Dukungan Manajemen. Berikut rincian Pagu Akhir Anggaran KPPU TA 2022 yang masuk dalam Program Prioritas Nasional dalam Grafik sebagai berikut:



Sumber: KPPU, data 2022 diolah

Gambar 2.5 Rincian Anggaran Program Prioritas Nasional TA 2022

KPPU pada TA 2022 sudah melaksanakan 2 (dua) Program yaitu:

1. Program Pengawasan Persaingan Usaha yang difokuskan pada kegiatan:
  - a. Pemantauan dan Kajian Pelaku Usaha
  - b. Analisa Kebijakan Pemerintah
  - c. Advokasi Persaingan Usaha dan advokasi kemitraan
  - d. Investigasi Dugaan Pelanggaran Persaingan Usaha
  - e. Penindakan Pelanggaran Persaingan Usaha
  - f. Penanganan Perkara Persaingan Usaha
  - g. Penilaian Merger dan Akuisisi
  - h. Pengawasan Kemitraan
  - i. Pengawasan Persaingan Usaha di Wilayah Kerja Kantor Wilayah KPPU
  
2. Program Dukungan Manajemen yang difokuskan pada kegiatan:
  - a. Pengelolaan Sumber Daya Manusia dan Umum
  - b. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
  - c. Peningkatan Data dan Informasi

- d. Penyelenggaraan Bantuan Hukum dan Eksekusi
- e. Penyelenggaraan Komunikasi Lembaga
- f. Pengawasan Akuntabilitas dan Aparatur Negara KPPU
- g. Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran KPPU

Pada Program Dukungan Manajemen juga melakukan pengelolaan Belanja Operasional yaitu Belanja Pegawai dan Belanja Operasional Pemeliharaan Kantor.

Selanjutnya untuk rincian target Output (KRO/RO) Kegiatan di KPPU TA 2022 yang tergabung pada Program Pengawasan Persaingan Usaha merupakan Kegiatan Pendukung Prioritas Nasional khususnya pada PN-1 TA 2022 dapat dilihat pada Lampiran II.

## B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pengukuran pencapaian Sasaran Strategis ditetapkan melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan targetnya pertahun. Penetapan IKU tersebut menggunakan kriteria SMART-C yaitu *Specific* (spesifik), *Measurable* (dapat diukur), *Agreeable* (dapat disetujui), *Realistic* (realistis), dapat dicapai namun menantang, *Time-bounded* (memiliki batas waktu pencapaian), dan *Continuously improved* (kualitas dan target berkembang dan selalu disempurnakan).

Selanjutnya pada Periode Rencana Strategis (Renstra) KPPU 2020-2024 akan bergeser pada upaya pencegahan dan advokasi persaingan usaha dan kemitraan yang sehat, dengan tetap memperhatikan penegakan hukum pada dugaan pelanggaran hukum persaingan usaha tidak sehat.

Indikator Kinerja Utama (IKU) tersusun dari Indikator Sasaran Strategis yang pencapaiannya sangat dipengaruhi oleh keterlibatan pelaku usaha, *stakeholder* terkait dan instansi pemerintah serta KPPU sendiri. IKU KPPU merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategisnya. Berikut IKU KPPU dapat dilihat dalam Tabel 2.1:

Tabel 2.1 Indikator Kinerja Sasaran Strategis KPPU Berdasarkan Renstra KPPU 2020-2024

Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024
1. Terwujudnya kepastian hukum persaingan usaha untuk menjamin iklim investasi yang sehat dengan advokasi nilai-nilai	1.1 Tingkat persaingan usaha yang sehat sesuai dengan prinsip-prinsip UU Nomor 5 Tahun 1999 (Indeks Persepsi	4.5	4.7	4.7	4.9	5.0

Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024
persaingan usaha yang sehat, penegakan hukum persaingan usaha dan pengawasan pelaksanaan kemitraan yang sehat	Persaingan Usaha, skala 1 – 7)					
	1.2 Persentase penyelesaian proses penegakan hukum persaingan usaha yang sesuai dengan peraturan berlaku	80%	85%	90%	95%	100%
2. Terwujudnya kualitas layanan manajemen baik internal maupun eksternal melalui <i>e-government</i>	2.1 Indeks Tingkat efektivitas pemanfaatan <i>e-government</i> (Percepatan dan kemudahan pelayanan, transparansi pelayanan, kepastian waktu dan keamanan data, skala 1 - 100)	75	78	79	80	90

Sumber: Renstra KPPU 2020-2024

### C. TARGET KINERJA TAHUN 2022

Selanjutnya dalam proses penyusunan Rencana Kerja (Renja) KPPU Tahun 2022 dimulai sejak awal tahun 2021 yang mendasarkan pada RKP 2022 dan Renstra KPPU 2020-2024. Pada proses penyusunan Renja/RKP TA 2022 telah dilakukan penyesuaian perencanaan dan penganggaran Kementerian/Lembaga oleh Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan melalui Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP).

Dalam proses penyusunan perencanaan dan penganggaran tersebut dilakukan pembahasan dalam berbagai forum internal maupun eksternal. Hasil pembahasan terkait target kinerja dan rincian program tersebut telah disepakati dan disampaikan dalam forum *Trilateral Meeting* dengan Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran (DJA).

Berdasarkan hasil pembahasan dengan Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran, KPPU mendapat pagu anggaran pada Pagu Awal TA 2022 sebesar **Rp 99.726.648.000,-** (sembilan puluh sembilan miliar tujuh ratus dua puluh enam juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dengan Pagu Akhir menjadi

sebesar **Rp 135.642.665.000,-** (seratus tiga puluh lima miliar enam ratus empat puluh dua juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan rincian anggaran sebagaimana dalam Tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2 Rincian Alokasi Anggaran KPPU TA 2022

<b>Program</b>	<b>Pagu Awal (Rp)</b>	<b>Pagu Akhir (Rp)</b>
Program Pengawasan Persaingan Usaha	<b>16.408.023.000</b>	<b>34.778.671.000</b>
Program Dukungan Manajemen	<b>14.130.428.000</b>	<b>30.396.097.000</b>
Belanja Pegawai	<b>44.120.992.000</b>	<b>44.120.992.000</b>
Belanja Operasional dan Pemeliharaan Kantor	<b>25.067.205.000</b>	<b>26.346.905.000</b>
<b>Total</b>	<b>99.726.648.000</b>	<b>135.642.665.000</b>

Sumber: KPPU, data 2022 diolah

Dengan alokasi anggaran TA 2022 tersebut, sesuai Rencana Kerja Pembangunan (RKP/Renja) TA 2022 ditetapkan Indikator Kinerja Sasaran Strategis KPPU sebagaimana dijelaskan pada Tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3 Indikator Kinerja Sasaran Strategis KPPU Berdasarkan Renstra KPPU 2020-2024

<b>Sasaran Strategis (SS)</b>	<b>Indikator Kinerja Sasaran Strategis</b>	<b>Target 2022</b>
1. Terwujudnya kepastian hukum persaingan usaha untuk menjamin iklim investasi yang sehat dengan advokasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat, penegakan hukum persaingan usaha dan pengawasan pelaksanaan kemitraan yang sehat	1.1 Tingkat persaingan usaha yang sehat sesuai dengan prinsip-prinsip UU Nomor 5 Tahun 1999 (Indeks Persepsi Persaingan Usaha, skala 1 – 7)	4.7
	1.2 Persentase penyelesaian proses penegakan hukum persaingan usaha yang sesuai dengan peraturan berlaku	90%
2. Terwujudnya kualitas layanan manajemen baik internal maupun eksternal melalui <i>e-government</i>	2.1 Indeks Tingkat efektivitas pemanfaatan <i>e-government</i> (Percepatan dan kemudahan pelayanan, transparansi pelayanan, kepastian waktu dan keamanan data, skala 1 - 100)	79

Sumber: Renstra KPPU 2020-2024

#### D. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Perjanjian Kinerja KPPU TA 2022 telah disepakati pada bulan November 2022 dan diperbarui setiap triwulan untuk memastikan bahwa kinerja telah disesuaikan dengan target Indikator Kinerja Sasaran Strategis yang direncanakan. Perjanjian Kinerja untuk alokasi anggaran KPPU TA 2022 sebesar **Rp 135.642.665.000,-** telah disepakati pada awal triwulan IV TA 2022. Dokumen Perjanjian Kinerja KPPU Tahun 2022 disajikan dalam Lampiran I.

Perjanjian Kinerja inilah yang selanjutnya dijabarkan (*cascading*) menjadi kinerja seluruh unit dan pegawai sesuai dengan tugas dan fungsinya. Kinerja pada level lembaga berisi Sasaran Strategis, Indikator Sasaran Strategis TA 2022 dan target yang dirincikan pada Tabel 2.4 sebagai berikut:

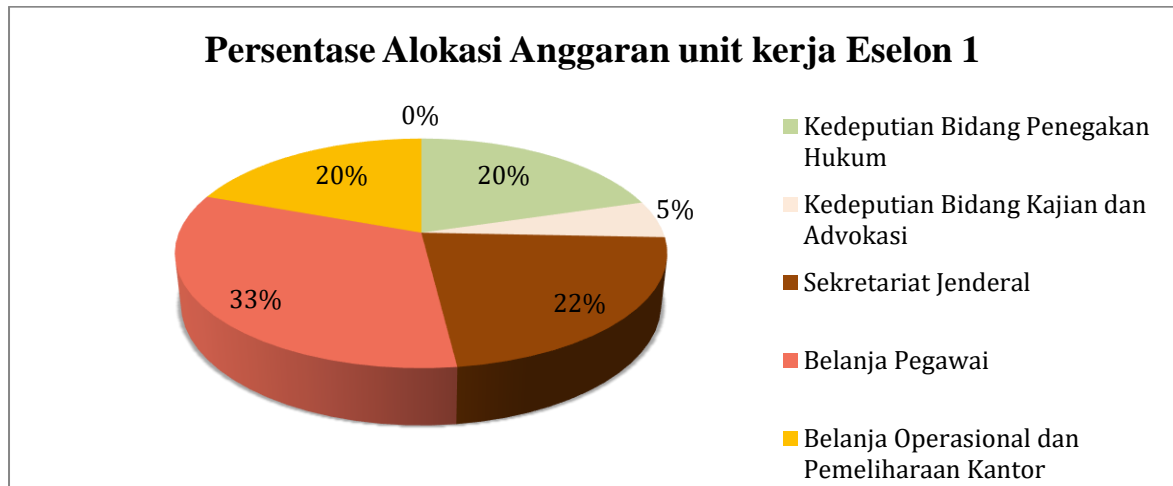
Tabel 2.4 Indikator Kinerja Utama KPPU pada Sasaran Strategis Berdasarkan Renstra KPPU 2020-2024

Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Target 2022
1. Terwujudnya kepastian hukum persaingan usaha untuk menjamin iklim investasi yang sehat dengan advokasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat, penegakan hukum persaingan usaha dan pengawasan pelaksanaan kemitraan yang sehat	1.1 Tingkat persaingan usaha yang sehat sesuai dengan prinsip-prinsip UU Nomor 5 Tahun 1999 (Indeks Persepsi Persaingan Usaha, skala 1 – 7)	4.7
	1.2 Persentase penyelesaian proses penegakan hukum persaingan usaha yang sesuai dengan peraturan berlaku	90%
2. Terwujudnya kualitas layanan manajemen baik internal maupun eksternal melalui <i>e-government</i>	2.1 Indeks Tingkat efektivitas pemanfaatan <i>e-government</i> (Percepatan dan kemudahan pelayanan, transparansi pelayanan, kepastian waktu dan keamanan data, skala 1 - 100)	79

Sumber: Renstra KPPU 2020-2024

Rincian alokasi anggaran untuk mendukung terwujudnya 2 (dua) Sasaran Strategis KPPU TA 2022 telah dijelaskan sebelumnya.

Berikut adalah alokasi anggaran per unit kerja Eselon 1 KPPU TA 2022 dapat dilihat pada grafik sebagai berikut:



Sumber: KPPU, data 2022 diolah

Gambar 2.6 Persentase Alokasi Anggaran per Unit Eselon I KPPU TA 2022

Tabel 2.5 Alokasi Anggaran per Unit Kerja Eselon 1 KPPU TA 2022

Unit Eselon I		Pagu Akhir (Rp)
1	Kedepujian Kajian dan Advokasi	7.113.508.000,-
2	Kedepujian Penegakan Hukum	27.665.163.000,-
3	Sekretariat Jenderal	30.396.097.000,-
	Belanja Pegawai	44.120.992.000,-
	Belanja Operasional dan Pemeliharaan Kantor	26.346.905.000,-
<b>Total</b>		<b>135.642.665.000,-</b>

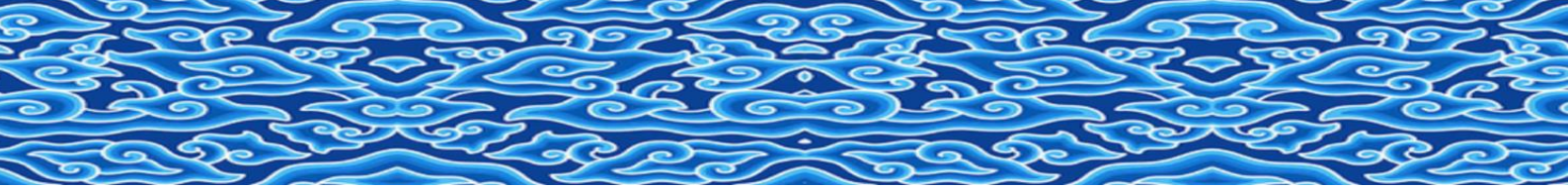
Sumber: KPPU, data 2022 diolah

### **Pengukuran Kinerja**

Untuk melihat kemajuan capaian kinerja dan anggaran KPPU, secara periodik seluruh unit kerja menyampaikan perkembangannya ataupun kendalanya dalam aplikasi SMART dan e-Monev. SMART merupakan sistem informasi yang dimiliki oleh Kementerian Keuangan, sedangkan e-Monev merupakan sistem informasi di bawah BAPPENAS.

Berdasarkan kebijakan internal KPPU, maka untuk terlaksananya tertib administrasi, maka setiap triwulan dilakukan klarifikasi dan validasi melalui kegiatan monitoring dan evaluasi yang diikuti oleh para pejabat struktural setingkat Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian pada masing – masing Eselon I.

Tujuan monitoring dan evaluasi adalah sebagai berikut:

- 
1. Untuk mengetahui perkembangan capaian kinerja;
  2. Untuk mengidentifikasi kendala tidak tercapainya/terlambatnya capaian kinerja;
  3. Melakukan penilaian apakah rencana aksi sudah tepat untuk mencapai tujuan/ sasaran;
  4. Sebagai dasar dalam melakukan revisi kinerja/realokasi anggaran;
  5. Sumber informasi bagi pimpinan dalam pengambilan kebijakan;
  6. Sebagai sumber data dalam penyusunan laporan kinerja;
  7. Sebagai dasar penyusunan rencana kinerja periode berikutnya.

Dasar formula penghitungan pengukuran kinerja tingkat lembaga yaitu KPPU untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam Indikator Kinerja Sasaran Strategis dijelaskan dalam 3 (tiga) Surat Keputusan yaitu:

1. Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 98.2/SJ/Kep/IV/2022 tentang Penetapan Indikator Utama Sekretaris Jenderal Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
2. Keputusan Deputi Kajian dan Advokasi Nomor 31/DKA/Kep/VIII/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Deputi Bidang Kajian dan Advokasi Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
3. Keputusan Deputi Bidang Penegakan Hukum Nomor 443/DH/Kep/IV/2022 tentang Penetapan Indikator Utama Deputi Bidang Penegakan Hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha.



BAB III

# AKUNTABILITAS KINERJA

LAPORAN KINERJA KPPU TAHUN 2022



## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### A. CAPAIAN KINERJA TA 2022

#### 1) Ringkasan Kinerja

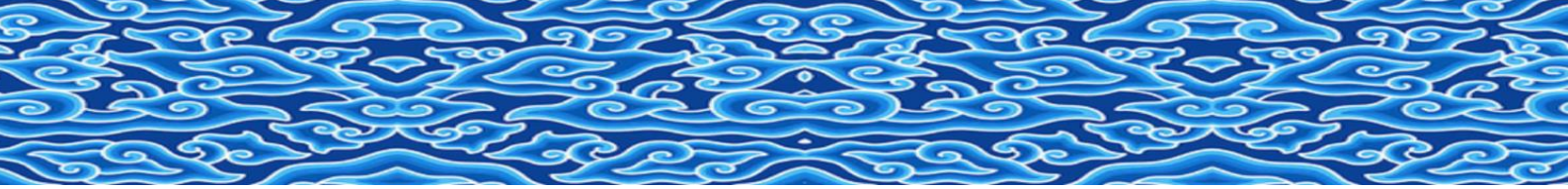
Hasil pengukuran kinerja tingkat lembaga yaitu Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) TA 2022 memiliki 2 (dua) Sasaran Strategis yang dijabarkan dalam 3 (tiga) Indikator Kinerja Sasaran Strategis. Dari 3 (tiga) Indikator Kinerja Sasaran Strategis terdapat 2 indikator kinerja (100%) telah mencapai target dan 1 (satu) indikator kinerja belum mencapai target. Berikut ringkasan capaian kinerja masing-masing Indikator Kinerja Sasaran Strategis pada setiap Sasaran Strategis sebagaimana tercantum pada Tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1 Ringkasan Kinerja Sasaran Strategis Komisi Pengawas Persaingan Usaha TA 2022

No	Sasaran Strategis (SS)/ Indikator Kinerja SS	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Notifikasi
1.	Terwujudnya kepastian hukum persaingan usaha untuk menjamin iklim investasi yang sehat dengan advokasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat, penegakan hukum persaingan usaha dan pengawasan pelaksanaan kemitraan yang sehat					
1.1	Tingkat persaingan usaha yang sehat sesuai dengan prinsip-prinsip UU Nomor 5 Tahun 1999 (Indeks Persepsi Persaingan Usaha, skala 1 - 7)	Indeks	4.7	4.87	104%	●
1.2	Persentase penyelesaian proses penegakan hukum persaingan usaha yang sesuai dengan peraturan berlaku	Persentase	90%	100%	111%	●
2.	Terwujudnya kualitas layanan manajemen baik internal maupun eksternal melalui <i>e-government</i>					
2.1	Indeks Tingkat efektivitas pemanfaatan <i>e-government</i> (Percepatan dan kemudahan pelayanan, transparansi pelayanan, kepastian waktu dan keamanan data, skala 1 - 100)	Indeks	79	77.73	98.39%	●

Sumber: KPPU, data 2022 diolah

Keterangan: ● = mencapai/ melampaui target; ● = belum mencapai target



Untuk rekapitulasi realisasi anggaran dan target output (KRO/RO) Kegiatan Prioritas Nasional pada Program Pengawasan Persaingan Usaha dan kegiatan pendukung operasional Prioritas Nasional yang masuk pada Program Dukungan Manajemen dapat dilihat Lampiran III.

2) Uraian Kinerja

Uraian kinerja atas 2 (dua) Indikator Kinerja Sasaran Strategis untuk Sasaran Strategis yaitu Terwujudnya kepastian penegakan hukum persaingan usaha dan efektivitas advokasi kebijakan persaingan untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dalam upaya mendukung pertumbuhan investasi, yaitu:

- a. Tingkat persaingan usaha yang sehat sesuai dengan prinsip-prinsip UU Nomor 5 Tahun 1999 (Indeks Persepsi Persaingan Usaha, skala 1 – 7); dan
- b. Persentase penyelesaian proses penegakan hukum persaingan usaha yang sesuai dengan peraturan berlaku.

Uraian kinerja atas 2 (dua) Indikator Kinerja Sasaran Strategis untuk Sasaran Strategis yaitu Terwujudnya kepastian penegakan hukum persaingan usaha dan efektivitas advokasi kebijakan persaingan untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dalam upaya mendukung pertumbuhan investasi adalah sebagai berikut:

**1. Terwujudnya kepastian hukum persaingan usaha untuk menjamin iklim investasi yang sehat dengan advokasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat, penegakan hukum persaingan usaha dan pengawasan pelaksanaan kemitraan yang sehat**

**1.1. Tingkat persaingan usaha yang sehat sesuai dengan prinsip-prinsip UU Nomor 5 Tahun 1999 (Indeks Persepsi Persaingan Usaha, skala 1 – 7)**

Untuk Indikator Kinerja Sasaran Strategis (1.1): Tingkat persaingan usaha yang sehat sesuai dengan prinsip-prinsip UU Nomor 5 Tahun 1999 (Indeks Persepsi Persaingan Usaha, skala 1 – 7) diukur dengan formula penghitungan yaitu:

Survei Indeks Persepsi Persaingan Usaha

Pada tahun 2022, nilai Indikator Kinerja Sasaran Strategis (Tingkat persaingan usaha yang sehat sesuai dengan prinsip-prinsip UU Nomor 5 Tahun 1999, Indeks Persepsi Persaingan Usaha dengan skala 1 – 7) untuk Sasaran Strategis yaitu Terwujudnya kepastian hukum persaingan usaha untuk menjamin iklim investasi yang sehat dengan advokasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat, penegakan hukum persaingan usaha dan pengawasan pelaksanaan kemitraan yang sehat yaitu sebesar 104% yang terealisasi 4.87 (Indeks skala 1-7) dari target 4.7 (Indeks skala 1-7) sebagaimana dijelaskan dalam Tabel 3.2 berikut:

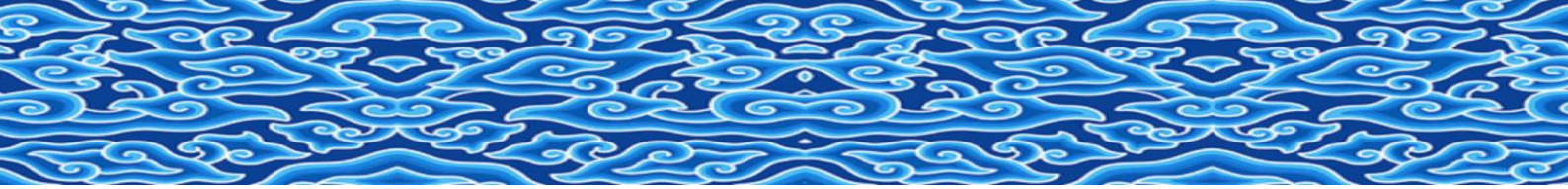
Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis TA 2022 (Indeks Persepsi Persaingan Usaha)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Target 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Target 2024 (Akhir Renstra)
1	Terwujudnya kepastian hukum persaingan usaha untuk menjamin iklim investasi yang sehat dengan advokasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat, penegakan hukum persaingan usaha dan pengawasan pelaksanaan kemitraan yang sehat	1.1 Tingkat persaingan usaha yang sehat sesuai dengan prinsip-prinsip UU Nomor 5 Tahun 1999 (Indeks Persepsi Persaingan Usaha, skala 1-7)	4.7	4.87	4.81	5.0

Sumber: Renstra KPPU 2020-2024, data 2022 diolah

Pencapaian *outcome* pada Indikator Kinerja Sasaran Strategis yaitu Indeks Persepsi Persaingan Usaha yang menjadi Indikator Kinerja Utama KPPU melalui pelaksanaan kegiatan dalam lingkup Kedeputusan Bidang Kajian dan Advokasi yang dilakukan melalui pelaksanaan survei kajian indeks persaingan usaha yang dilakukan secara swakelola bekerja sama dengan Universitas Padjadjaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur indeks persaingan usaha secara nasional yang diintegrasikan melalui pengukuran persaingan usaha di setiap provinsi.

Hasil survei menunjukkan bahwa persaingan usaha secara nasional termasuk ke dalam persaingan usaha menuju tinggi. Terdapat kenaikan skor indeks persaingan usaha pada tahun 2022 dibandingkan tahun 2021 baik menggunakan bobot sama maupun bobot PCA. Pada tahun



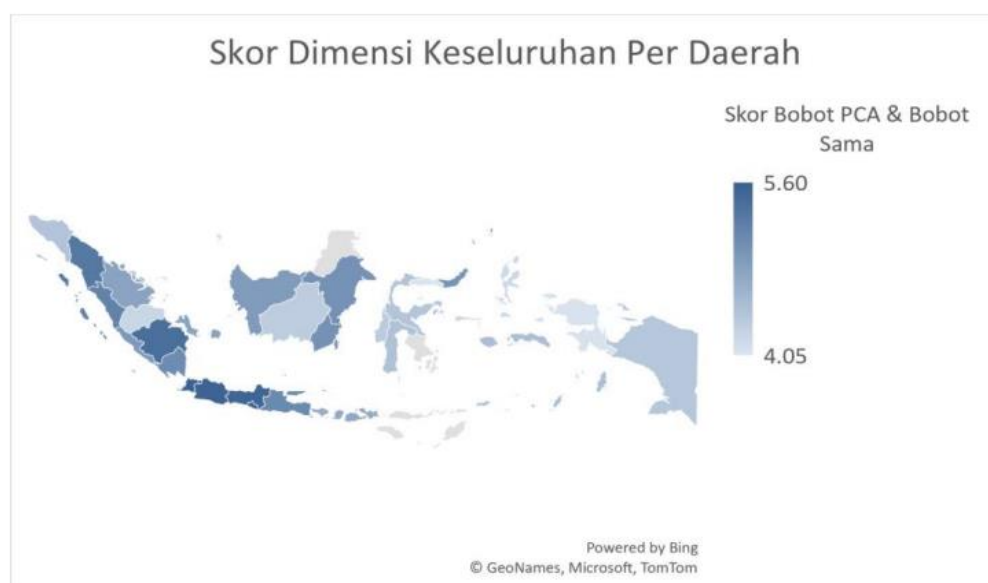
2022, indeks persaingan usaha dengan menggunakan dimensi keseluruhan dan bobot sama mencapai 4.87 atau meningkat dibandingkan tahun 2021 sebesar 4.81. Kondisi perekonomian yang terus membaik pasca pandemik Covid-19 mendorong peningkatan iklim persaingan usaha yang tercermin dari peningkatan indeks yang dihasilkan pada tahun 2022 ini. Secara lebih detail, hampir semua skor dimensi dari komponen pembentuk indeks persaingan usaha mengalami kenaikan, kecuali dimensi kinerja industri yang skor dimensinya mengalami penurunan. Penurunan kinerja industri di tahun 2022 ini dapat disebabkan karena inefisiensi teknis dan inefisiensi alokatif yang terjadi seperti kenaikan harga minyak goreng pada awal tahun. Dimensi SCP tahun ini memiliki kontribusi sekitar 38 persen terhadap variasi skor indeks persaingan usaha dengan menggunakan bobot PCA dan bobot sama.

Indeks persaingan usaha di setiap provinsi sendiri diperoleh dari proses penjumlahan secara keseluruhan (agregasi) dari indeks persaingan usaha di setiap sektor ekonomi di masing-masing provinsi tersebut. Seluruh proses penilaian terhadap kondisi persaingan usaha sektoral di setiap provinsi diperoleh berdasarkan persepsi responden yang merupakan *stakeholder* di daerah yang dianggap memahami kondisi persaingan usaha di daerahnya. Terdapat 4 (empat) responden di setiap provinsi yang dapat mewakili untuk menjelaskan persaingan usaha di masing-masing daerahnya yaitu terdiri dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan (merepresentasikan Pemerintah), Pengurus KADIN (merepresentasikan pelaku usaha), Bank Indonesia dan Akademisi. Objek studi mencakup 34 Provinsi di seluruh Indonesia.

Secara umum, indeks persaingan usaha di daerah pada tahun 2022 menunjukkan adanya perubahan pada daerah yang termasuk 10 (sepuluh) persaingan usaha yang tinggi dan 10 (sepuluh) persaingan usaha yang rendah dari tahun sebelumnya. Berdasarkan 10 (sepuluh) daerah yang memiliki persaingan usaha tertinggi terdiri atas Provinsi DKI Jakarta, D.I Yogyakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Sumatera Selatan, Sulawesi Tenggara, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Jawa Timur. Sedangkan, 10 (sepuluh) daerah dengan persaingan usaha terendah berada pada Provinsi Maluku, Aceh, Sulawesi Tengah, Papua, Sulawesi Barat, Kalimantan Tengah, Jambi, Maluku Utara, Gorontalo, dan Papua Barat. Sektor-sektor yang termasuk masing-masing dalam 10 (sepuluh) sektor dengan persaingan usaha yang tinggi dan rendah terdapat juga perubahan. Pada tahun 2022, berikut merupakan 10 (sepuluh) sektor yang memiliki persaingan usaha

tertinggi, yaitu Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Perdagangan Besar, Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor; Jasa Keuangan dan Asuransi; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; Transportasi dan Pergudangan; Jasa Perusahaan; Informasi dan Komunikasi; Industri Pengolahan; dan Pertanian Kehutanan, dan Perikanan. Sedangkan, 3 (tiga) sektor dengan persaingan usaha terendah berada pada sektor Pertambangan dan Penggalan; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang; serta Pengadaan Listrik dan Gas.

Hasil skor bobot indeks persaingan usaha per provinsi menggunakan dimensi Keseluruhan baik dengan bobot sama atau bobot PCA berdasarkan persepsi para pemangku kepentingan (*stakeholder*) di masing-masing provinsi yang meliputi Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Bank Indonesia, KADIN, akademisi daerah setempat dijelaskan pada Gambar 3.1 dan Grafik 3.1 sebagai berikut.

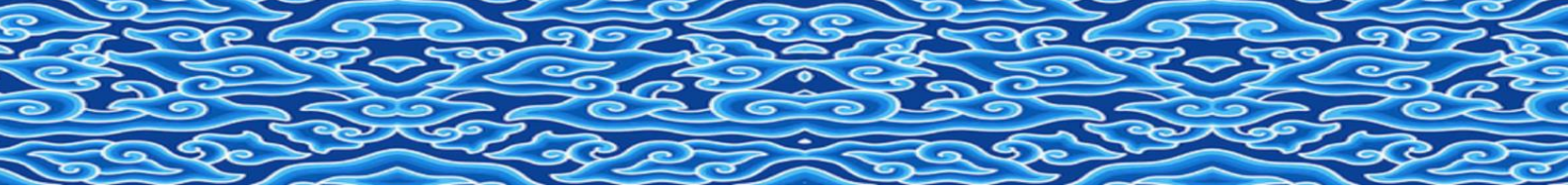


Sumber: Laporan Akhir Kajian Indeks Persaingan Usaha KPPU, 2022

Gambar 3.1 Peta Persaingan Usaha di Provinsi di Indonesia TA 2022

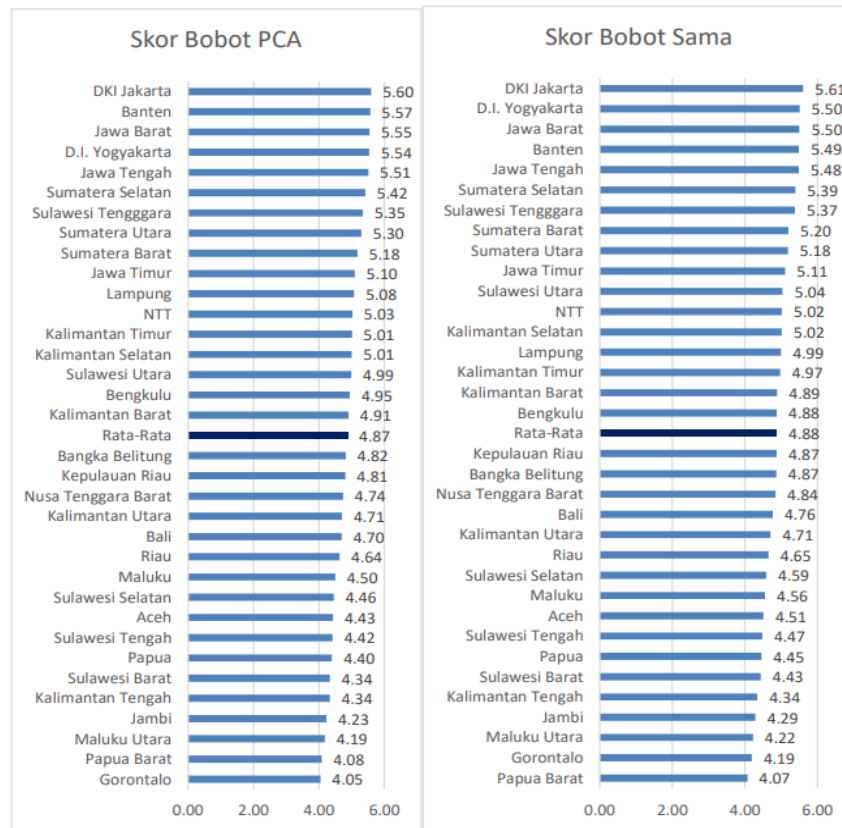
Jika dilihat dari sebaran provinsi pada Gambar 3.1 tersebut maka dari hasil skor indeks persaingan usaha menggunakan seluruh dimensi baik menjumlahkan dengan bobot sama atau bobot PCA, diperoleh beberapa kesimpulan, sebagai berikut:

- a. Persaingan Sangat Tinggi (Skor Indeks 6.51-7.00) Tidak terdapat provinsi yang memiliki skor indeks persaingan usaha yang terkategori dalam persaingan sangat tinggi.
- b. Persaingan Cukup Tinggi (Skor Indeks 5.51-6.50) Terdapat 3 provinsi dengan persaingan cukup tinggi dengan menggunakan bobot sama



dan bobot PCA meliputi DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Barat.

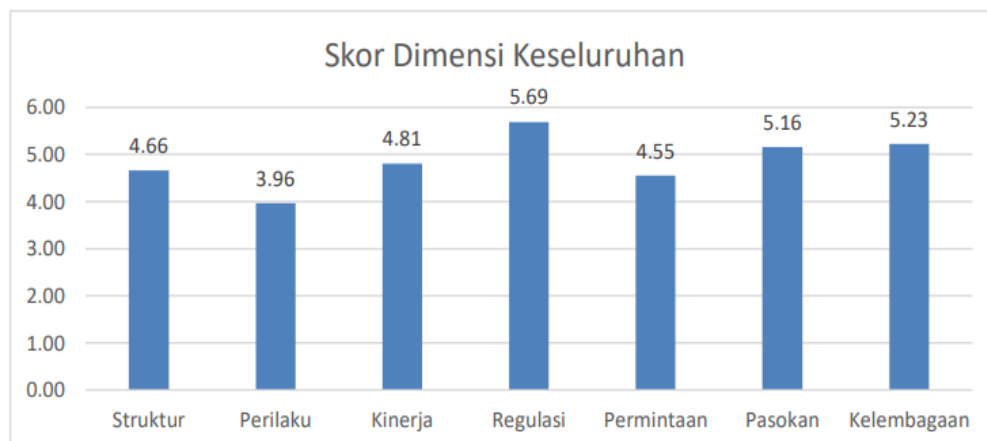
- c. Persaingan Sedikit Tinggi (Skor Indeks 4.51-5.50) Terdapat 20 provinsi yang masuk dalam kategori persaingan yang sedikit tinggi meliputi DKI Jakarta, D.I. Yogyakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Sumatera Selatan, 24 Sulawesi Tenggara, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Jawa Timur, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Selatan, Lampung, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Bengkulu, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Nusa Tenggara Barat, Bali, Kalimantan Utara, dan Riau
- d. Persaingan Moderat (Skor Indeks 3.51-4.50) Terdapat sekitar 11 provinsi yang masuk dalam kategori persaingan yang moderat meliputi Sulawesi Selatan, Maluku, Aceh, Sulawesi Tengah, Papua, Sulawesi Barat, Kalimantan Tengah, Jambi, Maluku Utara, Gorontalo dan Papua Barat.
- e. Persaingan Sedikit Rendah (Skor Indeks 2.51-3.50) Tidak terdapat provinsi dengan skor indeks persaingan usaha yang terkategori dalam persaingan sedikit rendah
- f. Persaingan Cukup Rendah (Skor Indeks 1.51-2.50) Tidak terdapat provinsi yang memiliki skor indeks persaingan usaha yang terkategori dalam persaingan cukup rendah.
- g. Persaingan Sangat Rendah (Skor Indeks 0.00-1.50) Tidak terdapat provinsi yang memiliki skor indeks persaingan usaha yang terkategori dalam persaingan sangat rendah.



Sumber: Laporan Akhir Kajian Indeks Persaingan Usaha KPPU, 2022

Gambar 3.2 Grafik Indeks Persaingan Usaha Dimensi Keseluruhan Menurut Bobot PCA dan Bobot Sama Tingkat Provinsi di Indonesia TA 2022

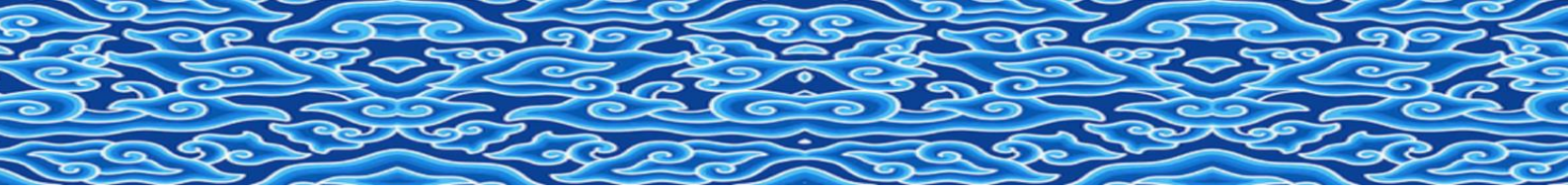
Hasil rata-rata skor indeks persaingan usaha per dimensi berdasarkan dimensi keseluruhan dijelaskan dalam grafik sebagai berikut.



Sumber: Laporan Akhir Kajian Indeks Persaingan Usaha KPPU, 2022

Gambar 3.3 Rata-rata Dimensi Persaingan Usaha





Jika dilihat dari masing-masing dimensi berdasarkan Grafik 3.3 di atas, maka dimensi regulasi memiliki rata-rata skor yang tertinggi. Meski memiliki bobot/kontribusi bukan terbesar dalam pembentukan indeks secara keseluruhan, namun secara rata-rata dimensi regulasi memiliki skor paling besar. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi yang ada di daerah telah mengarah atau mendukung pada kondisi persaingan usaha yang sehat.

Dari sisi dimensi SCP, dimensi perilaku (*conduct*) memiliki skor rata-rata terendah dibanding dimensi struktur (*structure*) dan dimensi kinerja (*performance*) dengan skor masing-masing untuk SCP ialah sebesar 4.66, 3.96 dan 4.81. Hal ini menunjukkan bahwa dari sisi perilaku pelaku usaha, persaingan usaha di daerah belum mengarah pada persaingan usaha yang tinggi.

Hasil ini juga mengindikasikan bahwa terdapat penguasaan pasar oleh beberapa pelaku usaha, adanya potensi kerja sama dalam penetapan output dan harga dan lain sebagainya, yang mengarah pada persaingan usaha yang rendah. Dimensi regulasi memiliki skor indeks sebesar 5.69 yang menunjukkan bahwa terdapat indikasi bahwa regulasi saat ini dianggap mendorong persaingan yang cukup tinggi

## **1.2. Persentase penyelesaian proses penegakan hukum persaingan usaha yang sesuai dengan peraturan berlaku**

Untuk Indikator Kinerja Sasaran Strategis (1.2): Persentase penyelesaian proses penegakan hukum persaingan usaha yang sesuai dengan peraturan berlaku diukur dengan formula penghitungan yaitu:

Semua indikator kinerja kegiatan yang diukur melalui persentase, diakumulasikan nilai agregat/komposit

Penajaman pengukuran Indikator kinerja Sasaran Strategis (IKSS-1.2) Persentase penyelesaian proses penegakan hukum persaingan usaha yang sesuai dengan peraturan berlaku ditujukan untuk menindaklanjuti hasil reviu dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terhadap Laporan Kinerja KPPU TA 2020. Sehingga, formula pengukuran pada IKSS-1.2 tersebut menjadi:

Jumlah putusan KPPU yang sesuai dengan peraturan berlaku yang diselesaikan pada tingkat Pengadilan Negeri/Pengadilan Niaga pada tahun berjalan – Jumlah putusan KPPU yang dibatalkan di tingkat Pengadilan Negeri/Pengadilan Niaga pada tahun berjalan berdasarkan pertimbangan proses penyelesaian di KPPU tidak sesuai dengan peraturan hukum acara formil

Jumlah Keseluruhan Putusan KPPU yang ditindaklanjuti di Tingkat Pengadilan Negeri/Pengadilan Niaga pada tahun berjalan

Berdasarkan perubahan formula pengukuran IKSS-1.2 tersebut di atas, maka TA 2022, nilai Indikator Kinerja Sasaran Strategis Persentase penyelesaian proses penegakan hukum persaingan usaha yang sesuai dengan peraturan berlaku untuk Sasaran Strategis yaitu Terwujudnya kepastian hukum persaingan usaha untuk menjamin iklim investasi yang sehat dengan advokasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat, penegakan hukum persaingan usaha dan pengawasan pelaksanaan kemitraan yang sehat yaitu capaian kinerja sebesar 111% atau dengan realisasi sebesar 100% dengan target 90% sebagaimana dijelaskan dalam Tabel 3.3 berikut:

Tabel 3.3 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis TA 2022 (Penyelesaian Proses Penegakan Hukum Persaingan Usaha Yang Sesuai dengan Peraturan Berlaku)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Target 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Target 2024 (Akhir Renstra)
1	Terwujudnya kepastian hukum persaingan usaha untuk menjamin iklim investasi yang sehat dengan advokasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat, penegakan hukum persaingan usaha dan pengawasan pelaksanaan kemitraan yang sehat	1.1. Persentase penyelesaian proses penegakan hukum persaingan usaha yang sesuai dengan peraturan berlaku	90%	100%	100%	100%

Sumber: Renstra KPPU 2020-2024, data 2022 diolah

Berdasarkan data litigasi TA 2022, terdapat 8 (delapan) Putusan KPPU pada proses upaya hukum keberatan yang diajukan pelaku usaha terhadap putusan KPPU pada tingkat Pengadilan Negeri/Pengadilan Niaga, maka terdapat 1 (satu) Putusan KPPU yang dibatalkan dengan rincian dalam Lampiran II. Terdapat 1 (satu) Putusan KPPU dinyatakan batal/kalah di tingkat Mahkamah Agung berdasarkan amar putusan pengadilan tersebut. Hasil amar putusan menerangkan bahwa batal/kalahnya didasarkan karena substansi perkara, bukan karena berdasarkan pertimbangan proses penyelesaian hukum acara di KPPU yang tidak sesuai peraturan (formil/hukum acara). Selanjutnya berdasarkan penjelasan tersebut, maka hasil perhitungan IKSS-1.2 sebagai berikut:

= Jumlah putusan KPPU yang sesuai dengan peraturan berlaku yang diselesaikan pada tingkat Pengadilan Negeri/Pengadilan Niaga pada tahun berjalan – Jumlah putusan KPPU yang dibatalkan di tingkat Pengadilan Negeri/Pengadilan Niaga pada tahun berjalan berdasarkan pertimbangan proses penyelesaian di KPPU tidak sesuai dengan peraturan hukum acara formil

---

Jumlah Keseluruhan Putusan KPPU yang ditindaklanjuti di Tingkat Pengadilan Negeri/Pengadilan Niaga pada tahun berjalan

$$\begin{aligned} &= \frac{8 - 0}{8} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Berdasarkan penjabaran penghitungan di atas, dapat dijelaskan bahwa capaian indikator kinerja kedua pada Sasaran Strategis (SS-1.2) Terwujudnya kepastian penegakan hukum persaingan usaha dan efektivitas advokasi kebijakan persaingan untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dalam upaya mendukung pertumbuhan investasi dengan capaian kinerja sebesar 111% atau terealisasi sebesar 100% dengan target 90%

Rekapitulasi data litigasi TA 2022 pada proses upaya hukum keberatan yang diajukan pelaku usaha terhadap putusan KPPU pada tingkat Pengadilan Negeri/Pengadilan Niaga, maka terdapat 1 (satu) Putusan KPPU yang dibatalkan dengan rincian yang dapat dilihat pada Lampiran II.

## **2. Terwujudnya kualitas layanan manajemen baik internal maupun eksternal melalui *e-government***

### **2.1 Indeks tingkat efektivitas pemanfaatan *e-government* (Percepatan dan kemudahan pelayanan, transparansi pelayanan, kepastian waktu dan keamanan data, skala 1 - 100)**

Uraian kinerja atas 1 (satu) Indikator Kinerja Sasaran Strategis (2.1) untuk Sasaran Strategis 2: Terwujudnya kualitas layanan manajemen baik internal maupun eksternal melalui *e-government* dicapai dengan formula penghitungan melalui yaitu:

Rata-rata dari penghitungan nilai IKK\* Eselon II pada Sekretariat Jenderal pada tahun berjalan

Terdapat perbaikan pada IKSS 2.1 sesuai dengan reviu dari Satuan Pengawasan Internal (SPI) terhadap Laporan Kinerja KPPU TA 2020, sehingga formula pengukuran pada IKSS-2.1 tersebut menjadi:

Rata-rata nilai Indeks terkait layanan yang merupakan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) pada Eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal.

\*Nilai indeks tersebut dilakukan konversi ke angka indeks IKSS yaitu angka indeks skala 1-100, sehingga akan mendapatkan target nilai indeks ISS TA 2022.

Berdasarkan perubahan formula pengukuran IKSS-2.1 tersebut di atas, maka pada TA 2022 hasil perhitungan rata-rata nilai konversi realisasi nilai IKK terkait layanan Unit Kerja Eselon II di Sekretariat Jenderal yang akan menjadi nilai IKSS-2.1: Indeks tingkat efektivitas pemanfaatan *e-government* (Percepatan dan kemudahan pelayanan, transparansi pelayanan, kepastian waktu dan keamanan data, skala 1 - 100) untuk mencapai Sasaran Strategis (SS-2) yaitu Terwujudnya kualitas layanan manajemen baik internal maupun eksternal melalui *e-government* yaitu tercapai kinerja 98.39% atau dengan terealisasi poin nilai sebesar 77.73 dengan target 79 sebagaimana dijelaskan dalam Tabel 3.4 berikut:

Tabel 3.4 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis TA 2022  
(Indeks Tingkat efektivitas pemanfaatan *e-government*)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Target 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Target 2024 (Akhir Renstra)
1	Terwujudnya kualitas layanan manajemen baik internal maupun eksternal melalui <i>e-government</i>	Indeks Tingkat efektivitas pemanfaatan <i>e-government</i> (Percepatan dan kemudahan pelayanan, transparansi pelayanan, kepastian waktu dan keamanan data, skala 1 - 100)	79	77.73	76	90

Sumber: Renstra KPPU 2020-2024, data 2022 diolah

Pencapaian outcome pada Indikator Kinerja Sasaran Strategis yaitu Indeks Tingkat efektivitas pemanfaatan *e-government* melalui formula pengukuran yaitu rata-rata nilai Indeks terkait layanan yang merupakan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) pada Eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal. Nilai IKK terkait layanan pada Unit Kerja Eselon II di Sekretariat Jenderal terdapat 12 (dua belas) IKK dengan nilai Indeks yaitu:

1. Indeks kepuasan layanan Bagian Sumber Daya Manusia
2. Indeks pemahaman pegawai mengenai peraturan Sumber Daya Manusia
3. Indeks ketepatan waktu penyusunan RKBMN
4. Indeks kepuasan layanan umum
5. Indeks kepuasan atas layanan ketatausahaan dan operasional pimpinan
6. Indeks kepuasan layanan operasional dan pemeliharaan kantor Pusat dan Daerah
7. Indeks persepsi peserta diklat terhadap proses pembelajaran
8. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Data dan Informasi (Skala 1-5)
9. Indeks Keamanan Informasi (Skala 1-645)
10. Indeks kepuasan pemangku kepentingan atas pengembangan kerjasama internasional

11. Indeks kepuasan pemangku kepentingan atas kualitas publikasi
12. Indeks kepuasan kepada pemangku kepentingan atas pengembangan kerjasama domestik

Selanjutnya dari data realisasi nilai indeks dari 12 (dua belas) IKK terkait layanan yang merupakan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) pada Eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal dilakukan konversi ke angka indeks IKSS yaitu angka indeks skala 1-100, dengan data konversi yang dapat dilihat pada Tabel 3.5 berikut:

Tabel 3.5 Rekapitulasi Nilai Indeks terkait layanan pada Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Eselon II di Sekretariat Jenderal TA 2022

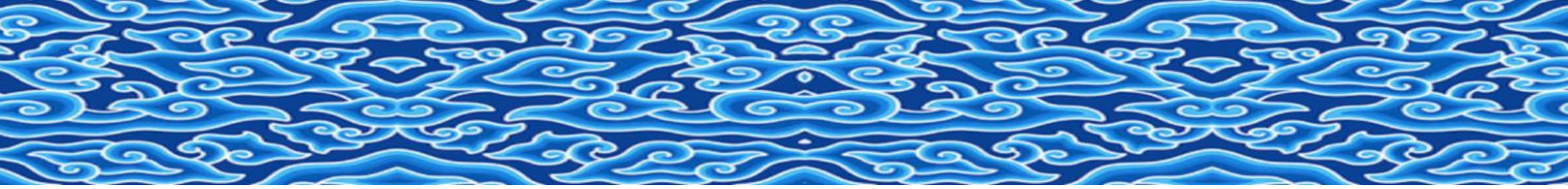
No	Sasaran Kegiatan/IKK	Satuan	Target 2022 (skala 1-7)	Realisasi 2022 (skala 1-7)	Konversi Realisasi Nilai IKK ke Nilai IKSS-2.1 (skala 1-100)
1	Indeks kepuasan layanan Bagian Sumber Daya Manusia (skala 1-7)	Indeks	4.20	5.53	75.74
2	Indeks pemahaman pegawai mengenai peraturan Sumber Daya Manusia (skala 1-7)	Indeks	4.20	5.97	83.01
3	Indeks ketepatan waktu penyusunan RKBMN (skala 1-7)	Indeks Ketepatan Waktu penyusunan RKBMN	5.00	5.00	67.00
4	Indeks kepuasan layanan umum (skala 1-7)	Indeks layanan	5.00	5.61	77.06
5	Indeks kepuasan atas layanan ketatausahaan dan operasional pimpinan (skala 1-7)	Indeks layanan	5.00	5.50	75.25
6	Indeks kepuasan layanan operasional dan pemeliharaan kantor Pusat dan Daerah (skala 1-7)	Indeks layanan	5.00	5.61	77.06
7	Indeks persepsi peserta diklat terhadap proses pembelajaran (skala 1-7)	Indeks	5.00	6.18	86.47
8	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Data dan Informasi (Skala 1-7)	Indeks	3.70	6.31	88.62

No	Sasaran Kegiatan/ IKK	Satuan	Target 2022 (skala 1-7)	Realisasi 2022 (skala 1-7)	Konversi Realisasi Nilai IKK ke Nilai IKSS-2.1 (skala 1-100)
9	Indeks Keamanan Informasi (Skala 1-645)	Indeks	260	3.59	43.73
10	Indeks kepuasan pemangku kepentingan atas pengembangan kerja sama internasional (skala 1-7)	Indeks	4.20	6.19	86.64
11	Indeks kepuasan pemangku kepentingan atas kualitas publikasi (skala 1-7)	Indeks	4.50	6.23	87.30
12	Indeks kepuasan kepada pemangku kepentingan atas pengembangan kerja sama domestik (skala 1-7)	Indeks	4.20	6.08	84.82
<b>Nilai Rata-Rata Konversi dari Nilai IKK</b>					<b>77.73</b>

Sumber: KPPU, data 2022 diolah

Pada TA 2022 merupakan tahun transisi untuk pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Strategis yaitu Indeks tingkat efektivitas pemanfaatan *e-government* menuju formula pengukuran baru yang memanfaatkan nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB). Penilaian indeks SPBE di KPPU telah dilaksanakan 2 (dua) kali yaitu tahun 2021 dengan nilai 1.18 dan pada tahun 2022 dengan nilai 1.39 yang menunjukkan peningkatan nilai indeks SPBE.

Sejalan dengan adanya perbaikan formula Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS-2.1), maka dilakukan konversi terhadap 12 (dua belas) nilai indeks data capaian IKK sebagaimana dijelaskan pada Tabel 3.5 di atas. Pada nilai indeks untuk IKK: Indeks Keamanan Informasi yang terealisasi sebesar 43.73 (konversi) belum menunjukkan angka indeks yang baik. Dari hasil IKK: Indeks Keamanan Informasi yaitu analisa hasil evaluasi akhir perhitungan Indeks Keamanan Informasi (KAMI) melalui penilaian mandiri dimana nilai Indeks KAMI menunjukkan level status: "Pemenuhan Kerangka Kerja Dasar". Untuk menaikkan poin nilai KAMI pada level status ini maka KPPU perlu menyiapkan instrumen kebijakan, prosedur, rencana program peningkatan keamanan informasi.

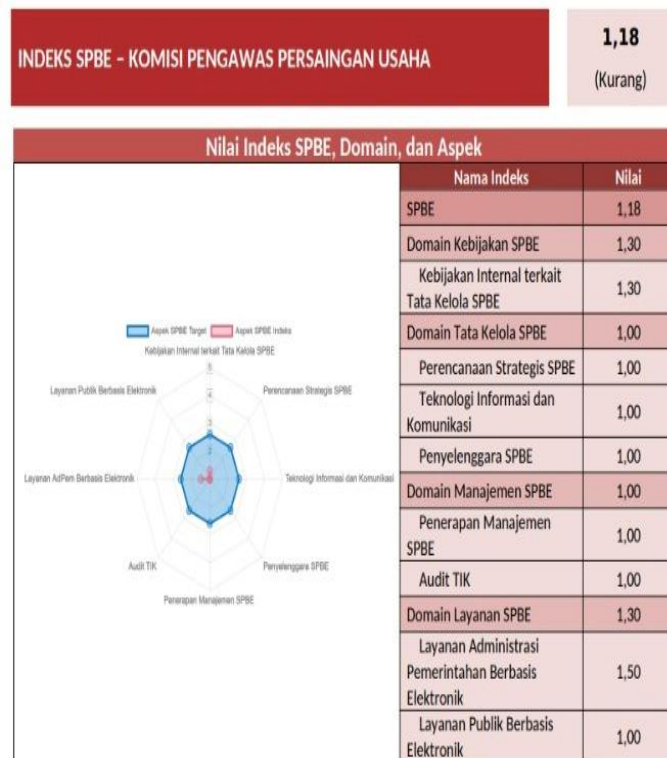
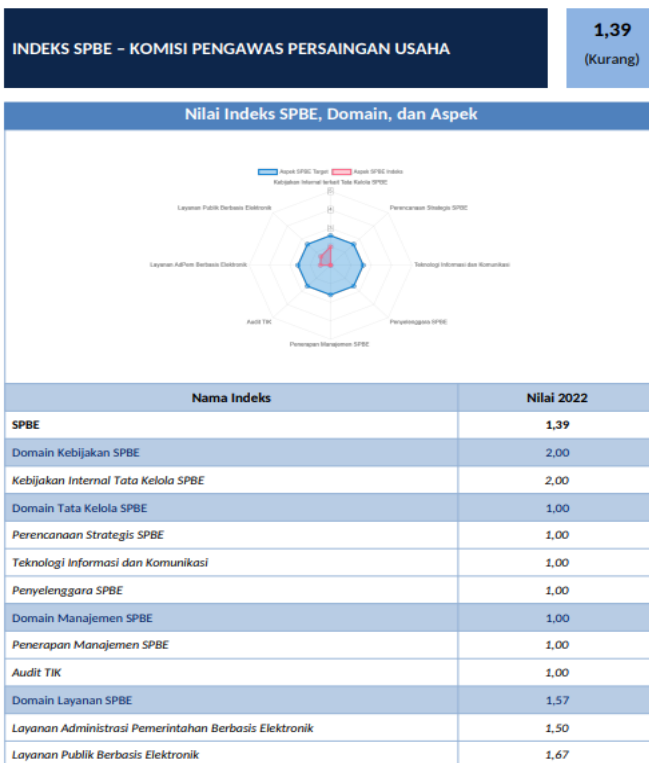


Berdasarkan tabel capaian kinerja di atas pencapaian *outcome* pada Indikator Kinerja Sasaran Strategis yaitu Indeks tingkat efektivitas pemanfaatan *e-government* pada TA 2022 masih menggunakan formula pengukuran yaitu rata-rata nilai indeks terkait layanan yang merupakan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) pada eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal. Nilai IKK terkait layanan pada Unit Kerja Eselon II di Sekretariat Jenderal terdapat 12 (dua belas) IKK dengan nilai indeks, penggunaan formula yang sama dengan TA 2021 karena untuk dapat memperoleh Indeks tingkat efektivitas pemanfaatan *e-government* TA 2022 sehingga nilai indeks yang didapatkan dapat dibandingkan dengan formula penghitungan yang sama.

Terkait kegiatan pengukuran Indeks SPBE tahun 2022 dapat terlaksana dengan baik dan lancar yang dilaksanakan oleh KemenpanRB. Pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi SPBE merupakan amanat dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang bertujuan untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 108 Tahun 2023 tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2022, disampaikan bahwa hasil penilaian KPPU pada Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah sebesar 1.39 dalam kategori kurang. Memperhatikan skala pengukuran Indeks SPBE yaitu 1-5 dengan target nasional nilai Indeks sebesar 2.6 pada tahun 2025. Hasil penilaian Indeks SPBE Komisi Pengawas Persaingan Usaha TA 2022 sebagaimana dijelaskan dalam Gambar 3.4 berikut:



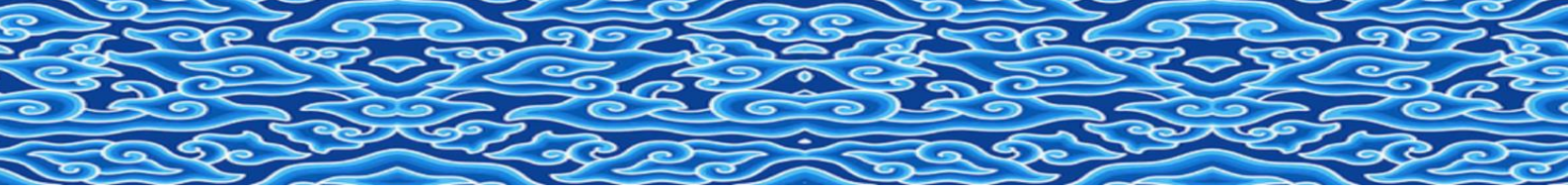


Sumber: Kemenpan dan RB, 2023

Gambar 3.4 Hasil Nilai Indeks SPBE KPPU TA 2022 dan 2021

Hasil penilaian Indeks SPBE TA 2022 di KPPU yang masih tergolong kurang tersebut, perlu perbaikan dan pemenuhan kerangka regulasi di lingkungan KPPU. Laporan Hasil Pemantauan SPBE ini diharapkan dapat digunakan dalam menentukan tindak lanjut yang harus dilakukan dalam mendorong peningkatan penerapan SPBE secara menyeluruh pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah di masa mendatang dalam rangka meningkatkan kualitas layanan pemerintah kepada masyarakat dan terwujudnya digitalisasi pemerintah dalam kerangka reformasi birokrasi nasional. Untuk KPPU dapat melakukan konsultasi dan pendampingan kepada KemenpanRB terkait upaya peningkatan nilai Indeks SPBE tersebut.

Capaian Indikator SS pada Indeks Tingkat efektivitas pemanfaatan *e-government* TA 2022 yang belum tercapai sesuai target, karena masih terdapat kendala berupa belum terdapatnya acuan/juknis/ketentuan internal di lingkungan KPPU untuk pemenuhan standar layanan publik. Standarisasi terkait layanan publik yang berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik.



Upaya perbaikan peningkatan Indikator pada Indeks Tingkat efektivitas pemanfaatan *e-government* pada tahun selanjutnya akan melakukan koordinasi tindak lanjut dengan unit kerja terkait dan Kementerian PAN-RB untuk dapat memberikan pendampingan dan konsultasi dalam upaya perbaikan dalam rangka mengefektifkan penerapan layanan publik yang berbasis *digital*.

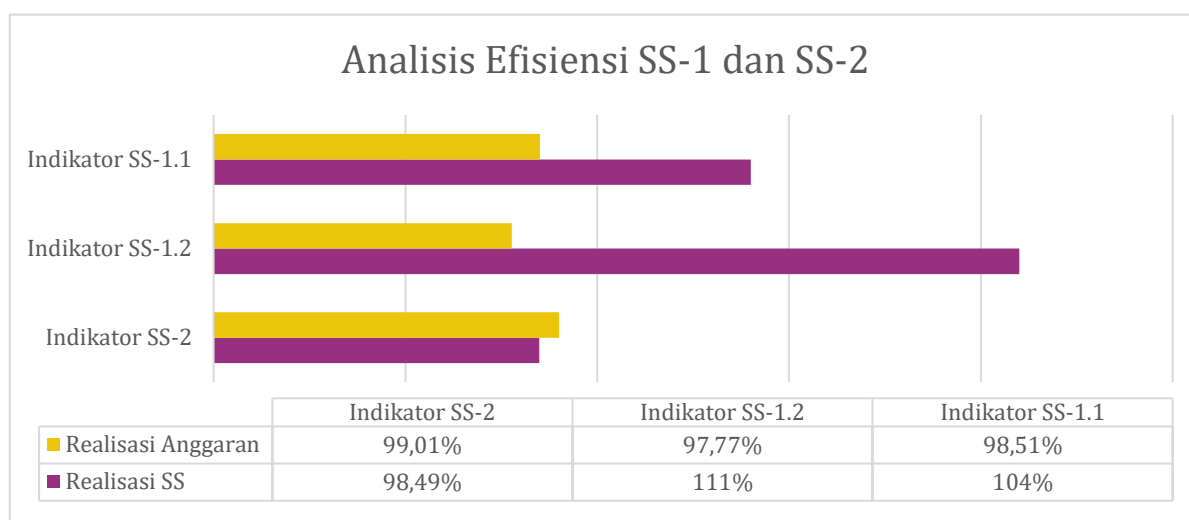
## **B. ANALISIS EFISIENSI**

Pada tahun 2022, pencapaian Sasaran Strategis KPPU untuk Program Pengawasan Persaingan Usaha TA 2022 yaitu:

1. Capaian Indikator Kinerja SS-1.1 sebesar 104%, sedangkan capaian Realisasi Anggaran adalah sebesar Rp 11.960.431.070,- dari total anggaran sebesar Rp 12.141.219.000,- (98.51%)
2. Capaian Indikator Kinerja SS-1.2 sebesar 111%, sedangkan capaian Realisasi Anggaran adalah sebesar Rp 22.132.407.508,- dari total anggaran sebesar Rp 22.637.452.000,- (97.77%)
3. Capaian Indikator Kinerja SS-2 sebesar 98.49%, sedangkan capaian Realisasi Anggaran adalah sebesar Rp 30.094.755.603,- dari total anggaran sebesar Rp 30.396.097.000,- (99.01%).

Dalam SS-2 ini, terdapat alokasi anggaran untuk Belanja Pegawai sebesar Rp 44.120.992.000,- dengan realisasi anggaran sebesar 98.98% atau sebesar Rp 43.672.673.650,-, dan untuk Belanja Operasional dan Pemeliharaan Kantor sebesar Rp 26.346.905.000,- dengan realisasi sebesar 99.27% atau sebesar Rp 26.154.354.099,-.

Berikut adalah Analisis Efisiensi untuk masing-masing Sasaran Strategis:



Sumber: KPPU, data 2022 diolah

Gambar 3.5 Grafik Analisis Efisiensi SS-1 dan SS-2

Rekapitulasi perbandingan capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis sebagaimana dijelaskan pada Tabel 3.3 berikut:

Tabel 3.6 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis TA 2021 dan 2022

No	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja SS	2021		2022	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	SS-1: Terwujudnya kepastian hukum persaingan usaha untuk menjamin iklim investasi yang sehat dengan advokasi nilai-nilai persaingan usaha	1.1. Indeks Persepsi Persaingan Usaha	4.7	4.81	4.7	4.87
		1.2. Persentase penyelesaian proses penegakan hukum persaingan usaha yang sesuai dengan peraturan berlaku	85%	100%	90%	100%
2.	SS-2: Terwujudnya kualitas layanan manajemen baik internal maupun eksternal melalui <i>e-government</i>	2.1. Indeks Tingkat efektivitas pemanfaatan <i>e-government</i>	78	76	79	77

Sumber: KPPU, data 2022 diolah

Perbandingan capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis sebagaimana dijelaskan dalam Tabel 3.6 di atas bahwa terdapat 3 (tiga) Indikator Kinerja Sasaran Strategis tahun 2021 dan tahun 2022 yang mengalami peningkatan nilai.

Pada IKSS 1.1 nilai indeks dihitung menggunakan bobot sama dan bobot PCA, hasil penelitian menunjukkan bahwa persaingan usaha secara nasional tahun 2022 termasuk ke dalam persaingan usaha menuju tinggi. Pada tahun 2022, indeks persaingan usaha dengan menggunakan dimensi keseluruhan dan bobot sama mencapai 4.87 atau meningkat dibandingkan tahun 2021 yang mencapai 4.81. Kondisi perekonomian yang terus membaik pasca pandemi Covid-19 mendorong peningkatan iklim persaingan usaha yang tercermin dari peningkatan indeks yang dihasilkan pada tahun 2022 ini.

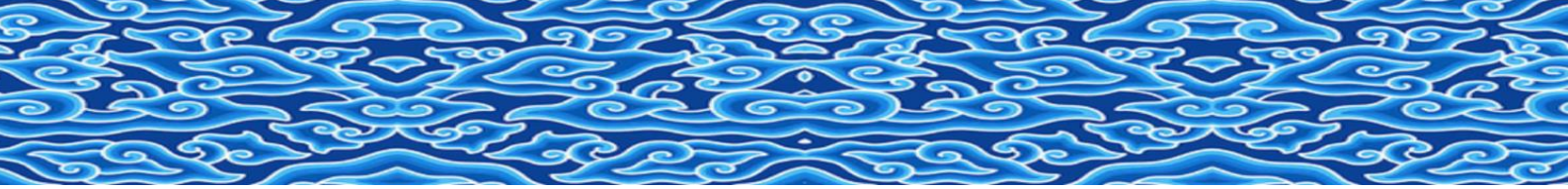
Tabel 3.7 Perbandingan Nilai Indeks Persaingan Usaha Tahun 2022 dan 2021

Dimensi	Tahun 2022		Tahun 2021	
	Skor Dimensi Keseluruhan	Skor Dimensi SCP	Skor Dimensi Keseluruhan	Skor Dimensi SCP
Struktur	4.66	4.66	4.49	4.49
Perilaku	3.96	3.96	3.73	3.73
Kinerja	4.81	4.81	4.86	4.86
Regulasi	5.69		6.30	
<i>Demand</i>	4.55		4.15	
<i>Supply</i>	5.16		5.16	
Kelembagaan	5.23		4.96	
<b>Skor Bobot Sama</b>	<b>4.87</b>	<b>4.47</b>	<b>4.81</b>	<b>4.36</b>
<b>Skor PCA</b>	<b>4.85</b>	<b>4.58</b>	<b>4.67</b>	<b>4.44</b>

Sumber: Laporan Akhir Kajian Indeks Persaingan Usaha KPPU, 2022

Perhitungan kinerja tersebut di atas didasarkan pada capaian output yang telah ditetapkan melalui Rencana Kerja (Renja/RKP) Tahunan khususnya TA 2022. Penjelasan capaian output kegiatan (dalam bentuk *matriks table*) pada Program Pengawas Persaingan Usaha TA 2022 dijelaskan pada Lampiran II pada Laporan Kinerja ini.

Capaian kinerja TA 2022 yang ditunjukkan pada capaian IKSS 1.1, IKSS 1.2 dan IKSS 2.1 mengalami kenaikan realisasi jika dibandingkan tahun 2021. Hal itu disebabkan karena adanya perbaikan kinerja, walaupun pada capaian kinerja IKSS 2.1 belum sepenuhnya 100% memenuhi target.



Selanjutnya untuk upaya-upaya penting yang telah dilakukan KPPU dalam tahun 2022 ditujukan untuk mendukung pencapaian kinerja sebagaimana dijelaskan dalam analisis efisiensi di atas. Pada pelaksanaannya terdapat penyesuaian format kegiatan terus membaik menuju masa transisi pasca pandemi Covid-19 yang mendorong peningkatan iklim persaingan usaha yang tercermin dari peningkatan indeks persepsi persaingan usaha yang dihasilkan pada tahun 2022 ini. Beberapa catatan dalam pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Pembaruan peraturan KPPU/Peraturan Ketua:

- 1) Peraturan KPPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan KPPU, disahkan pada tanggal 27 Desember 2022 dan berlaku pada tanggal diundangkan 29 Desember 2022.
- 2) Peraturan Ketua KPPU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Klasifikasi Arsip di Lingkungan KPPU, disahkan dan berlaku pada tanggal 28 Desember 2022.
- 3) Peraturan Ketua KPPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Komisi Pengawas Persaingan Usaha, disahkan dan berlaku pada tanggal 28 Desember 2022.
- 4) Peraturan Ketua KPPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penentuan Pasar Bersangkutan, disahkan dan berlaku pada tanggal 28 Desember 2022.
- 5) Peraturan KPPU Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pencabutan Peraturan KPPU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerapan Pasal 1 angka 10 tentang Pasar Bersangkutan, disahkan dan berlaku pada tanggal 28 Desember 2022.

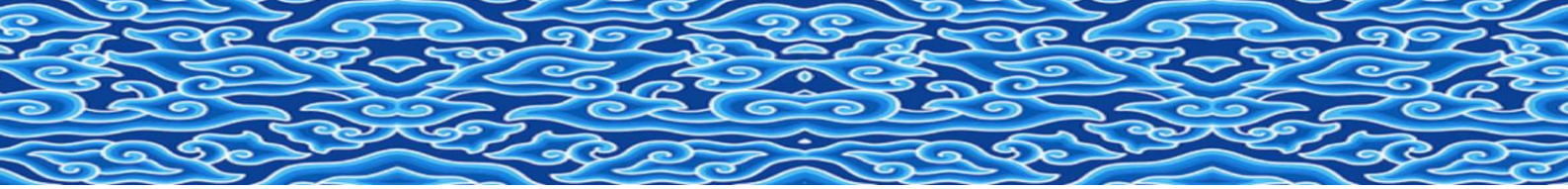
2. Pemberlakuan *work from home* berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019.

3. Penyesuaian terhadap dokumentasi dan informasi hukum dalam sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH).

4. Penyusunan Peraturan Presiden terkait Kelembagaan KPPU.

5. Pendaftaran data pegawai pada *website* Badan Kepegawaian Negara sebagai upaya pemenuhan kejelasan status pegawai KPPU melalui *daftar-pendataan-nonasn.bkn.go.id*

Upaya tersebut di atas adalah bagian dari akuntabilitas kinerja sehingga capaian kinerja tahun 2022 dapat diselesaikan dengan baik yaitu Indeks Persepsi Persaingan Usaha sebagai Indikator Kinerja Utama KPPU dengan hasil indeks sebesar 4.87. Pada tahun 2022 KPPU juga menerima penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk kesepuluh



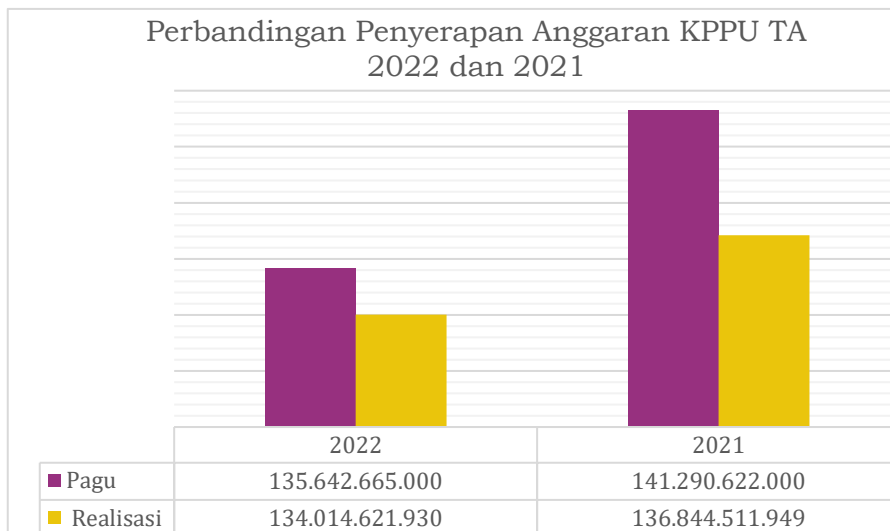
kalinya secara berturut-turut atas Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan KPPU dari tahun 2012 sampai dengan 2022.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja di tahun 2022, KPPU akan:

1. Melakukan penyiapan dasar hukum dan perbaikan dasar yang ada di KPPU dalam rangkaantisipasi dampak pemberlakuan UU Cipta Kerja dan peraturan turunannya.
2. Melakukan penyesuaian dan pemberlakuan tata cara yang baru untuk penanganan tindak lanjut dari laporan masyarakat sehingga dapat tertangani dengan baik.
3. Melakukan penambahan ketentuan pelaksanaan anggaran yang sesuai dengan kondisi KPPU sebagai Lembaga Non Struktural (LNS).
4. Melakukan pencapaian output secara efisien dengan menyusun kembali alur koordinasi lintas kementerian/instansi/lembaga
5. Melakukan komunikasi dan koordinasi lintas instansi yang lebih intensif untuk mencari solusi dalam hal pelaksanaan program/kegiatan yang bersifat lintas Kementerian/Lembaga.
6. Melakukan penataan manajemen SDM di KPPU Pusat maupun di Kantor Wilayah dalam rangka persiapan proses alih status pegawai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### **C. AKUNTABILITAS KEUANGAN**

Realisasi anggaran pada 2 (dua) program, yaitu Program Pengawasan Persaingan Usaha dan Program Dukungan Manajemen pada TA 2022 sebesar Rp 134.014.621.930,- atau mencapai 98.80% dari total pagu sebesar Rp 135.642.665.000,-. Persentase realisasi ini meningkat di tahun sebelumnya, yaitu tahun 2021 realisasi anggaran mencapai 96.85% dengan realisasi anggaran sebesar Rp 136.844.511.949,- dari total pagu sebesar Rp 141.290.622.000,-. Realisasi penyerapan terhadap pagu dalam periode tahun 2022 dan 2021 sebagaimana terlihat dalam Grafik berikut.



Sumber: KPPU, data 2022 diolah

Gambar 3.6 Grafik Perbandingan Penyerapan Anggaran KPPU TA 2022 dan TA 2021

Alokasi anggaran KPPU TA 2022 untuk melaksanakan SS-1 sebesar Rp 34.778.671.000,- atau 53.36% dari total anggaran KPPU non-operasional (belanja operasional dan belanja pegawai). Kegiatan-kegiatan yang dilakukan KPPU dalam lingkup SS-1 adalah kegiatan utama (*core*) yang juga memerlukan Sumber Daya Manusia dengan kualifikasi yang telah ditentukan oleh Peraturan Komisi. Sedangkan kondisi struktur anggaran selain untuk melaksanakan SS-1, juga ada SS-2 yang masuk kedalam anggaran *supporting* yang pada tahun 2022 adalah sebesar 46.64% atau Rp 30.396.097.000,- dari total anggaran KPPU non-operasional (belanja operasional dan belanja pegawai). Perbandingan alokasi anggaran di *Core* dan *Supporting* TA 2022 dapat dilihat pada Lampiran III.

Tabel 3.8 Rekapitulasi Realisasi Anggaran berdasarkan Sasaran Strategis TA 2022

Sasaran Strategis/Program		Pagu Akhir (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
1	<b>Program Pengawasan Persaingan Usaha</b>			
	SS-1: Terwujudnya kepastian hukum persaingan usaha untuk menjamin iklim investasi yang sehat dengan advokasi nilai-nilai persaingan usaha	34.778.671.000	34.092.838.578	98.03%
2	<b>Program Dukungan Manajemen</b>			

Sasaran Strategis/Program		Pagu Akhir (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
SS-2:	Terwujudnya kualitas layanan manajemen baik internal maupun eksternal melalui <i>e-government</i>	30.396.097.000	30.094.755.603	99.01%
Belanja Operasional				
	Belanja Pegawai	44.120.992.000,-	43.672.673.650	98.98%
	Belanja Operasional dan Pemeliharaan Kantor	26.346.905.000,-	26.154.354.099	99.27 %
<b>Total</b>		<b>135.642.665.000,-</b>	<b>134.014.621.930</b>	<b>98.80%</b>

Sumber: KPPU, data 2022 diolah



BAB IV

# PENUTUP

LAPORAN KINERJA KPPU TAHUN 2022



## **BAB IV PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN KINERJA TAHUNAN**

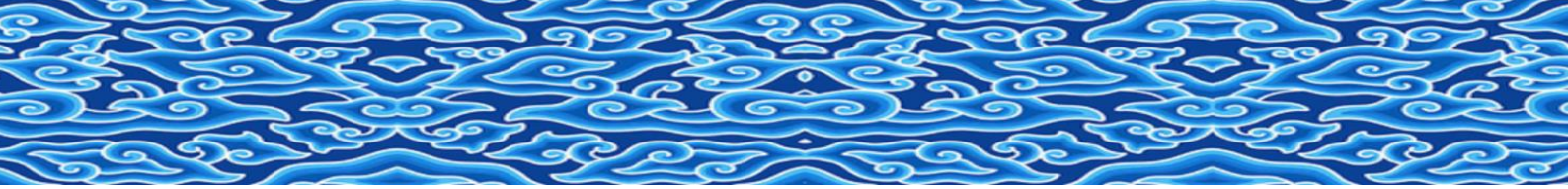
Kinerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) adalah hasil kerja bersama unit kerja baik dari unit teknis maupun unit pendukung. Seluruh proses dan kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2022 adalah untuk memenuhi target kinerja pada Indikator Kinerja RPJMN 2020 – 2024 yaitu angka pada Indeks Persepsi Persaingan Usaha. Kinerja tersebut merupakan kontribusi dukungan KPPU pada RPJMN 2020-2024 pada (PN-1) yaitu Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan.

Penyusunan Laporan Kinerja KPPU Tahun 2022 mencantumkan data dan fakta keberhasilan capaian target kinerja KPPU, tantangan yang dihadapi serta kendala dalam mencapai Sasaran Strategis KPPU Tahun 2022. Peningkatan kinerja dibandingkan tahun sebelumnya, diukur melalui capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator tersebut telah ditetapkan pada awal tahun 2020 dan akan berlaku sampai dengan akhir tahun 2024.

Capaian kinerja KPPU tahun 2022 pada masing-masing Indikator Kinerja khususnya SS-1 sesuai dengan target yang ditentukan, namun pada SS-2 terdapat kendala dalam memenuhi target yang ditentukan. Data capaian menunjukkan bahwa pada SS-1.1 dan SS-1.2 terlampaui capaiannya lebih dari 100%, sedangkan jika dilihat dari capaian realisasi anggaran untuk SS-1.1 dan SS-1.2 masing-masing adalah 98,51% dan 97,77%, dan pada SS-2 capaiannya baru mencapai sebesar 98.49% dengan realisasi anggaran yang efisien yaitu 99,01%.

Prinsip efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh KPPU diimplementasikan dengan melakukan optimalisasi anggaran dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Pada laporan, juga dicantumkan beberapa capaian kinerja melampaui target, hal tersebut terjadi karena terdapat perluasan tugas dan fungsi KPPU sesuai dengan PP Nomor 44 tahun 2021 dan PP Nomor 7 tahun 2021 yang merupakan turunan dari UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020.

Tahun 2022 adalah tahun perbaikan ekonomi menuju transisi pasca pandemi Covid-19 yang menjadikan strategi KPPU terutama dalam pengawas persaingan usaha harus bergerak dinamis memenuhi target yang telah ditentukan. Sepanjang tahun 2022 terdapat penambahan alokasi anggaran berdasarkan evaluasi kinerja yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Pada kondisi penambahan tersebut, KPPU harus



mengoptimalkan pencapaian target output dalam kondisi penyesuaian pada kenaikan tarif dan pajak pertambahan nilai.

## **B. RENCANA TINDAK TAHUN BERIKUTNYA**

Pada tahun 2022, KPPU telah melakukan langkah awal untuk pemenuhan target Rencana Strategis KPPU 2020 – 2024 dengan tantangan dan kendala dalam upaya pencapaian target baik untuk penegakan hukum maupun untuk advokasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat. Hal ini memperkuat peran KPPU dalam konteks kontribusi KPPU pada Prioritas Nasional, terutama pada Prioritas Nasional (PN) kesatu yaitu Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan.

Saat ini, KPPU sangat mengapresiasi kebijakan – kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah yang sangat pro persaingan sehat. Hal tersebut tercermin dalam angka Indeks Persepsi Persaingan Usaha yang masuk dalam kategori Cukup Tinggi. Mencermati hal tersebut, maka KPPU akan memfokuskan pada penguatan nilai – nilai persaingan usaha yang sehat untuk berbagai sektor strategis di Indonesia. Langkah – langkah strategis yang akan dilaksanakan diantaranya dengan:

1. Peningkatan kemudahan akses agar alur koordinasi lintas kementerian/instansi/lembaga semakin efektif.
2. Penguatan kapasitas sumber daya manusia dengan melanjutkan proses alih status yang diawali dengan penataan manajemen SDM di KPPU Pusat maupun di Kantor Wilayah.
3. Pemanfaatan publikasi yang lebih strategis dan tersegmentasi dengan baik dan telah diformalkan dalam bentuk Jaringan Dokumentasi Ilmu Hukum (JDIH).
4. Evaluasi bersama hasil kinerja KPPU yang ditindaklanjuti bersama antara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dan Kementerian Keuangan sehingga menjadi catatan perbaikan untuk tahun – tahun mendatang.

# KINERJA KPPU 2022



4,87

## INDEKS PERSAINGAN USAHA

Gambaran komprehensif tingkat persaingan usaha di 34 Propinsi di Indonesia

## PERSENTASE PENEGAKAN HUKUM

Penyelesaian proses penegakan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku

100

98,8

## REALISASI ANGGARAN

Persentase realisasi anggaran dari Pagu Anggaran sebesar 135 Milyar Rupiah

## OPINI WTP BPK

Capaian 10x tanpa jeda untuk opini terhadap Laporan Keuangan KPPU

10



1. Perjanjian Kinerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha TA 2022



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Afif Hasbullah

Jabatan : Ketua KPPU

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya, sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, November 2022  
Komisi Pengawas Persaingan Usaha  
Ketua

  
M. Afif Hasbullah

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

<b>Sasaran Strategis (SS) #1/2</b> <b>Terwujudnya kepastian hukum persaingan usaha untuk menjamin iklim investasi yang sehat dengan advokasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat, penegakan hukum persaingan usaha dan pengawasan pelaksanaan kemitraan yang sehat</b>		
No	Indikator Kinerja SS	Target 2022
1	Tingkat persaingan usaha yang sehat sesuai dengan prinsip-prinsip UU Nomor 5 Tahun 1999 (Indeks Persepsi Persaingan Usaha)	4.7 skala 1-7
2	Prosentase penyelesaian proses penegakan hukum persaingan usaha yang sesuai dengan peraturan yang berlaku	90%
<b>Sasaran Strategis (SS) #2/2</b> <b>Terwujudnya kualitas layanan manajemen baik internal maupun eksternal melalui e-government</b>		
1	Indeks tingkat efektifitas pemanfaatan e-government (percepatan dan kemudahan pelayanan, transparansi pelayanan, kepastian waktu dan keamanan data)	79 skala 1-100

**Program**

108.EG. Program Pengawasan Persaingan Usaha  
108.WA. Program Dukungan Manajemen

**Anggaran**

Rp 34.778.671.000,-  
Rp 100.863.994.000,-

Jakarta, November 2022  
Komisi Pengawas Persaingan Usaha  
Ketua

  
M. Afif Hasbullah

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

PENYESUAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM UNTUK PENDETAILAN KINERJA ESELON I

Indikator Kinerja Program Eselon I TA 2021 (Surat Keputusan Deputi Kajian dan Advokasi Nomor 25/DKA/Kep/III/2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Deputi Bidang Kajian dan Advokasi Komisi Pengawas Persaingan Usaha)					Indikator Kinerja Program Eselon I TA 2022 (Pendetailan)				
Unit Kerja Eselon I	Indikator Kinerja Program	Target			Unit Kerja Eselon I	Indikator Kinerja Program	Target		
		2022	2023	2024			2022	2023	2024
Program Pengawasan Persaingan Usaha					Program Pengawasan Persaingan Usaha				
Kedeputian Bidang Kajian dan Advokasi	1. Indeks kepatuhan pelaku usaha terhadap nilai-nilai persaingan sesuai UU Nomor 5/1999 (Skala 1-7)	4.2	-	-	Kedeputian Bidang Kajian dan Advokasi	1. Indeks Kelembagaan* * Pendetailan Indeks persaingan usaha pada tingkat Eselon 1	4,5 Skala 1 -7	4,7 Skala 1 -7	4,85 Skala 1 -7
	2. Indeks kepatuhan pelaku usaha didalam menjalankan kemitraan sesuai UU Nomor 20 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2013 (Skala 1-7)	4.2	-	-					

Indikator Kinerja Program Eselon I TA 2021 (Surat Keputusan Deputi Kajian dan Advokasi Nomor 25/DKA/Kep/III/2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Deputi Bidang Kajian dan Advokasi Komisi Pengawas Persaingan Usaha)					Indikator Kinerja Program Eselon I TA 2022 (Pendetailan)				
Unit Kerja Eselon I	Indikator Kinerja Program	Target			Unit Kerja Eselon I	Indikator Kinerja Program	Target		
		2022	2023	2024			2022	2023	2024
						2. Indeks Regulasi*	5,7 Skala 1 -7	5,85 Skala 1 -7	6 Skala 1 -7
						* Pendetailan Indeks persaingan usaha pada tingkat Eselon 1			
						3. Indeks Struktur, Perilaku dan Kinerja	4,2 Skala 1 -7	4,4 Skala 1 -7	4,55 Skala 1 -7
						*Pendetailan Indeks persaingan usaha pada tingkat Eselon 1			

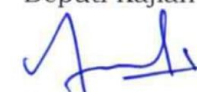
**Program**

108.EG. Program Pengawasan Persaingan Usaha

**Anggaran**

Rp 7.113.508.000,-

Jakarta, November 2022  
Deputi Kajian dan Advokasi



Taufik Ariyanto



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

<b>Program: Pengawasan Persaingan Usaha</b>		
<b>Sasaran Program #2/2 : Terwujudnya kepastian penegakan hukum persaingan usaha</b>		
<b>No.</b>	<b>Indikator Kinerja Program</b>	<b>Target 2022</b>
1	Prosentase jumlah klarifikasi laporan dan laporan hasil penelitian yang ditindaklanjuti ke tahap penyelidikan	23%
2	Persentase penilaian merger yang ditindaklanjuti pelaku usaha	100%
3	Prosentase kepatuhan pelaku usaha terhadap rekomendasi yang disampaikan melalui surat peringatan I, II dan III terkait dugaan pelanggaran pelaksanaan kemitraan	80%
4	Prosentase banding/Kasasi di Pengadilan Negeri/Mahkamah Agung yang ditindaklanjuti	85%
5	Presentase terbuktinya dugaan pelanggaran pada putusan KPPU	90%
6	Indeks Layanan Kepaniteraan (skala 1-7)	3.5 skala 1-7

**Program**

108.EG. Program Pengawasan Persaingan Usaha

**Anggaran**

Rp 20.765.563.000,-

Jakarta, November 2022  
Deputi Penegakan Hukum



Setyabudi Yulianto

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

<b>Program:</b>		
<b>Dukungan Manajemen</b>		
<b>Sasaran Program #1/2 : Penguatan Sumber Daya Manusia KPPU</b>		
<b>No.</b>	<b>Indikator Kinerja Program</b>	<b>Target 2022</b>
1	Indeks Kompetensi dan Integritas KPPU (skala 1-100)	64 Skala 1-100
2	Persentase lulusan diklat persaingan usaha berbasis kompetensi dengan nilai Baik	85%
3	Rasio penerapan tata kelola majemen perubahan SDM berbasis e-government (dari 5 target)*  *tahun berikutnya merupakan akumulasi dari implementasi sistem SDM berbasis e-government dengan target setiap tahun 1 sistem diimplementasikan , sehingga dalam 5 (lima) tahun Periode Renstra ada 5 (lima) sistem SDM berbasis e-government diimplementasikan	3 sistem
<b>Sasaran Program #2/2 : Terwujudnya Kapasitas dan Kapabilitas Kinerja Birokrasi</b>		
<b>No.</b>	<b>Indikator Kinerja Program</b>	<b>Target 2022</b>
1	Persentase peningkatan penyiapan instrument reformasi birokrasi	85%
2	Indeks layanan umum operasional teknis internal (skala 1-7)	5.0 skala 1-7
3	Indeks layanan ketatausahaan dan operasional pimpinan (skala 1- 7)	5.0 skala 57
4	Indeks Keamanan Informasi (skala 1-645)	260 (skala 1-645)
5	Indeks kepuasan pemangku kepentingan atas layanan kehumasan dan pengembangan kerjasama (skala 1-7)	4.2 skala 1- 7
6	Indeks Layanan Hukum (skala 1-7)	4.2 skala 1- 7
7	Tingkat Maturitas SPIP (skala 1-5)	Level 3 skala 1-5
8	Opini BPK atas laporan keuangan KPPU	WTP

**Program**

108.WA. Dukungan Manajemen

**Kegiatan**

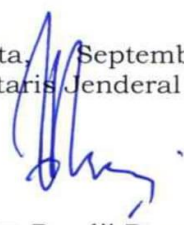
3955. Pengawasan Persaingan Usaha di Wilayah Kerja Kantor Wilayah KPPU

**Anggaran**

Rp 100.863.994.000,-

Rp 6.899.600.000,-

Jakarta, 15 September 2022  
Sekretaris Jenderal

  
Charles Pandji Dewanto

## 2. Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 22/KPPU/Kep.1/VI/2020 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Komisi Pengawas Persaingan Usaha Tahun 2020-2024



### Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia

KEPUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA  
NOMOR 22 /KPPU/Kep.1/VI/2020

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA TAHUN 2020-2024

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA,

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pengawas Persaingan Usaha Tahun 2020-2024 dan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Komisi Pengawas Persaingan Usaha Tahun 2020-2024;

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 81/P Tahun 2018 tentang Pemberhentian Dengan Hormat dan Pengangkatan Keanggotaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
8. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
9. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pengawas Persaingan Usaha Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 602);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA TAHUN 2020-2024.
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Komisi Pengawas Persaingan Usaha Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha ini.
- KEDUA : Menetapkan Indikator Kinerja Program pada unit kerja setingkat Eselon I di lingkungan Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha ini.
- KETIGA : Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Juni 2020  
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA



LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA  
 NOMOR 21 /KPPU/Kep.1/VI/2020  
 TENTANG  
 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
 KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA  
 TAHUN 2020-2024

INDIKATOR KINERJA UTAMA  
 KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA  
 TAHUN 2020-2024

<b>Sasaran Strategis (SS) #1/2</b> Terwujudnya kepastian penegakan hukum persaingan usaha dan efektivitas advokasi kebijakan persaingan untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dalam upaya mendukung pertumbuhan investasi	
1	Tingkat persaingan usaha yang sehat sesuai dengan prinsip-prinsip UU Nomor 5 Tahun 1999 (Indeks Persepsi Persaingan Usaha)
2	Persentase penyelesaian proses penegakan hukum persaingan usaha yang sesuai dengan peraturan berlaku
<b>Sasaran Strategis (SS) #2/2</b> Terwujudnya tata kelola kelembagaan KPPU melalui <i>e-government</i>	
1	Indeks Tingkat efektivitas pemanfaatan <i>e-government</i> (Percepatan dan kemudahan pelayanan, transparansi pelayanan, kepastian waktu dan keamanan data)

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA



PENJELASAN TARGET  
 INDIKATOR KINERJA UTAMA  
 KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA  
 TAHUN 2020-2024

Sasaran Strategis (SS) #1/2 Terwujudnya kepastian penegakan hukum persaingan usaha dan efektivitas advokasi kebijakan persaingan untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dalam upaya mendukung pertumbuhan investasi		Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Tingkat persaingan usaha yang sehat sesuai dengan prinsip-prinsip UU Nomor 5 Tahun 1999 (Indeks Persepsi Persaingan Usaha, skala 1 - 7)	4,5	4,7	4,7	4,9	5,0
2	Persentase penyelesaian proses penegakan hukum persaingan usaha yang sesuai dengan peraturan berlaku	80%	85%	90%	95%	100%
<b>Sasaran Strategis (SS) #2/2</b> Terwujudnya tata kelola kelembagaan KPPU melalui <i>e-government</i>						
1	Indeks Tingkat efektivitas pemanfaatan <i>e-government</i> (Percepatan dan kemudahan pelayanan, transparansi pelayanan, kepastian waktu dan keamanan data, skala 1 - 100)	75	78	79	80	90

LAMPIRAN II

**1. Rekapitulasi Capaian Target Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) KPPU TA 2022 (Sasaran Strategis)**

No	Sasaran Strategis (SS)/ Indikator Kinerja SS	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Notifikasi
1.	Terwujudnya kepastian hukum persaingan usaha untuk menjamin iklim investasi yang sehat dengan advokasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat, penegakan hukum persaingan usaha dan pengawasan pelaksanaan kemitraan yang sehat					
1.1	Tingkat persaingan usaha yang sehat sesuai dengan prinsip-prinsip UU Nomor 5 Tahun 1999 (Indeks Persepsi Persaingan Usaha, skala 1 - 7)	Indeks	4.7	4.87	104%	●
2.2	Persentase penyelesaian proses penegakan Hukum persaingan usaha yang sesuai dengan peraturan berlaku	Persentase	90%	100%	111%	●
2.	Terwujudnya tata kelola kelembagaan KPPU melalui <i>e-government</i> dalam rangka peningkatan kualitas layanan manajemen baik internal maupun eksternal					
2.1	Indeks Tingkat efektivitas pemanfaatan <i>e-government</i> (Percepatan dan kemudahan pelayanan, transparansi pelayanan, kepastian waktu dan keamanan data, skala 1 - 100)	Indeks	79	77.81	98.49%	●

Keterangan: ● = mencapai/ melampaui target; ● = belum mencapai target

**2. Penjelasan Indeks Persaingan Usaha TA 2022 Kerangka Dasar Penyusunan Indeks Persaingan Usaha**

**Kerangka dasar penyusunan Indeks Persaingan Usaha**

Konsep atau paradigma yang digunakan sebagai kerangka dasar penyusunan indeks persaingan usaha adalah paradigma struktur, perilaku dan kinerja (SCP) industri. Faktor lingkungan bisnis seperti peraturan, kelembagaan, faktor permintaan dan penawaran juga menjadi dimensi pembentuk indeks persaingan usaha. Dimensi struktur menggunakan 5 indikator yang terdiri dari jumlah perusahaan, hambatan keluar/masuk industri, konsentrasi industri, biaya usaha dan diferensiasi produk.

Dimensi perilaku memiliki indikator yang terdiri dari harga dan iklan. Dimensi kinerja memiliki indikator yang terdiri dari efisiensi produksi dan distribusi, pengembangan teknologi, profitabilitas dan produktivitas. Dimensi permintaan memiliki indikator yang terdiri dari elastisitas harga permintaan, barang substitusi dan pertumbuhan pasar. Dimensi penawaran memiliki indikator yang terdiri dari jaminan ketersediaan pasokan dan input. Dimensi regulasi memiliki indikator kebijakan daerah terkait dengan persaingan usaha yang berkaitan dengan menghambat persaingan usaha dan Laporan Kinerja KPPU TA 2021 52 memfasilitasi monopoli. Dimensi kelembagaan terdiri dari pemahaman terhadap adanya kebijakan persaingan usaha, kesadaran terhadap adanya KPPU dan pengarusutamaan kebijakan persaingan usaha.

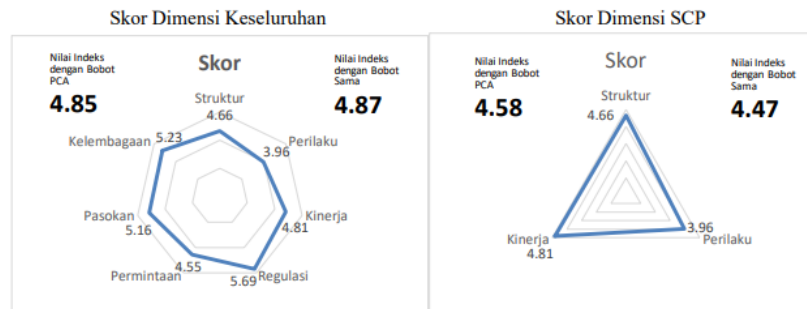
Penelitian ini melakukan survei terhadap 34 provinsi dengan responden Kadin, Akademisi, Bank Indonesia dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi. Perhitungan indeks persaingan usaha dilakukan dengan menggunakan rata-rata skor dengan pembobotan sama untuk seluruh indikator atau pembobotan menggunakan *principal component analysis*. Metode yang digunakan untuk penjumlahan skor dari setiap dimensi indeks persaingan usaha dilakukan dengan menggunakan metode *Additive Aggregation Method (AAM)*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persaingan usaha secara nasional termasuk ke dalam persaingan usaha menuju tinggi. Terdapat kenaikan skor indeks persaingan usaha pada tahun 2022 dibandingkan tahun 2021 baik menggunakan bobot sama maupun bobot PCA. Kenaikan indeks persaingan usaha pada tahun 2022 melanjutkan kenaikan pada tahun 2021 dimana hal ini diduga karena Pandemi Covid-19 diduga tidak lagi berpengaruh secara signifikan dan perekonomian kembali normal. Dimensi kinerja dan perilaku tersebut memiliki kontribusi sekitar 25 persen terhadap variasi skor indeks persaingan usaha dengan menggunakan bobot PCA dan bobot sama.

Tabel 1  
Perbandingan Skor Indeks Persaingan Usaha Tahun 2021 dan 2022

Dimensi	Tahun 2022		Tahun 2021	
	Skor Dimensi Keseluruhan	Skor Dimensi SCP	Skor Dimensi Keseluruhan	Skor Dimensi SCP
Struktur	4.66	4.66	4.49	4.49
Perilaku	3.96	3.96	3.73	3.73
Kinerja	4.81	4.81	4.86	4.86
Regulasi	5.69		6.30	
<i>Demand</i>	4.55		4.15	
<i>Supply</i>	5.16		5.16	
Kelembagaan	5.23		4.96	
<b>Skor Bobot Sama</b>	<b>4.87</b>	<b>4.47</b>	<b>4.81</b>	<b>4.36</b>
<b>Skor PCA</b>	<b>4.85</b>	<b>4.58</b>	<b>4.67</b>	<b>4.44</b>

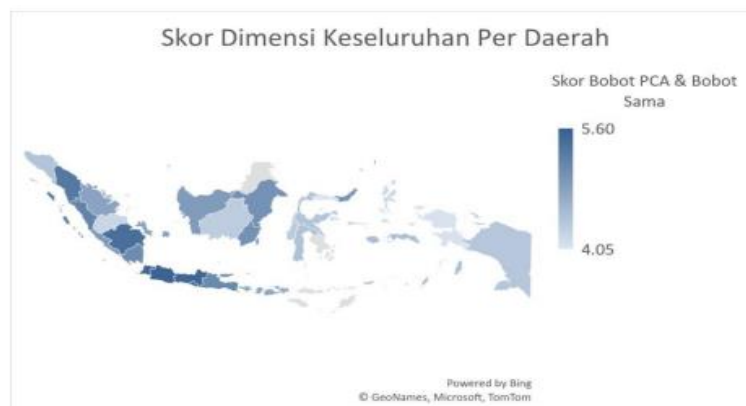
Pada Tabel 1 menunjukkan indeks persaingan usaha nasional berdasarkan dimensi keseluruhan mengalami kenaikan pada hampir seluruh indikator dan dimensi menggunakan bobot sama maupun bobot PCA pada tahun 2022. Dari hasil tersebut terlihat bahwa indeks persaingan usaha berada di rentang 4.36-4.44 berdasarkan dimensi SCP maupun dimensi keseluruhan baik menggunakan bobot PCA maupun bobot yang sama. Hasil ini menunjukkan bahwa kondisi ekonomi sudah mulai kembali kepada normal kecuali pada aspek perilaku.



Gambar 1 Indeks Persaingan Usaha Nasional

Gambar 1 menunjukkan perbandingan skor indeks persaingan usaha baik menggunakan dimensi keseluruhan maupun dimensi SCP. Dengan menggunakan dimensi keseluruhan dan bobot sama, skor indeks persaingan usaha mengalami kenaikan dari sebesar 4.81 pada tahun 2021 menjadi 4.87 pada tahun 2022. Kemudian, dengan menggunakan dimensi SCP dan bobot sama, skor indeks persaingan usaha mengalami kenaikan dari sebesar 4.36 pada tahun 2021 menjadi sebesar 4.47 pada tahun 2022. Kemudian indeks persaingan usaha berdasarkan dimensi keseluruhan dan bobot PCA mengalami kenaikan dari sebesar 4.67 pada tahun 2021 menjadi 4.85 pada tahun 2022. Selanjutnya, dengan menggunakan dimensi SCP dan bobot PCA, skor indeks persaingan usaha mengalami kenaikan dari sebesar 4.44 pada tahun 2021 menjadi 4.58 pada tahun 2022. Dari hasil tersebut terlihat bahwa secara umum indeks persaingan usaha mengalami kenaikan baik menggunakan indikator SCP maupun indikator keseluruhan.

### **Indeks Persaingan Usaha Daerah dan Sektoral**




Gambar 2 Peta Persaingan Usaha di Provinsi di Indonesia

Gambar 2 menunjukkan hasil indeks persaingan usaha berdasarkan provinsi menurut persepsi para pemangku kepentingan (*stakeholder*) di masing-masing provinsi yang meliputi Dinas Perindustrian Perdagangan, Bank Indonesia, KADIN, akademisi daerah setempat. Dari hasil skor indeks persaingan usaha menggunakan seluruh dimensi baik menjumlahkan dengan bobot sama atau bobot PCA, diperoleh beberapa kesimpulan, sebagai berikut:

- Persaingan Sangat Tinggi (Skor Indeks 6.51-7.00)  
Tidak terdapat provinsi yang memiliki skor indeks persaingan usaha yang terkategori dalam persaingan sangat tinggi.
- Persaingan Cukup Tinggi (Skor Indeks 5.51-6.50)





Terdapat 3 provinsi dengan persaingan cukup tinggi dengan menggunakan bobot sama dan bobot PCA meliputi DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Barat.

- Persaingan Sedikit Tinggi (Skor Indeks 4.51-5.50)

Terdapat 20 provinsi yang masuk dalam kategori persaingan yang sedikit tinggi meliputi DKI Jakarta, D.I. Yogyakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Sumatera Selatan, 24 Sulawesi Tenggara, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Jawa Timur, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Selatan, Lampung, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Bengkulu, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Nusa Tenggara Barat, Bali, Kalimantan Utara, dan Riau

- Persaingan Moderat (Skor Indeks 3.51-4.50)

Terdapat sekitar 11 provinsi yang masuk dalam kategori persaingan yang moderat meliputi Sulawesi Selatan, Maluku, Aceh, Sulawesi Tengah, Papua, Sulawesi Barat, Kalimantan Tengah, Jambi, Maluku Utara, Gorontalo dan Papua Barat.

- Persaingan Sedikit Rendah (Skor Indeks 2.51-3.50)

Tidak terdapat provinsi dengan skor indeks persaingan usaha yang terkategori dalam persaingan sedikit rendah

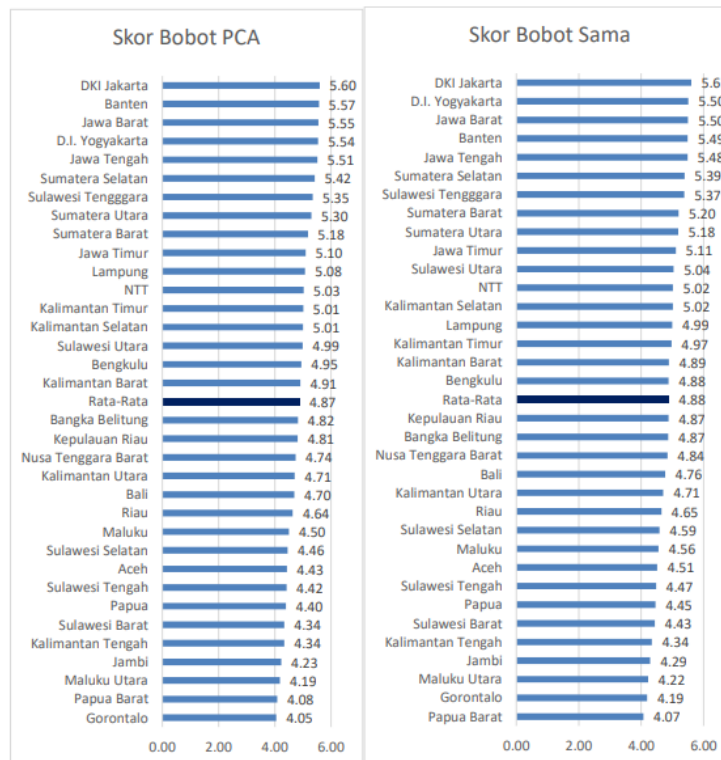
- Persaingan Cukup Rendah (Skor Indeks 1.51-2.50)

Tidak terdapat provinsi yang memiliki skor indeks persaingan usaha yang terkategori dalam persaingan cukup rendah.

- Persaingan Sangat Rendah (Skor Indeks 0.00-1.50)

Tidak terdapat provinsi yang memiliki skor indeks persaingan usaha yang terkategori dalam persaingan sangat rendah.

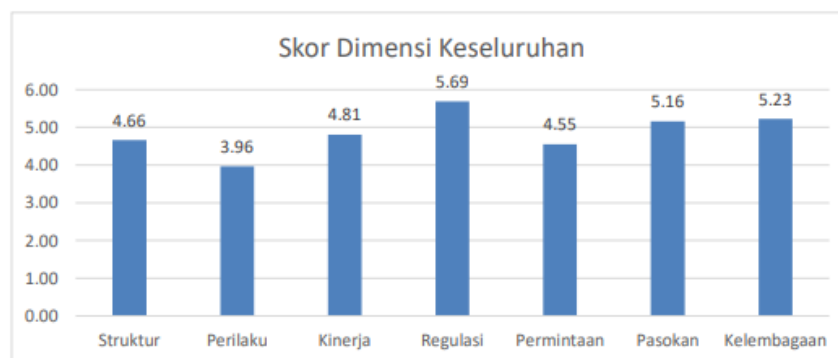
Skor indeks persaingan usaha menggunakan seluruh dimensi dan bobot PCA memberikan kesimpulan yang sama meliputi Provinsi DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Barat sebagai 3 provinsi dengan skor persaingan usaha tertinggi seluruh dimensi, baik menggunakan bobot PCA maupun bobot sama. Kemudian, dari Grafik 1 dapat diketahui bahwa skor indeks persaingan usaha menggunakan seluruh dimensi dan bobot PCA menghasilkan 17 provinsi yang berada di atas skor rata-rata dan 17 provinsi yang berada di bawah skor rata-rata. Provinsi yang memiliki skor di atas rata-rata meliputi Provinsi DKI Jakarta, D.I Yogyakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Sumatera Selatan, Sulawesi Tenggara, Sumatera Barat, Jawa Timur, Sulawesi Utara, NTT, Kalimantan Selatan, Lampung, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, dan Bengkulu. Sedangkan, provinsi yang berada di bawah skor rata-rata meliputi Provinsi Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Nusa Tenggara Barat, Bali, Kalimantan Utara, Riau, Sulawesi Selatan, Maluku, Aceh, Sulawesi Tengah, Papua, Sulawesi Barat, Kalimantan Tengah, Jambi, Maluku Utara, Gorontalo dan Papua Barat.



Grafik 1 Indeks Persaingan Usaha Dimensi Keseluruhan Menurut Bobot PCA dan Bobot sama

**Skor Rata-Rata Dimensi Persaingan Usaha Per Dimensi**

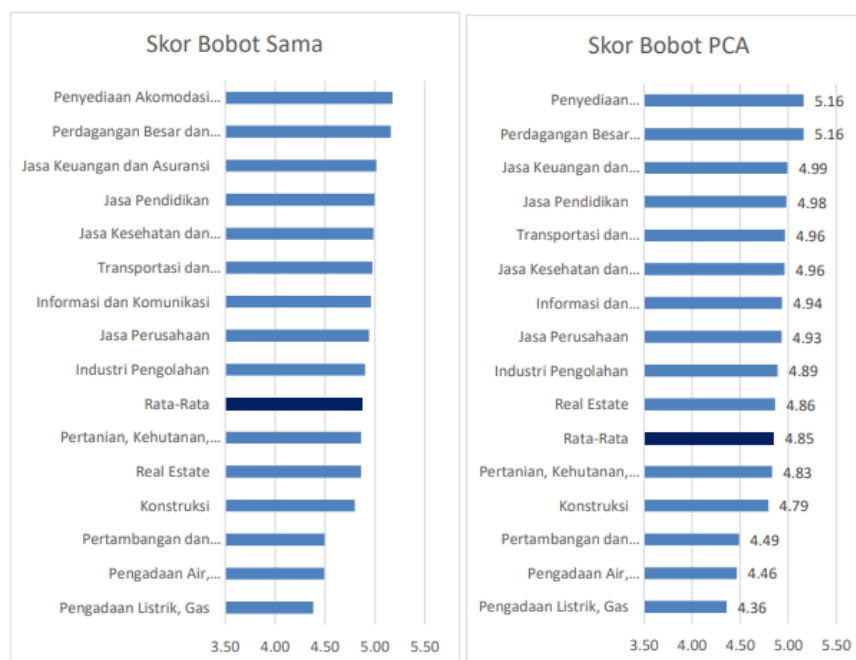
Jika dilihat dari masing-masing dimensi (Grafik 2), dimensi regulasi memiliki rata-rata skor yang tertinggi. Meski memiliki bobot/kontribusi bukan terbesar dalam pembentukan indeks secara keseluruhan, namun secara rata-rata dimensi regulasi memiliki skor paling besar. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi yang ada di daerah telah mengarah atau mendukung pada persaingan usaha yang sehat. Dari sisi dimensi SCP, dimensi perilaku (*conduct*) memiliki skor rata-rata terendah dibanding dimensi struktur (*structure*) dan dimensi kinerja (*performance*) dengan skor masing-masing untuk SCP ialah sebesar 4.66, 3.96 dan 4.81. Hal ini menunjukkan bahwa dari sisi perilaku pelaku usaha, persaingan usaha di daerah belum mengarah pada persaingan usaha yang tinggi. Hasil ini juga mengindikasikan bahwa terdapat penguasaan pasar oleh beberapa pelaku usaha, adanya potensi kerjasama dalam penetapan output dan harga dan lain sebagainya, yang mengarah pada persaingan usaha yang rendah. Dimensi regulasi memiliki skor indeks sebesar 5.69 yang menunjukkan bahwa terdapat indikasi bahwa regulasi saat ini dianggap mendorong persaingan yang cukup tinggi.



Grafik 2 Rata-rata Dimensi Persaingan Usaha

### Hasil Indeks Persaingan Usaha Per Sektor

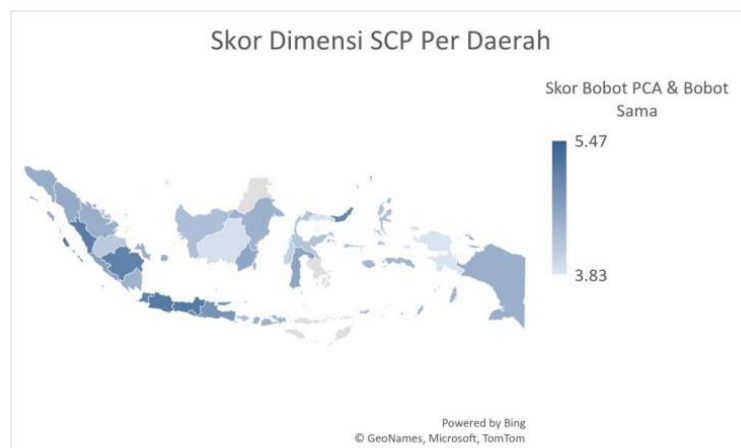
Berdasarkan Grafik 3 diketahui bahwa terdapat 10 sektor yang berada di atas rata-rata indeks dan 5 sektor yang berada di bawah rata-rata indeks. Berdasarkan kategori yang ada, indeks persaingan usaha sektoral hanya memiliki 2 kategori yakni berada dalam kategori sedikit tinggi dan moderat. Hasil ini menunjukkan bahwa tidak terdapat sektor yang memiliki persaingan yang 4.66 3.96 4.81 5.69 4.55 5.16 5.23 0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 Struktur Perilaku Kinerja Regulasi Permintaan Pasokan Kelembagaan Skor Dimensi Keseluruhan 27 sangat tinggi dan cukup tinggi, serta tidak terdapat juga sektor dengan persaingan yang sedikit rendah, cukup rendah dan sangat rendah. Sektor-sektor yang memiliki skor indeks persaingan usaha di atas rata-rata (menggunakan bobot sama dan PCA) di antaranya penyediaan akomodasi dan makan minum; perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; jasa keuangan dan asuransi; jasa pendidikan; jasa kesehatan dan kegiatan sosial, transportasi dan pergudangan, jasa perusahaan, industri pengolahan, informasi dan komunikasi. Kemudian sektor-sektor yang berada konsisten di bawah nilai rata-rata adalah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan; real estate; konstruksi; pertambangan dan penggalian; pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang dan; pengadaan listrik dan gas.



Grafik 3 Indeks Persaingan Usaha Sektoral

Berdasarkan peringkat, dengan menggunakan bobot sama, sektor yang memiliki persaingan tertinggi adalah sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum. Meski memiliki skor dengan skor sebesar 4.98 atau terkategori memiliki persaingan yang sedikit tinggi, tingginya skor pada sektor tersebut tidak lepas dari perkembangan pariwisata yang semakin gencar dilakukan. Dengan jumlah pelaku usaha yang banyak, pilihan produk yang banyak dan harga yang bersaing, membuat sektor tersebut memiliki indeks yang mengarah pada persaingan yang tinggi. Sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor merupakan sektor yang kedua yang memiliki skor indeks persaingan usaha tertinggi dengan skor 4.99. Sektor yang pada umumnya dikuasai atau dikelola oleh Pemerintah menunjukkan skor yang rendah, yakni sektor pengadaan listrik dan gas, serta sektor pengolahan air, pengolahan sampah dan limbah. Sektor pertambangan dan penggalian juga memiliki skor yang relatif rendah.

## **Analisis Indeks Persaingan Usaha berdasarkan Dimensi S-C-P** ***Indeks Persaingan Usaha Per Daerah***



Gambar 3 Peta Persaingan Usaha di Provinsi di Indonesia Berdasarkan S-C-P

Gambar 3 dan Grafik 4 menunjukkan hasil indeks persaingan usaha hanya berdasarkan dimensi S-C-P untuk seluruh Provinsi yang menjadi objek studi. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan, diketahui bahwa skor indeks persaingan usaha berdasarkan dimensi S-C-P ialah sekitar 3.83-5.47 (bobot sama dan PCA) atau terkategori berada dalam kondisi persaingan yang moderat menuju persaingan cukup tinggi. Dari skor tersebut menunjukkan dari sisi struktur pasar, perilaku dan kinerja industri, secara umum persaingan usaha saat ini belum mengarah berada pada kondisi persaingan yang tinggi. Dari hasil skor indeks persaingan usaha dimensi SCP dengan bobot sama, diketahui kategori persaingan usaha untuk setiap Provinsi sebagai berikut:

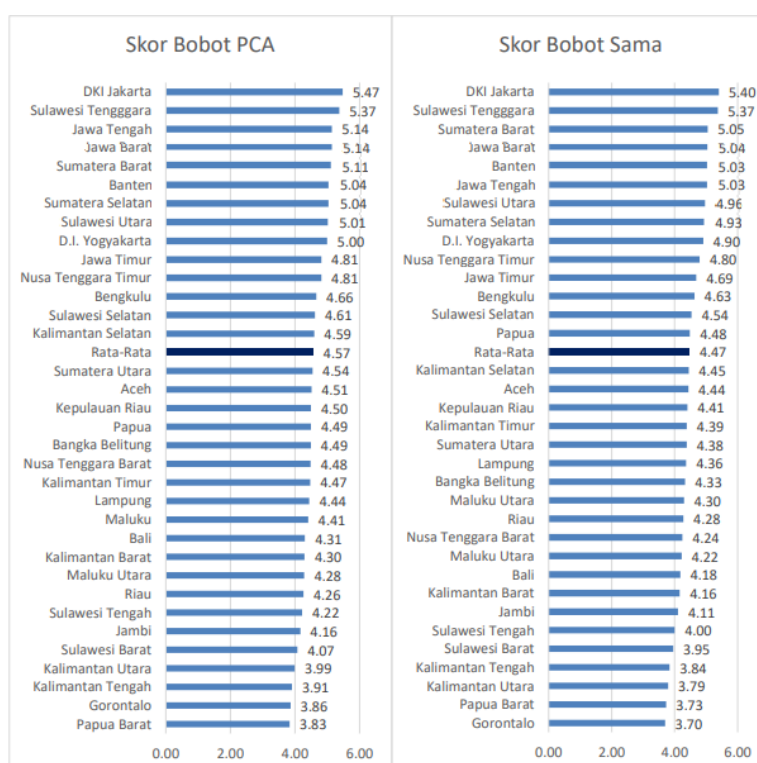
- **Persaingan Sangat Tinggi (Skor Indeks 6.51-7.00)**  
Tidak terdapat provinsi yang memiliki skor indeks persaingan usaha yang terkategori dalam persaingan sangat tinggi.
- **Persaingan Cukup Tinggi (Skor Indeks 5.51-6.50)**  
Tidak ada provinsi dengan persaingan usaha cukup tinggi dengan menggunakan bobot sama. **Persaingan Sedikit Tinggi (Skor Indeks 4.51-5.50)** Terdapat 13 provinsi yang masuk dalam kategori persaingan yang sedikit tinggi meliputi DKI Jakarta, Sulawesi Tenggara, Sumatera Barat, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Sulawesi Utara, Sumatera Selatan, Daerah Istimewa Yogyakarta, NTT, Jawa Timur, Bengkulu, dan Sulawesi Selatan.
- **Persaingan Moderat (Skor Indeks 3.51-4.50)**  
Terdapat sekitar 21 provinsi yang masuk dalam kategori persaingan yang moderat meliputi Papua, Kalimantan Selatan, Aceh, Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Sumatera Utara, Lampung, Bangka Belitung, Maluku, Riau, NTB, Maluku Utara, Bali, Kalimantan Barat, Jambi, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Papua Barat, dan Gorontalo.
- **Persaingan Sedikit Rendah (Skor Indeks 2.51-3.50)**  
Tidak terdapat provinsi dengan skor indeks persaingan usaha yang terkategori dalam persaingan sedikit rendah.
- **Persaingan Cukup Rendah (Skor Indeks 1.51-2.50)**  
Tidak terdapat provinsi yang memiliki skor indeks persaingan usaha yang

terkategori dalam persaingan cukup rendah.

- Persaingan Sangat Rendah (Skor Indeks 0.00-1.50)

Tidak terdapat provinsi yang memiliki skor indeks persaingan usaha yang terkategori dalam persaingan sangat rendah.

Skor indeks persaingan usaha menggunakan dimensi SCP dan bobot PCA memiliki beberapa kesimpulan yang sedikit berbeda dengan skor indeks persaingan usaha seluruh dimensi dan bobot sama. Sebagai contoh, jumlah provinsi yang termasuk ke dalam kelompok dengan persaingan usaha sedikit tinggi lebih banyak 4 provinsi menjadi 17 provinsi yaitu dengan penambahan Provinsi Papua, Kalimantan Selatan, Aceh, dan Kepulauan Riau. Hal ini disebabkan 30 perbedaan bobot yang cukup besar antar dimensi SCP pada bobot menggunakan PCA.

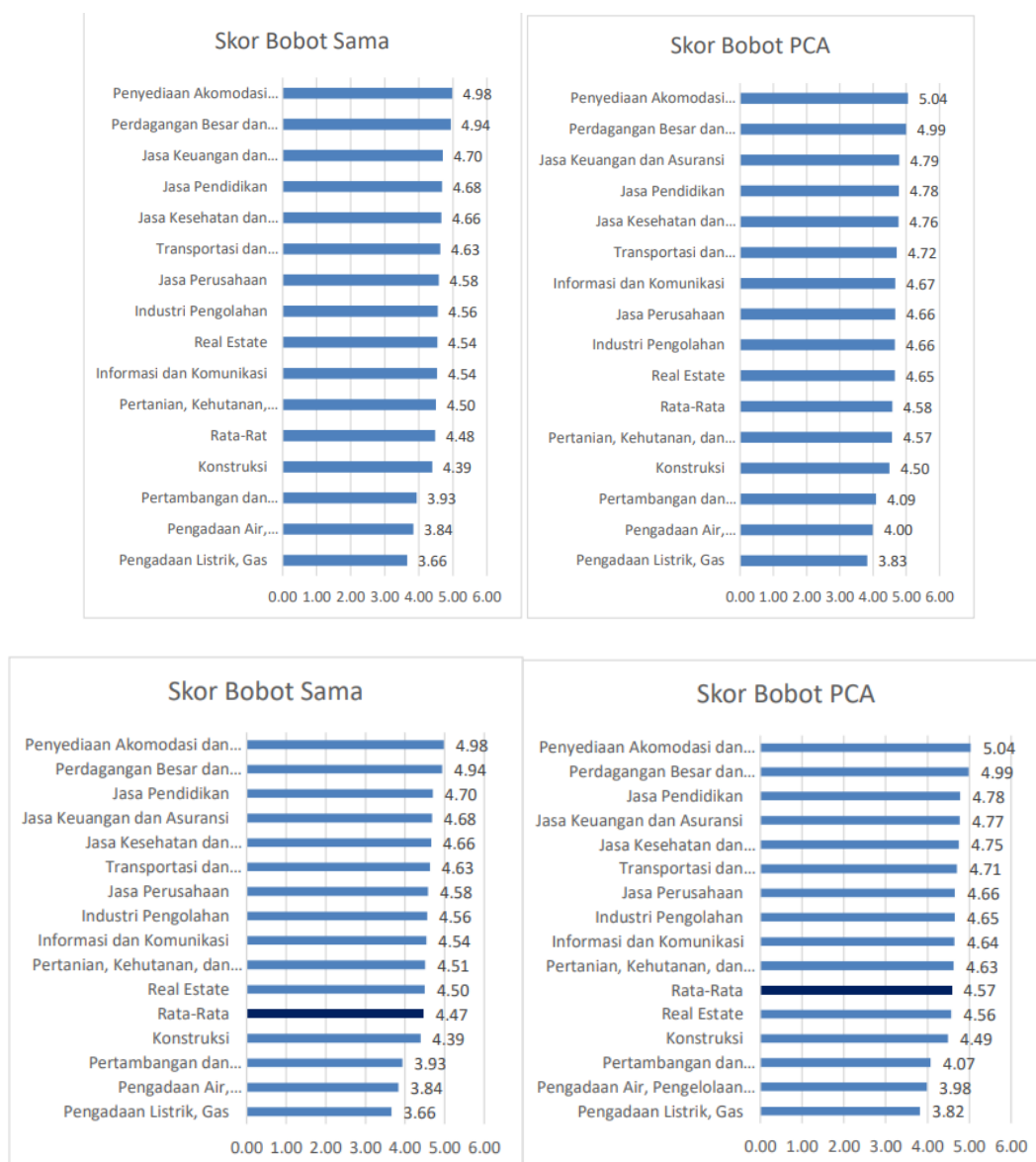


Grafik 4 Skor Indeks Persaingan Usaha Per Provinsi Dimensi SCP Bobot PCA dan Bobot Sama

Dari sisi dimensi S-C-P, dimensi perilaku industri memiliki skor rata-rata terendah dibanding dimensi struktur pasar dan kinerja industri dengan masing-masing dimensi SCP memiliki skor sebesar 4.65, 3.96 dan 4.81. Hal ini menunjukkan bahwa dari sisi perilaku pelaku usaha, persaingan usaha di daerah belum mengarah pada persaingan usaha yang tinggi. Kondisi ini mengindikasikan bahwa terdapat adanya potensi kerjasama dalam penetapan output dan harga dan lain sebagainya, yang mengarah pada persaingan usaha yang rendah.

Berdasarkan Grafik 5, sektor yang memiliki persaingan tertinggi di atas rata-rata adalah sektor Penyediaan Akomodasi dan Makanan dan Minuman (berdasarkan bobot PCA (5.04) dan bobot yang sama (4.98). Meski memiliki skor terkategori memiliki persaingan yang sedikit tinggi untuk masing-masing sektor tersebut. Hal tersebut tidak lepas dari banyaknya pelaku usaha di sektor ini dan berkembangnya sektor lain seperti sektor pariwisata. Sektor Perdagangan Besar dan Eceran sebagai sektor dengan indeks tertinggi kedua tidak lepas dari perkembangan bisnis perdagangan yang meningkat dan jumlah

pelaku usaha yang banyak dan harga yang bersaing, membuat sektor tersebut memiliki indeks yang mengarah pada persaingan yang tinggi. Sama dengan tahun 2021 dan tahun 2020, Sektor yang pada umumnya dikuasai atau dikelola oleh Pemerintah menunjukkan skor yang rendah, yakni sektor pengadaan listrik dan gas dengan skor indeks sekitar 3.83 (bobot PCA) dan 3.66 (bobot sama), serta sektor pengolahan air, pengolahan sampah dan limbah dengan skor 4.00 (bobot PCA) dan 3.84 (bobot sama). Sektor pertambangan dan penggalian juga memiliki skor yang relatif rendah. Hal tersebut dapat disebabkan karena hambatan masuk dalam industri pertambangan dan penggalian relatif tinggi, utamanya dari sisi regulasi, permodalan dan teknologi.



Grafik 5 Indeks Persaingan Usaha Sektoral berdasarkan S-C-P

Berdasarkan peringkat, dengan menggunakan bobot sama, sektor yang memiliki persaingan tertinggi adalah sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum. Meski memiliki skor dengan skor sebesar 4.98 atau terkategori memiliki persaingan yang sedikit tinggi, tingginya skor pada sektor tersebut tidak lepas dari perkembangan pariwisata yang semakin gencar dilakukan. Dengan jumlah pelaku usaha yang banyak, pilihan produk yang banyak dan harga yang bersaing, membuat sektor tersebut memiliki indeks yang mengarah pada persaingan yang tinggi. Sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor merupakan sektor yang kedua yang memiliki

skor indeks persaingan usaha tertinggi dengan skor 4.99. Sektor yang pada umumnya dikuasai atau dikelola oleh Pemerintah menunjukkan skor yang rendah, yakni sektor pengadaan listrik dan gas, serta sektor pengolahan air, pengolahan sampah dan limbah. Sektor pertambangan dan penggalian juga memiliki skor yang relatif rendah.

### 3. Rekapitulasi Putusan KPPU yang dibatalkan di Tingkat Pengadilan Negeri/Pengadilan Niaga TA 2022

No	Nomor Putusan KPPU	Perkara	Pengadilan	Tanggal Putusan	Amar Putusan
1	06/KPPU-L/2020	Umroh Garuda	Kasasi	9 Maret 2022	Menang
2	04/KPPU-L/2020	Tender Paket Pekerjaan Pembangunan RS Rujukan Regional Langsa Satker Dinas Kesehatan Aceh Pemerintah Daerah Provinsi Aceh TA 2018 (Kode Lelang: 17684106)	Kasasi	3 Februari 2022	Menang
3	25/KPPU-I/2020	Tender Pengadaan Paket Pembangunan Revetment Dan Pengurugan Lahan di Pelabuhan Perikanan Popoh Kabupaten Tulungagung TA 2017	Pengadilan Niaga	22 Agustus 2022	Kalah, secara substansi
4	10/KPPU-L/2013	RSUD Embung Fatimah	Kasasi	24 Februari 2022	Menang
5	09/KPPU-K/2020	Kemitraan PT Sinar Ternak Sejahtera	Kasasi	6 Desember 2022	Menang
6	14/KPPU-L/2018	Tender Paket Preservasi Rehabilitasi Jalan Zaenal Arifin Binjai Raya - Medan - Belawa pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Metropolitan Medan APBN TA 2017	Kasasi	31 Maret 2022	Menang
7	30/KPPU-I/2019	Tender Halmahera	Peninjauan Kembali	14 Desember 2022	Menang
8	15/KPPU-I/2019	Kartel Tiket Pesawat	Kasasi	13 Desember 2022	Menang

**4. Rincian Anggaran dan Target Output (KRO/RO) Kegiatan KPPU TA 2022 pada Program Pengawasan Persaingan Usaha Pendukung Prioritas Nasional**

Kode	Unit Kerja	Kegiatan/ KRO	Pagu (Rp)	Kode KRO/ RO	Output (KRO)/ RO) Target	Satuan
<b>Program Pengawasan Persaingan Usaha</b>						
3952	Direktorat Ekonomi	<b>Pemantauan dan Kajian Pelaku Usaha</b>	<b>2.977.964.000</b>			
			<b>2.977.964.000</b>	<b>PBB</b>	<b>10</b>	<b>Rekomen dasi Kebijakan</b>
		(PBB) Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan	1.708.289.000	PBB.001	6	Rekomend asi Kebijakan
			1.059.675.000	PBB.002	3	Rekomend asi Kebijakan
			210.000.000	PBB.003	1	Rekomend asi Kebijakan
5162	Direktorat Kebijakan Persaingan	<b>Analisis Kebijakan Persaingan</b>	<b>1.778.569.000</b>			
			<b>1.678.569.000</b>	<b>PBB</b>	<b>9</b>	<b>Rekomen dasi kebijakan</b>
		(PBB) Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan	1.150.363.000	PBB.001	5	Rekomend asi kebijakan
			293.166.000	PBB.002	3	Rekomend asi kebijakan
			235.040.000	PBB.003	1	Rekomend asi kebijakan
		(UAB) Sistem Informasi Pemerintahan	<b>100.000.000</b>	<b>UAB</b>	<b>1</b>	<b>Sistem Informasi</b>
	100.000.000	UAB.001	1	Sistem Informasi		
5194	Direktorat Advokasi Persaingan dan Kemitraan	<b>Advokasi Persaingan Usaha &amp; Kemitraan</b>	<b>2.356.975.000</b>			
		(PEB) Forum	<b>491.100.000</b>	<b>PEB</b>	<b>5</b>	<b>Forum</b>



Kode	Unit Kerja	Kegiatan/ KRO	Pagu (Rp)	Kode KRO/ RO	Output (KRO)/ RO) Target	Satuan
			91.100.000	PEB.001	3	Forum
			400.000.000	PEB.002	2	Forum
		(QDB) Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	<b>752.180.000</b>	<b>QDB</b>	<b>13</b>	<b>Lembaga</b>
			101.076.000	QDB.001	2	Lembaga
			651.104.000	QDB.002	11	Lembaga
		(QDH) Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	<b>1.113.695.000</b>	<b>QDH</b>	<b>9</b>	<b>Badan Usaha</b>
			806.581.000	QDH.001	7	Badan Usaha
			307.114.000	QDH.002	2	Badan Usaha
		<b>Pengawasan Kemitraan</b>	<b>2.345.600.000</b>			
			<b>2.345.600.000</b>	<b>QCE</b>	<b>15</b>	<b>Perkara</b>
		(QCE) Penanganan Perkara	1.129.523.000	QCE.001	8	Perkara
			150.200.000	QCE.002	1	Perkara
			1.013.100.000	QCE.003	5	Perkara
			52.777.000	QCE.004	1	Perkara
		<b>Penilaian Merger dan Akuisisi</b>	<b>2.387.199.000</b>			
		(QCD) Perkara Hukum Badan Usaha	<b>596.355.000</b>	<b>QCD</b>	<b>5</b>	<b>Perkara</b>
			596.355.000	QCD.002	5	Perkara
		(QIH) Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha	<b>1.649.744.000</b>	<b>QIH</b>	<b>24</b>	<b>Badan Usaha</b>
			950.514.000	QIH.001	15	Badan Usaha
			699.230.000	QIH.002	9	Badan Usaha
		(RAH) Sarana Bidang Industri dan Perdagangan	<b>141.100.000</b>	<b>RAH</b>	<b>1</b>	<b>Unit</b>
			141.100.000	RAH.001	1	Unit

Kode	Unit Kerja	Kegiatan/ KRO	Pagu (Rp)	Kode KRO/ RO	Output (KRO)/ RO) Target	Satuan
3956	Direktorat Investigasi	<b>Investigasi Dugaan Pelanggaran Persaingan Usaha Tidak Sehat</b>	<b>3.532.739.000</b>			
			<b>3.532.739.000</b>	<b>QCE</b>	<b>38</b>	<b>Perkara</b>
		(QCE)	1.550.039.000	QCE.001	22	Perkara
		Penanganan perkara	786.000.000	QCE.002	7	Perkara
			1.146.200.000	QCE.003	7	Perkara
			50.500.000	QCE.004	2	Perkara
3957	Direktorat Penindakan	<b>Penindakan Pelanggaran Persaingan Usaha Sehat</b>	<b>2.663.563.000</b>			
			<b>2.663.563.000</b>	<b>QCE</b>	<b>20</b>	<b>Perkara</b>
		(QCE)	488.735.000	QCE.001	4	Perkara (Pemberka san)
		Penanganan Perkara	1.478.994.000	QCE.002	10	Perkara (Penuntuta n)
		695.834.000	QCE.003	6	Perkara (Litigasi)	
5275	Kepaniteraan	<b>Penanganan Perkara Pelanggaran Persaingan Usaha</b>	<b>9.836.462.000</b>			
			<b>9.836.462.000</b>	<b>QCE</b>	<b>33</b>	<b>Perkara</b>
		(QCE)	2.442.214.000	QCE.001	11	Perkara
		Penanganan Perkara	6.261.046.000	QCE.002	13	Perkara
		1.133.202.000	QCE.003	9	Perkara	

Kode	Unit Kerja	Kegiatan/ KRO	Pagu (Rp)	Kode KRO/ RO	Output (KRO)/ RO) Target	Satuan
3955	Kantor Wilayah	<b>Pengawasan Persaingan Usaha di Wilayah Kerja Kantor Wilayah KPPU</b>	<b>6.899.600.000</b>			
		(PBB) Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan	<b>2.037.630.000</b>	<b>PBB</b>	<b>15</b>	<b>Rekomen dasi Kebijakan</b>
			262.990.000	PBB.001	2	Rekomend asi Kebijakan
			109.078.000	PBB.002	1	Rekomend asi Kebijakan
			170.465.000	PBB.003	2	Rekomend asi Kebijakan
			262.990.000	PBB.004	2	Rekomend asi Kebijakan
			447.349.000	PBB.005	3	Rekomend asi Kebijakan
			589.758.000	PBB.006	3	Rekomend asi Kebijakan
			195.000.000	PBB.007	2	Rekomend asi Kebijakan
			(QCE) Penanganan Perkara	<b>1.871.889.000</b>	<b>QCE</b>	<b>14</b>
		562.635.000		QCE.001	3	Perkara
		371.207.000		QCE.002	3	Perkara
		159.299.000		QCE.003	2	Perkara
		92.635.000		QCE.004	1	Perkara
		153.720.000		QCE.005	1	Perkara
		252.515.000		QCE.006	2	Perkara
		279.878.000		QCE.007	2	Perkara

Kode	Unit Kerja	Kegiatan/ KRO	Pagu (Rp)	Kode KRO/ RO	Output (KRO)/ RO) Target	Satuan
		(UBA) Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	<b>2.990.081.000</b>	<b>UBA</b>	<b>35</b>	<b>Prov/Kab/ Kota</b>
			285.578.000	UBA.001	3	Prov/Kab/ Kota
			305.575.000	UBA.002	5	Prov/Kab/ Kota
			537.469.000	UBA.003	6	Prov/Kab/ Kota
			589.843.000	UBA.004	6	Prov/Kab/ Kota
			545.817.000	UBA.005	7	Prov/Kab/ Kota
			474.372.000	UBA.006	5	Prov/Kab/ Kota
			251.427.000	UBA.007	3	Prov/Kab/ Kota
<b>TOTAL</b>			<b>34.778.671.000</b>			

**5. Rincian Anggaran dan Target Output (KRO/RO) Kegiatan KPPU TA 2022 pada Program Dukungan Manajemen**

Kode	Unit Kerja	Kegiatan/KRO	Kode KRO/RO	Pagu (Rp)	Output (KRO/RO)	Satuan	
					Target		
<b>Program Dukungan Manajemen</b>							
<b>Kegiatan Pendukung Operasional Prioritas Nasional</b>							
<b>5971</b>	<b>Biro SDM dan Umum</b>	<b>Pengelolaan Sumber Daya Manusia dan Umum</b>		<b>86.284.031.000</b>			
			<b>EBA</b>	<b>74.970.027.000</b>	<b>5</b>	<b>Layanan</b>	
			EBA.956	1.080.093.000	1	Layanan	
			EBA.959	1.831.056.000	1	Layanan	
			EBA.960	986.996.000	1	Layanan	
			EBA.962	603.985.000	1	Layanan	
			EBA.994.001	44.120.992.000	1	Layanan	
			EBA.994.002	26.346.905.000			
			<b>(EBB) Layanan Sarana dan Prasarana Internal</b>	<b>EBB</b>	<b>4.659.872.000</b>	<b>232</b>	<b>Unit</b>
				EBB.951	2.871.022.000	231	Unit
				EBB.971	1.788.850.000	1	Unit
			<b>(EBC) Layanan Manajemen SDM Internal</b>	<b>EBC</b>	<b>6.141.081.000</b>	<b>417</b>	<b>Orang</b>
				EBC.954	6.141.081.000	417	Orang

Kode	Unit Kerja	Kegiatan/KRO	Kode KRO/ RO	Pagu (Rp)	Output (KRO/ RO)	Satuan
					Target	
		(EBD) Layanan Manajemen Kinerja Internal	<b>EBD</b>	<b>513.051.000</b>	<b>24</b>	<b>Dokumen</b>
			EBD.953	171.579.000	1	Dokumen
			EBD.974	341.472.000	23	Dokumen
5972	Unit Pelaksana Pendidikan dan Pelatihan	<b>Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan</b>	<b>BDB</b>	<b>1.767.540.000</b>	<b>26</b>	<b>Lembaga</b>
		(BDB) Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	BDB.001	166.100.000	4	Lembaga
			BDB.002	1.601.440.000	22	Lembaga
		(EBC) Layanan Manajemen SDM Internal	<b>EBC</b>	<b>2.739.310.000</b>	<b>690</b>	<b>Orang</b>
			EBC.996	2.739.310.000	690	Orang
		(EBD) Layanan Manajemen Kinerja Internal	<b>EBD</b>	<b>76.916.000</b>	<b>2</b>	<b>Dokumen</b>
			EBD.953	76.916.000	2	Dokumen
5973	Unit Data dan Informasi	<b>Peningkatan Data dan Informasi</b>	<b>EBA</b>	<b>1.315.519.000</b>	<b>1</b>	<b>Layanan</b>
		(EBA) Layanan Dukungan Manajemen Internal	EBA.963	1.315.519.000	1	Layanan
5974	Biro Hukum	<b>Penyelenggaraan Bantuan Hukum dan Eksekusi</b>				
		(EBA) Layanan Dukungan Manajemen Internal	<b>EBA</b>	<b>2.592.036.000</b>	<b>4</b>	<b>Layanan</b>
			EBA.002	1.295.648.000	1	Layanan
EBA.957	1.270.000.000	2	Layanan			

Kode	Unit Kerja	Kegiatan/KRO	Kode KRO/ RO	Pagu (Rp)	Output (KRO/ RO)	Satuan
					Target	
			EBA.969	26.388.000	1	Layanan
		(EBD) Layanan Manajemen Kinerja Internal	<b>EBD</b>	<b>71.224.000</b>	<b>3</b>	<b>Dokumen</b>
			EBD.953	71.224.000	3	Dokumen
5975	Biro Humas dan Kerja Sama	<b>Penyelenggaraan Komunikasi Lembaga</b>				
			<b>AEB</b>	<b>432.862.000</b>	<b>3</b>	<b>Forum</b>
		(AEB) Forum	AEB.001	108.774.000	1	Forum
			AEB.002	324.088.000	2	Forum
		(AEC) Kerja Sama	<b>AEC</b>	<b>345.028.000</b>	<b>8</b>	<b>Kesepakatan</b>
			AEC.001	345.028.000	8	Kesepakatan
		(AED) Perjanjian	<b>AED</b>	<b>75.408.000</b>	<b>2</b>	<b>Perjanjian</b>
			AED.001	75.408.000	2	Perjanjian
		(BMA) Data dan Informasi Publik	<b>BMA</b>	<b>516.854.000</b>	<b>2</b>	<b>Layanan</b>
			BMA.001	269.694.000	1	Layanan
			BMA.002	247.160.000	1	Layanan
		(BMB) Komunikasi Publik	<b>BMB</b>	<b>178.947.000</b>	<b>1</b>	<b>Layanan</b>
			BMB.001	178.947.000	1	Layanan
		(EBA) Layanan Dukungan Manajemen Internal	<b>EBA</b>	<b>732.159.000</b>	<b>1</b>	<b>Layanan</b>
			EBA.958	732.159.000	1	Layanan

Kode	Unit Kerja	Kegiatan/KRO	Kode KRO/ RO	Pagu (Rp)	Output (KRO/ RO)	Satuan
					Target	
		(EBD) Layanan Manajemen Kinerja Internal	<b>EBD</b>	<b>132.662.000</b>	<b>1</b>	<b>Dokumen</b>
			EBD.953	132.662.000	1	Dokumen
5976	Satuan Pengawasan Internal	<b>Pengawasan Akuntabilitas dan Aparatur Negara KPPU</b>				
			<b>EBD</b>	<b>511.328.000</b>	<b>8</b>	<b>Dokumen</b>
		(EBD) Layanan Manajemen Kinerja Internal	EBD.001	421.002.000	6	Dokumen
			EBD.965	90.326.000	2	Dokumen
5977	Biro Perencanaan dan Keuangan	<b>Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran KPPU</b>				
			<b>EBD</b>	<b>3.092.170.000</b>	<b>24</b>	<b>Dokumen</b>
			EBD.001	139.488.000	3	Dokumen
		(EBD) Layanan Manajemen Kinerja Internal	EBD.002	146.076.000	1	Layanan
			EBD.952	545.231.000	6	Dokumen
			EBD.953	934.308.000	9	Dokumen
			EBD.955	1.327.067.000	5	Dokumen
<b>TOTAL</b>				<b>100.863.994.000</b>		

Catatan:

Klasifikasi Rincian Output (KRO) merupakan kumpulan atas keluaran (*output*) Kementerian/Lembaga (Rincian Output – RO) yang disusun dengan mengelompokkan atau mengklasifikasikan muatan keluaran (*output*) yang sejenis/serumpun berdasarkan sektor/bidang/jenis tertentu secara sistematis Rincian Output (RO) merupakan keluaran (*output*) riil yang sangat spesifik yang dihasilkan oleh unit kerja



Kementerian/Lembaga yang berfokus pada isu dan/atau lokasi tertentu serta berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi unit kerja tersebut dalam mendukung pencapaian sasaran Kegiatan yang telah ditetapkan.

#### 6. Rekapitulasi Perbandingan Pagu Akhir dan Realisasi Anggaran KPPU TA 2021 dan 2022

2021		2022	
Pagu (RPp)	Realisasi (Rp)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)
141.290.622.000,-	136.844.511.949	135.642.665.000,-	134.014.621.930,-

#### 7. Perbandingan Rincian Pendapatan PNBP dari Denda Persaingan Usaha TA 2021 dan 2022

	2021			2022		
	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
Pendapatan PNBP	119.433.706.578	148.644.516.943	124.45%	110.000.000.000	110.469.344.422	100.43%
Pemanfaatan PNBP	51.389.000.000	48.764.274.896	94.89%	46.923.823.000	46.105.249.292	98.26%

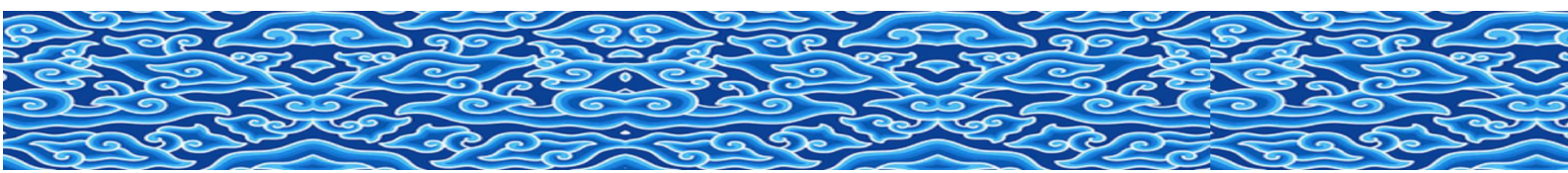
#### 8. Pagu dan Realisasi Anggaran KPPU TA 2022 (menurut Sasaran Strategis)

No	Sasaran Strategis (SS)/ Indikator Kinerja SS	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
<b>Terwujudnya kepastian hukum persaingan usaha untuk menjamin iklim investasi yang sehat dengan advokasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat, penegakan hukum persaingan usaha dan pengawasan pelaksanaan kemitraan yang sehat</b>				
1	Tingkat persaingan usaha yang sehat sesuai dengan prinsip-prinsip UU Nomor 5 Tahun 1999 (Indeks Persepsi Persaingan Usaha, skala 1 - 7)	12.141.219.000	11.960.431.070	98.51%
2	Persentase penyelesaian proses penegakan hukum persaingan usaha yang sesuai dengan peraturan berlaku	22.637.452.000	22.132.407.508	97.77%

No	Sasaran Strategis (SS)/ Indikator Kinerja SS	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
<b>Terwujudnya tata kelola kelembagaan KPPU melalui e-government dalam rangka peningkatan kualitas layanan manajemen baik internal maupun eksternal</b>				
1	Indeks Tingkat efektivitas pemanfaatan e-government (Percepatan dan kemudahan pelayanan, transparansi pelayanan, kepastian waktu dan keamanan data, skala 1 - 100)	30.396.097.000	30.094.755.603	99.01%
	Belanja Pegawai	44.120.992.000	43.672.673.650	98.98%
	Belanja Operasional dan Pemeliharaan Kantor	26.346.905.000	26.154.354.099	99.27%
<b>TOTAL</b>		<b>135.642.665.000</b>	<b>134.014.621.930</b>	<b>98.80%</b>

#### 9. Rekapitulasi Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Sasaran Strategis KPPU TA 2022 dan 2021

No	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja SS	2022		2021	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	Terwujudnya kepastian hukum persaingan usaha untuk menjamin iklim investasi yang sehat dengan advokasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat, penegakan hukum persaingan usaha dan pengawasan pelaksanaan kemitraan yang sehat	1.1. Tingkat persaingan usaha yang sehat sesuai dengan prinsip-prinsip UU Nomor 5 Tahun 1999 (Indeks Persepsi Persaingan Usaha, skala 1 - 7)	4.7	4.87	4.7	4.81
		1.2. Persentase penyelesaian proses penegakan hukum persaingan usaha yang sesuai dengan peraturan berlaku	90%	100%	85%	100%



No	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja SS	2022		2021	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi
2.	Terwujudnya tata kelola kelembagaan KPPU melalui <i>e-government</i> dalam rangka peningkatan kualitas layanan manajemen baik internal maupun eksternal	Indeks Tingkat efektivitas pemanfaatan <i>e-government</i> (Percepatan dan kemudahan pelayanan, transparansi pelayanan, kepastian waktu dan keamanan data, skala 1 - 100)	79	77.81	78	76

**1. Rekapitulasi rata-rata capaian Indikator Kinerja Program Eselon II Pada Kedepatian Bidang Kajian dan Advokasi dan Kedepatian Bidang Penegakan Hukum dan TA 2022**

Kode	Sasaran Program (SS)/ Indikator Sasaran Program	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
<b>EG.01</b>	<b>Terpenuhinya kualitas advokasi kebijakan persaingan usaha kepada pemerintah yang lebih baik</b>				
01.01	Indeks kepatuhan pelaku usaha terhadap nilai-nilai persaingan sesuai UU Nomor 5/1999 (Skala 1-7)	Indeks	4.2	6.17	146.90%
01.02	Indeks kepatuhan pelaku usaha didalam menjalankan kemitraan sesuai UU Nomor 20 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2013 (Skala 1-7)	Indeks	4.2	6.00	142.86%
<b>EG.02</b>	<b>Terwujudnya kepastian penegakan hukum persaingan usaha</b>				
02.01	Prosentase jumlah klarifikasi laporan dan Laporan Hasil Penelitian yang ditindaklanjuti ke Tahap Penyelidikan	Persentase	23	18.48	80.34%
02.02	Persentase penilaian merger yang ditindaklanjuti pelaku usaha	Persentase	100	100	100.00%
02.03	Prosentase kepatuhan pelaku usaha terhadap rekomendasi yang disampaikan melalui surat peringatan I, II dan III terkait dugaan pelanggaran pelaksanaan kemitraan	Persentase	80	100	125.00%
02.04	Prosentase banding/kasasi di Pengadilan Negeri/ Mahkamah Agung yang ditindaklanjuti	Persentase	85	100	117.65%
02.05	Prosentase terbuktinya dugaan pelanggaran pada putusan KPPU	Persentase	90	100	111.11%
02.06	Indeks Layanan Kepaniteraan (Skala 1-7)	Indeks	3.5	4.539	129.69%

## 2. Rekapitulasi rata-rata capaian Indikator Kinerja Program Eselon II Pada Sekretariat Jenderal TA 2022

Kode	Sasaran Program (SS)/ Indikator Sasaran Program	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
WA.01	Penguatan Sumber Daya Manusia KPPU				
01.01	Indeks Kompetensi dan Integritas KPPU (skala 1-100)	Indeks	64	69.96	109.31%
01.02	Persentase lulusan diklat persaingan usaha berbasis kompetensi dengan nilai baik	Persentase	85	91.35	107.47%
01.03	Rasio penerapan tata kelola manajemen perubahan SDM berbasis <i>e-government</i>	Ratio	3	3	100.00%
WA.02	Terwujudnya Kapasitas dan Kapabilitas Kinerja Birokrasi				
02.01	Persentase peningkatan penyiapan instrument reformasi birokrasi	Persentase	85	85.09	100.11%
02.02	Indeks layanan umum operasional teknis internal (Skala 1-7)	Indeks	5.0	5.61	112.20%
02.03	Indeks layanan ketatausahaan dan operasional pimpinan (Skala 1-7)	Indeks	5.0	5.5	110.00%
02.04	Indeks Keamanan Informasi (skala 1-645)	Indeks	260	279	107.31%
02.05	Indeks kepuasan pemangku kepentingan atas layanan kehumasan dan pengembangan kerjasama (Skala 1-7)	Indeks	4.2	6.17	146.90%
02.06	Indeks Layanan Hukum (Skala 1-7)	Indeks	4.2	6.03	143.57%
02.07	Tingkat Maturitas SPIP (Skala 1-5)	Nilai	3	3.84	128.27%
02.08	Opini BPK atas Laporan Keuangan KPPU	Opini	WTP	WTP	100.00%

### 3. Rekapitulasi Capaian Target Indikator Kinerja Kegiatan (Eselon II) pada Kedepatian Bidang Penegakan Hukum TA 2022

(Direktorat Investigasi)

Kode	Kegiatan/Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Satuan	2022	
				Realisasi	% Realisasi
3956	Investigasi Dugaan Pelanggaran Persaingan Usaha Tidak Sehat				
3956.01	Meningkatkan Efektifitas Pelaksanaan Investigasi terhadap Pelaku Usaha atau Kegiatan Usaha				
3956.01.01	Persentase laporan hasil klarifikasi dugaan pelanggaran persaingan usaha tidak sehat yang ditindaklanjuti ke tahap penyelidikan	20	Persen	15.12	75.60%
3956.01.02	Persentase laporan hasil penelitian perkara inisiatif dugaan pelanggaran persaingan usaha tidak sehat yang ditindaklanjuti ke tahap penyelidikan	23	Persen	66.67	289.87%
3956.01.03	Persentase laporan hasil penyelidikan dugaan pelanggaran persaingan usaha tidak sehat yang ditindaklanjuti ke tahap pemberkasan	30	Persen	71.43	238.10%

(Direktorat Penindakan)

Kode	Kegiatan/Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Satuan	2022	
				Realisasi	% Realisasi
3957	Penindakan Pelanggaran Persaingan Usaha Sehat				
3957.01	Terpenuhinya pelaksanaan penindakan pelanggaran persaingan usaha tidak sehat				
3957.01.01	Persentase pemberkasan dugaan pelanggaran usaha yang ditindaklanjuti	100	Persen	100	200.00%
3957.01.02	Persentase penyelesaian penuntutan dugaan pelanggaran pada pemeriksaan/sidang majelis komisi	100	Persen	125	125.00%
3957.01.03	Persentase dikuatkannya Putusan KPPU di tingkat Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung sampai dengan tahun berjalan	63	Persen	87.50	138.89%

(Direktorat Merger dan Akuisisi)

Kode	Kegiatan/Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Satuan	2022	
				Realisasi	% realisasi
3958	Penilaian Merger dan Akuisisi				
3958.01	Terwujudnya penilaian dan penanganan perkara merger dan akuisisi yang efektif				
3958.01.01	Persentase notifikasi merger dan akuisisi yang ditindaklanjuti ke tahap penilaian	65	Persen	94.06	144.71%
3958.01.02	Persentase penilaian merger dan akuisisi yang diselesaikan	100	Persen	100	100.00%
3958.01.03	Persentase perkara merger dan akuisisi yang diselesaikan	100	Persen	200	200.00%

(Direktorat Pengawasan Kemitraan)

Kode	Kegiatan/Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Satuan	2022	
				Realisasi	% Realisasi
3953	Pengawasan Kemitraan				
3953.01	Terwujudnya penanganan dugaan pelanggaran pelaksanaan kemitraan				
3953.01.01	Persentase penilaian perjanjian kemitraan yang sehat yang diselesaikan	100	Persen	100	100.00%
3953.01.02	Persentase penanganan dugaan pelanggaran pelaksanaan kemitraan yang diselesaikan	100	Persen	160	160.00%
3953.01.03	Persentase monitoring pelaksanaan surat peringatan dugaan pelanggaran pelaksanaan kemitraan yang diselesaikan	100	Persen	200	200.00%

(Kepaniteraan)

Kode	Kegiatan/Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Satuan	2022	
				Realisasi	% Realisasi
5275	Penanganan Perkara Pelanggaran Persaingan Usaha				
5275.01	Terbuktinya dugaan pelanggaran persaingan usaha				
5275.01.01	Persentase pelaksanaan Sidang Majelis Komisi yang terlaksana	100	Persen	100	100.00%
5275.01.02	Persentase Putusan KPPU yang diselesaikan	100	Persen	166.70	166.70%
5275.01.03	Jumlah hasil Reviu Putusan KPPU terhadap iklim usaha dan investasi	1	Reviu	1	100.00%



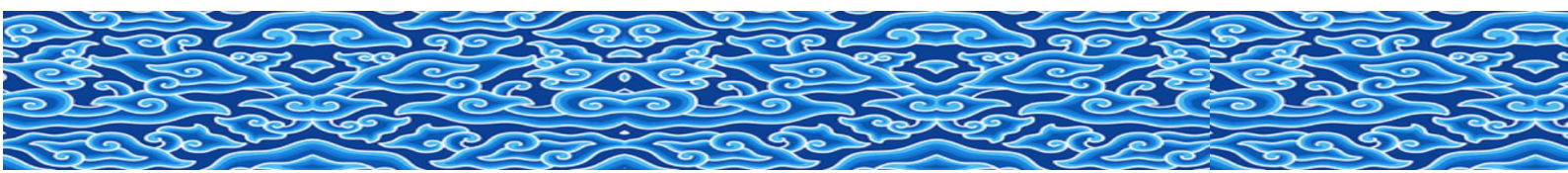
#### 4. Rekapitulasi Capaian Target Indikator Kinerja Kegiatan (Eselon II) pada Kedeputan Bidang Kajian dan Advokasi TA 2022

(Direktorat Ekonomi)

Kode	Kegiatan/Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Satuan	2022	
				Realisasi	% Realisasi
3952	Pemantauan dan Kajian Pelaku Usaha				
3952.01	Terwujudnya peningkatan internalisasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat di kalangan pelaku usaha				
3952.01.01	Persentase kajian sektor prioritas yang ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024	20	Persen	67	333.33%
3952.01.02	Persentase kajian ekonomi menjadi penelitian inisiatif tentang dugaan pelanggaran Undang-Undang Persaingan Usaha	50	Persen	50	100.00%
3952.01.03	Indeks Persaingan usaha	1	Survei	1	100.00%
3952.01.04	Jumlah pengelolaan dan pengembangan indeks persaingan	2	Laporan	2	100.00%

(Direktorat Kebijakan Persaingan)

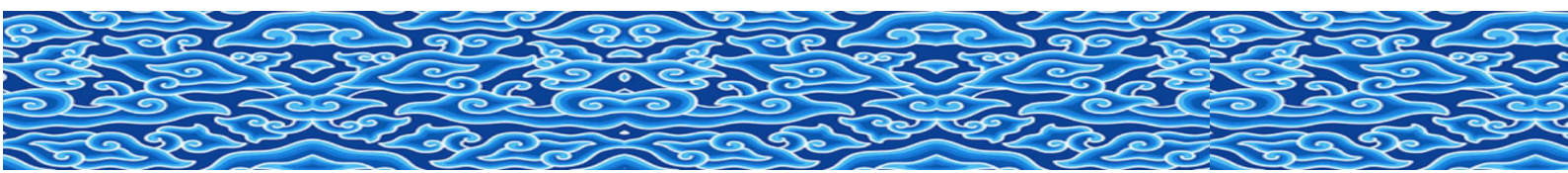
Kode	Kegiatan/Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Satuan	2022	
				Realisasi	% Realisasi
5162	Analisis Kebijakan Persaingan				
5162.01	Terwujudnya kesadaran penyusun kebijakan untuk mengadopsi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat				



Kode	Kegiatan/Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Satuan	2022	
				Realisasi	% Realisasi
5162.01.01	Persentase pemerintah pusat K/L dan Pemerintah Provinsi yang menggunakan asesmen kebijakan persaingan usaha yang ditindaklanjuti sebagai referensi dalam proses	10	Persen	11.70	117.02%
5162.01.02	Persentase kajian kebijakan persaingan usaha yang menjadi surat saran pertimbangan	60	Persen	60	100.00%
5162.01.03	Persentase harmonisasi/koordinasi kebijakan persaingan usaha yang ditindaklanjuti	100	Persen	100	100.00%
5162.01.04	Persentase surat saran pertimbangan yang ditindaklanjuti	80	Persen	100	125.00%

(Direktorat Advokasi Persaingan Usaha dan Kemitraan)

Kode	Kegiatan/Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Satuan	2022	
				Realisasi	% Realisasi
5194	Advokasi Persaingan Usaha dan Kemitraan				
5194.01	Terwujudnya peningkatan nilai-nilai persaingan usaha yang sehat di kalangan pelaku ekonomi pemerintah dan masyarakat				
5194.01.01	Persentase pemahaman stakeholder tentang prinsip persaingan usaha yang sehat	100	Persen	100	100.00%
5194.01.02	Jumlah pelaku usaha yang telah memperoleh sosialisasi program kepatuhan persaingan usaha ( <i>competition compliance</i> )	500	Pelaku Usaha	500	100.00%



Kode	Kegiatan/Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Satuan	2022	
				Realisasi	% Realisasi
5194.01.03	Jumlah K/L/Pemprov/Perguruan Tinggi yang telah memperoleh sosialisasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat	10	K/L/Pemprov/Perguruan Tinggi	10	100.00%
5194.01.04	Jumlah kegiatan sosialisasi kepada Pelaku Usaha, Pelaku UMKM terkait pelaksanaan prinsip-prinsip kemitraan yang sehat	14	Kegiatan	14	100.00%
5194.01.05	Persentase Modul Advokasi yang ditetapkan menjadi bahan advokasi	100	Persen	100	100.00%

## 5. Rekapitulasi Capaian Target Indikator Kinerja Kegiatan (Eselon II) pada Sekretariat Jenderal TA 2022

(Biro SDM dan Umum)

Kode	Kegiatan/Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Satuan	2022	
				Realisasi	% Realisasi
5971	Pengelolaan Sumber Daya Manusia dan Umum				
5971.01	Terpenuhinya kualitas pengelolaan manajemen sumber daya manusia				
5971.01.01	Indeks Kepuasan pengguna layanan SDM (skala 1-7)	4.2	Layanan	5.53	131.67%
5971.01.02	Persentase pegawai yang telah memenuhi standar <i>hard competency</i> dan <i>soft competency</i>	57	Persen	99	173.68%
5971.01.03	Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan	57	Persen	89.5	157.02%
5971.01.04	Jumlah kebijakan perencanaan SDM	1	Kebijakan	1	100.00%
5971.01.05	Indeks pemahaman pegawai mengenai peraturan SDM (skala 1-7)	4.2	Indeks	5.97	142.14%
5971.01.06	Persentase Penilaian Kinerja pegawai dengan nilai minimal BAIK	84	Persen	100	119.05%
5971.02	Meningkatnya layanan manajemen Barang Milik Negara				
5971.02.01	Persentase utilisasi aset K/L	82	Persen	84.15	102.62%
5971.02.02	Indeks ketepatan waktu penyusunan RKBMN (skala 1-7)	5.0	Indeks	5.0	100.00%
5971.03	Terwujudnya layanan umum teknis internal				
5971.03.01	Indeks layanan umum operasional teknis internal (skala 1-7)	5.0	Indeks	5.61	112.20%
5971.04	Terwujudnya layanan ketatausahaan dan keprotokolan				
5971.04.01	Indeks layanan ketatausahaan dan keprotokoleran (skala 1-7)	5.0	Indeks	5.5	110.00%

Kode	Kegiatan/Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Satuan	2022		
				Realisasi	% Realisasi	
5971.05	Terwujudnya layanan perkantoran Pusat dan Daerah					
5971.05.01	Indeks kepuasan layanan operasional dan pemeliharaan kantor Pusat dan Daerah (skala 1-7)	5.0	Indeks	5.61	112.20%	

(Unit Pelaksana Pendidikan dan Pelatihan)

Kode	Kegiatan/Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Satuan	2022		
				Realisasi	% Realisasi	
5972	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan					
5972.01	Terwujudnya layanan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi					
5972.01.01	Persentase lulusan diklat berbasis kompetensi dengan nilai minimal baik	85	Persen	91.35	107.47%	
5972.01.02	Indeks persepsi peserta diklat terhadap proses pembelajaran (skala 1-7)	5.0	Indeks	6.18	123.60%	
5972.01.03	Persentase jumlah pegawai yang telah mengikuti diklat berbasis kompetensi	80	Persen	82	102.50%	

(Unit Data dan Informasi)

Kode	Kegiatan/Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Satuan	2022		
				Realisasi	% Realisasi	
5973	Peningkatan Data dan Informasi					
5973.01	Terwujudnya layanan sistem data dan informasi yang efektif					
5973.01.01	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Data dan Informasi (skala 1-5)	3.7	Indeks	4.54	122.70%	
5973.01.02	Indeks Keamanan Informasi (skala 1-645)	260	Indeks	279	107.31%	

(Biro Hukum)

Kode	Kegiatan/Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Satuan	2022	
				Realisasi	% Realisasi
5974	Penyelenggaraan Bantuan Hukum dan Eksekusi				
5974.01	Terwujudnya layanan hukum				
5974.01.01	Persentase produk hukum yang disetujui dan/atau ditetapkan	75	Persen	100	133.33%
5974.01.02	Jumlah verifikasi atas produk hukum	170	Verifikasi	524	308.24%
5974.02	Terwujudnya layanan pelaksanaan eksekusi Putusan KPPU yang efektif				
5974.02.01	Persentase tingkat kepatuhan pelaku usaha dalam pembayaran denda persaingan usaha	14	Persen	32.73	233.79%
5974.01.02	Persentase target pelaksanaan eksekusi kepada terlapor di tahun berjalan	7	Persen	21.6	308.86%
5974.01.03	Jumlah upaya pemantauan pelaksanaan putusan ke pihak terkait	25	Pemantauan	86	344.00%
5974.01.04	Persentase layanan penerbitan Surat Keterangan Bebas Perkara	100	Persen	100	100.00%
5974.03	Terwujudnya layanan bantuan hukum				
5974.03.01	Persentase keberhasilan pendampingan hukum	100	Persen	100	100.00%

(Biro Humas dan Kerja Sama)

Kode	Kegiatan/Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Satuan	2022	
				Realisasi	% Realisasi
5975	Penyelenggaraan Komunikasi Lembaga				
5975.01	Terwujudnya Pengelolaan dan Pengembangan Kerjasama Internasional yang efektif				
5975.01.01	Indeks kepuasan pemangku kepentingan atas pengembangan kerjasama internasional (skala 1-7)	4.2	Indeks	6.19	147.38%
5975.01.02	Persentase peningkatan kontribusi lembaga di tingkat internasional	15	Persen	18.46	123.1%
5975.01.03	Persentase peningkatan komunikasi dan diseminasi praktek terbaik internasional bagi lembaga	24	Persen	33	137.5%
5975.02	Terpenuhinya penyelenggaraan layanan hubungan masyarakat dan informasi				
5975.02.01	Persentase opini negatif pemberitaan K/L pada media	18	Persen	18	100.00%
5975.02.02	Indeks kepuasan pemangku kepentingan atas kualitas publikasi (skala 1-7)	4.5	Indeks	6.23	138.44%
5975.02.03	Persentase ketepatan waktu penyediaan informasi publik	85	Persen	85	100.00%
5975.03	Terpenuhinya Pengelolaan layanan manajemen organisasi				
5975.03.01	Indeks kepuasan kepada pemangku kepentingan atas pengembangan kerjasama domestik (skala 1-7)	4.2	Indeks	6.08	144.76%

(Satuan Pengawasan Internal)

Kode	Kegiatan/Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Satuan	2022	
				Realisasi	% Realisasi
5976	Pengawasan Akuntabilitas dan Aparatur Negara KPPU				
5976.01	Terwujudnya Layanan Audit Internal				
5976.01.01	Persentase jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan internal yang ditindaklanjuti	80	Persen	85	106.25%
5976.01.02	Nilai hasil telaah sejawat	60	Laporan Penilaian	74.25	123.75%
5976.01.03	Nilai <i>Internal Audit Capability Model</i>	3	Laporan Penilaian	2.80	93.33%

(Biro Perencanaan dan Keuangan)

Kode	Kegiatan/Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Satuan	2022	
				Realisasi	% Realisasi
5977	Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran KPPU				
5977.01	Terwujudnya layanan perencanaan				
5977.01.01	Jumlah dokumen perencanaan yang diselesaikan pada tahun berjalan	5	Dokumen	7	140.00%
5977.02	Terwujudnya layanan pemantauan dan evaluasi				
5977.02.01	Nilai laporan akuntabilitas kinerja kelembagaan KPPU	B	Laporan	0	0.00%
5977.02.02	Nilai atas evaluasi pelaksanaan RKA-K/L	93	Nilai Smart	95.16	102.32%
5977.03	Terwujudnya layanan manajemen keuangan				
5977.03.01	Jumlah laporan keuangan (Tahunan dan Semester)	2	Laporan	3	150%
5977.03.02	Opini BPK atas laporan keuangan	WTP	Opini	WTP	100%



(Kantor Wilayah)

Kode	Kegiatan/Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Satuan	2022	
				Realisasi	% Realisasi
3955	Pengawasan Persaingan Usaha di Wilayah Kerja Kantor Wilayah KPPU				
3955.01	Terwujudnya pengawasan persaingan usaha di wilayah kerja Kantor Wilayah KPPU				
3955.01.01	Persentase kajian pengawasan pelaku usaha yang ditindaklanjuti oleh Kanwil	31	Persen	46.15	148.9%
3955.01.02	Persentase laporan hasil klarifikasi laporan/hasil penelitian perkara inisiatif dugaan pelanggaran persaingan usaha tidak sehat dan hasil pengawasan kemitraan di Kanwil yang ditindaklanjuti ke tahap penyelidikan dan/atau ke Tahap Pemeriksaan Pendahuluan Tahap 1	51	Persen	64.71	126.9%
3955.01.03	Persentase harmonisasi peraturan daerah yang ditindaklanjuti oleh Kanwil	61	Persen	75.00	123.0%
3955.01.04	Persentase advokasi persaingan usaha dan kemitraan di daerah yang diselesaikan	100	Persen	100	100.0%
3955.01.05	Persentase koordinasi dan implementasi MoU yang diselesaikan	100	Persen	100	100.0%
3955.01.06	Persentase pelaksanaan forum jurnalis yang diselesaikan	100	Persen	100	100.0%
3955.01.07	Persentase pelaksanaan kegiatan dukungan manajemen yang diselesaikan	100	Persen	100	100.0%
3955.01.08	Persentase pelaksanaan pendampingan bantuan hukum dan eksekusi yang diselesaikan	100	Persen	100	100.0%

## 6. Penjelasan kebutuhan, kondisi kompetensi dan jumlah pegawai KPPU menurut Road Map SDM 2020 – 2024

Kemampuan dasar yang harus dimiliki sebagian besar pegawai KPPU adalah investigator. Investigator harus memiliki ilmu-ilmu intelegensi dan memiliki kemampuan ekonomi, hukum, dan pelatihan ke luar negeri untuk memperoleh keahlian khusus. Diharapkan Investigator memiliki pendidikan S3, karena berhadapan dengan pelaku bisnis sehingga harus “setara” dari sisi kompetensi. Kewenangan dalam penyelidikan merupakan kewenangan investigator, berbeda halnya jika penyidik memiliki kewenangan tambahan misalnya menggeledah. Sampai dengan saat ini KPPU tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penggeledahan dan penyitaan. Dalam konteks ini, diperlukan peningkatan kompetensi SDM secara berkelanjutan dengan fokus bidang investigasi, serta bidang merger dan akuisisi (Restrukturisasi). Tuntutan KPPU yang berhadapan dengan korporasi besar diharapkan tidak hanya berbicara mengenai hukum saja, tapi harus dapat melihat dari sisi ekonomi, misal: laporan keuangannya.

Selain itu dibutuhkan kapabilitas sebagai peneliti ekonomi. Maraknya kasus digital ekonomi menjadi tantangan untuk KPPU kedepannya. Kebutuhan SDM KPPU kedepan, selain SDM berlatar belakang hukum, juga perlu SDM berlatar belakang ekonomi dan manajemen, yang dapat melihat struktur pasar, ekonomi dan industri. Selain itu digitalisasi juga menuntut KPPU untuk memiliki ahli merger, ahli IT, ahli aset, dan ahli survei.

Struktur SDM KPPU saat ini adalah lebih banyak yang bersifat *supporting/administrative* dibandingkan dengan SDM yang menempati posisi *core*. Komposisinya adalah 60% SDM *supporting*, 40% SDM *core*. Kondisi struktur SDM seperti ini memang jauh dari ideal. Secara bertahap status maupun proporsi SDM *core* harus lebih tinggi dari SDM *supporting*.

Struktur SDM, perbandingan antara jumlah SDM *supporting* dengan *core* (investigator dan analis) untuk mencapai porsi yang ideal, yaitu 70% *core* dan 30% *supporting*.

Penyesuaian dilakukan secara *gradual* setiap tahun sampai tahun 2024:

- a. Tahun 2020-2021: 50% *core* dan 50% *supporting*
- b. Tahun 2022: 55% *core* dan 45% *supporting*
- c. Tahun 2023: 60% *core* dan 40% *supporting*
- d. Tahun 2024: 70% *core* dan 30% *supporting*

Mengingat perbandingan SDM saat ini lebih banyak yang *supporting*, maka penambahan SDM kedepan diutamakan untuk SDM *core* sampai tahun 2024:

- a. Tahun 2020-2021: 69 investigator dan analis
- b. Tahun 2022: 46 investigator dan analis
- c. Tahun 2023: 56 investigator dan analis

d. Tahun 2024: 170 investigator dan analis

**Target Jumlah (Ideal) Persebaran Pegawai core berdasarkan Road Map SDM 2020-2024 dengan Penempatan di Setiap Unit sebagai berikut:**

No	Unit Eselon II	Jumlah Pegawai	Target Jumlah (Ideal) Persebaran Pegawai Core Berdasarkan Road Map SDM 2020-2024				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Biro Perencanaan dan Keuangan	16	3	0	0	0	0
2.	Biro Hukum	11	4	0	0	0	0
3.	Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama	14	2	0	0	0	0
4.	Biro Sumber Daya Manusia dan Umum	105	2	0	0	0	0
	· Unit Data dan Informasi	6	1	0	1	0	0
	· Unit Pelaksana Pendidikan dan Pelatihan	3	2	0	1	0	0
5	Satuan Pengawasan Internal	9	1	0	2	2	2
6	Pegawai Tidak Tetap (PTT)	14					
7	Kanwil I Medan	23	4	0	2	5	5
8	Kanwil II Lampung	19	3	0	2	5	5
9	Kanwil III Bandung	14	2	0	2	5	5
10	Kanwil IV Surabaya	16	2	0	2	5	5
11	Kanwil V Balikpapan	15	3	0	2	5	5
12	Kanwil VI Makassar	15	5	0	2	5	5
13	Direktorat Ekonomi	13	2	9	5	14	14
14.	Direktorat Kebijakan dan Persaingan	10	2	2	2	14	14
15.	Direktorat Advokasi Persaingan dan Kemitraan	10	2	2	2	14	14
16.	Direktorat Investigasi	20	9	13	11	27	27
17.	Direktorat Merger dan Akuisisi	15	6	5	4	23	23
18.	Direktorat Pengawasan Kemitraan	16	4	10	9	18	18
19.	Direktorat Penindakan	17	6	2	4	15	15
20.	Kepaniteraan	12	4	0	3	13	13
		<b>393</b>					
<b>Jumlah Total Persebaran Pegawai Core</b>			<b>69</b>	<b>46</b>	<b>56</b>	<b>170</b>	

KOMPONEN BIAYA	SATUAN	2020-2021	2022	2023	2024
SDM PUSAT TAMBAHAN (CORE)	Orang	32	18	24	80
SDM KANWIL BARU	Orang	9	9	9	9
SDM TAMBAHAN KANWIL EXISTING (CORE)	Orang	28	19	23	81
TOTAL TAMBAHAN SDM CORE	Orang	69	46	56	170
SDM TAMBAHAN KUMULATIF	Orang	69	115	171	341
GAJI RATA-RATA (GOL 5-13) PER BULAN	Rp	10,884,000	10,884,000	10,884,000	10,884,000
TOTAL GAJI TAMBAHAN CORE PER BULAN	Rp	750,996,000	1,251,660,000	1,861,164,000	3,711,444,000
TOTAL GAJI TAMBAHAN CORE PER TAHUN	Rp	9,011,952,000	15,019,920,000	22,333,968,000	44,537,328,000
JUMLAH KANWIL TAMBAHAN		1	1	1	1
FASILITAS KANWIL BARU	m2	477	477	477	477
PENAMBAHAN FASILITAS PUSAT	m2	160	90	120	400
PENAMBAHAN FASILITAS KANWIL EXISTING	m2	140	95	115	405
TOTAL PENAMBAHAN FASILITAS	m2	777	662	712	1282
BIAYA RATA-RATA PER m2 PER BULAN	Rp	200,000	200,000	200,000	200,000
TOTAL BIAYA FASILITAS TAMBAHAN PER TAHUN	Rp	1,864,800,000	1,588,800,000	1,708,800,000	3,076,800,000
BIAYA PERLENGKAPAN TAMBAHAN EXISTING (MEJA, KURSI, LAPTOP)	Rp	900,000,000	555,000,000	705,000,000	2,415,000,000
BIAYA PERLENGKAPAN KANWIL BARU	Rp	2,060,900,000	2,060,900,000	2,060,900,000	2,060,900,000
BIAYA PENGEMBANGAN & MAINTENANCE SISTEM OFFICE AUTOMATION	Rp	300,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000
TOTAL BIAYA TAMBAHAN	Rp	14,137,652,000	19,324,620,000	26,908,668,000	52,190,028,000

### ROAD MAP SDM KPPU 2020 - 2024

#### 2020 - 2021

- 50% Supporting 50% Core
- Transformasi Menuju ASN
- Penguatan Kompetensi : Investigasi & Analisis
- Peningkatan Jumlah SDM Investigasi & Analisis
- Penambahan 1 Kanwil

#### 2022

- 45% Supporting, 55% Core
- SDM KPPU = ASN
- Penguatan Kompetensi : Investigasi & Analisis
- Peningkatan Jumlah SDM Investigasi & Analisis
- Penambahan 1 Kanwil

#### 2023

- 40% Supporting, 60% Core
- SDM KPPU = ASN
- Penguatan Kompetensi: Investigasi & Analisis
- Peningkatan Jumlah SDM Investigasi & Analisis
- Penambahan 1 kanwil

#### 2024

- 30% Supporting, 70% Core
- SDM KPPU = ASN
- Penguatan Kompetensi: Investigasi & Analisis
- Peningkatan Jumlah SDM Investigasi & Analisis
- Penambahan 1 Kanwil

**7. Persentase Penyebaran SDM berdasarkan data Eksisting Pegawai KPPU(per 31 Desember 2022)**

No	Unit Eselon I	Jumlah Pegawai	Jumlah Pegawai Per Eselon I	% Jumlah Pegawai Eselon 2 di Eselon 1 (Supporting dan Core)	% Jumlah Pegawai per Eselon I (Supporting dan Core)	Jumlah Pegawai Supporting dan Core	% Jumlah Pegawai Eselon 1 Supporting dan Core
		2022	2022	2022	2022	2022	2022
1	SekretarisJenderal	1	193	1%	47%	309	75%
2	Staf Ahli KPPU	2		1%			
3	Kelompok Kerja	9		5%			
4	Dewan Pakar	1		1%			
5	Biro Perencanaan dan Keuangan	12		6%			
6	Biro Hukum	10		5%			
7	Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama	13		7%			
8	Biro Sumber Daya Manusia dan Umum	91		47%			
9	Unit Data dan Informasi	3		2%			
10	Unit Pelaksana Pendidikan dan Pelatihan	2		1%			
11	Satuan Pengawasan Internal	7		4%			
12	Pegawai Tidak Tetap (PTT)	42		22%			
13	Kanwil I Medan	17	116	15%	28%		
14	Kanwil II Lampung	15		13%			
15	Kanwil III Bandung	11		9%			
16	Kanwil IV Surabaya	15		13%			

No	Unit Eselon I	Jumlah Pegawai	Jumlah Pegawai Per Eselon I	% Jumlah Pegawai Eselon 2 di Eselon 1 (Supporting dan Core)	% Jumlah Pegawai per Eselon I (Supporting dan Core)	Jumlah Pegawai Supporting dan Core	% Jumlah Pegawai Eselon 1 Supporting dan Core
		2022	2022	2022	2022	2022	2022
17	Kanwil V Balikpapan	11		9%			
18	Kanwil VI Makassar	14		12%			
19	Kanwil VII Yogyakarta	9		8%			
20	Pegawai Tidak Tetap (PTT)	24		21%			
21	Deputi Bidang Kajian dan Advokasi	1	28	4%	7%	102	25%
22	Direktorat Ekonomi	8		29%			
23	Direktorat Kebijakan Persaingan	8		29%			
24	Direktorat Advokasi Persaingan dan Kemitraan	11		39%			
25	Deputi Bidang Penegakan Hukum	1	74	1%	18%		
26	Direktorat Investigasi	15		20%			
27	Direktorat Merger dan Akuisisi	16		22%			
28	Direktorat Pengawasan Kemitraan	14		19%			
29	Direktorat Penindakan	15		20%			
30	Kepaniteraan	13		18%			
<b>TOTAL</b>		<b>411</b>	<b>411</b>			<b>411</b>	

### 8. Persentase Perbandingan Alokasi Anggaran di Core dan Supporting TA 2022

No	Unit Eselon II	Anggaran Per Unit Kerja Eselon 2 di Supporting dan Core	Anggaran Per Unit Kerja Eselon 1 di Supporting dan Core	% Anggaran Supporting dan Core (dengan Gaji & Operasional)	Anggaran per unit kerja Eselon 2 di Supporting dan Core (tanpa Gaji dan Operasional)	% Anggaran per unit kerja Eselon 2 di Supporting dan Core (tanpa Gaji dan	Anggaran per Eselon 1 di Supporting dan Core (tanpa Gaji dan Operasional)	% Anggaran Eselon 1 di Supporting dan Core (tanpa Gaji &
		2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022
1	Biro Perencanaan dan Keuangan	3.092.170.000			3.092.170.000	5%		
2	Biro Hukum	2.663.260.000			2.663.260.000	4%		
3	Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama	2.413.921.000			2.413.921.000	4%		

No	Unit Eselon II	Anggaran Per Unit Kerja Eselon 2 di <i>Supporting</i> dan <i>Core</i>	Anggaran Per Unit Kerja Eselon 1 di <i>Supporting</i> dan <i>Core</i>	% Anggaran <i>Supporting</i> dan <i>Core</i> (dengan Gaji & Operasional)	Anggaran per unit kerja Eselon 2 di <i>Supporting</i> dan <i>Core</i> (tanpa Gaji dan Operasional)	% Anggaran per unit kerja Eselon 2 di <i>Supporting</i> dan <i>Core</i> (tanpa Gaji dan	Anggaran per Eselon 1 di <i>Supporting</i> dan <i>Core</i> (tanpa Gaji dan Operasional)	% Anggaran Eselon 1 di <i>Supporting</i> dan <i>Core</i> (tanpa Gaji &
		2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022
4	Biro Sumber Daya Manusia dan Umum	86.284.030.000			15.816.133.000	24%		
5	Unit Data dan Informasi	1.315.519.000			1.315.519.000	2%		
6	Unit Pelaksana Pendidikan dan Pelatihan	4.583.766.000			4.583.766.000	7%		
7	Satuan Pengawasan Internal	511.328.000	107.763.594.000	79,45%	511.328.000	1%	37.295.697.000	57%
8	Kanwil I Medan	1.111.203.000			1.111.203.000	2%		
9	Kanwil II Lampung	785.860.000			785.860.000	1%		





No	Unit Eselon II	Anggaran Per Unit Kerja Eselon 2 di <i>Supporting</i> dan <i>Core</i>	Anggaran Per Unit Kerja Eselon 1 di <i>Supporting</i> dan <i>Core</i>	% Anggaran <i>Supporting</i> dan <i>Core</i> (dengan Gaji & Operasional)	Anggaran per unit kerja Eselon 2 di <i>Supporting</i> dan <i>Core</i> (tanpa Gaji dan Operasional)	% Anggaran per unit kerja Eselon 2 di <i>Supporting</i> dan <i>Core</i> (tanpa Gaji dan	Anggaran per Eselon 1 di <i>Supporting</i> dan <i>Core</i> (tanpa Gaji dan Operasional)	% Anggaran Eselon 1 di <i>Supporting</i> dan <i>Core</i> (tanpa Gaji &
		2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022
10	Kanwil III Bandung	867.233.000			867.233.000	1%		
11	Kanwil IV Surabaya	945.468.000			945.468.000	1%		
12	Kanwil V Balikpapan	1.146.886.000			1.146.886.000	2%		
13	Kanwil VI Makassar	1.316.645.000			1.316.645.000	2%		
14	Kanwil VII Yogyakarta	726.305.000			726.305.000	1%		
15	Direktorat Ekonomi	2.977.964.000			2.977.964.000	5%		
16	Direktorat Kebijakan Persaingan	1.778.569.000			1.778.569.000	3%		
17	Direktorat Advokasi Persaingan dan Kemitraan	2.356.975.000			2.356.975.000	4%		

No	Unit Eselon II	Anggaran Per Unit Kerja Eselon 2 di <i>Supporting</i> dan <i>Core</i>	Anggaran Per Unit Kerja Eselon 1 di <i>Supporting</i> dan <i>Core</i>	% Anggaran <i>Supporting</i> dan <i>Core</i> (dengan Gaji & Operasional)	Anggaran per unit kerja Eselon 2 di <i>Supporting</i> dan <i>Core</i> (tanpa Gaji dan Operasional)	% Anggaran per unit kerja Eselon 2 di <i>Supporting</i> dan <i>Core</i> (tanpa Gaji dan	Anggaran per Eselon 1 di <i>Supporting</i> dan <i>Core</i> (tanpa Gaji dan Operasional)	% Anggaran Eselon 1 di <i>Supporting</i> dan <i>Core</i> (tanpa Gaji &
		2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022
18	Direktorat Investigasi	3.532.739.000	27.879.071.000	21%	3.532.739.000	5%	27.879.071.000	43%
19	Direktorat Merger dan Akuisisi	2.387.199.000			2.387.199.000	4%		
20	Direktorat Pengawasan Kemitraan	2.345.600.000			2.345.600.000	4%		
21	Direktorat Penindakan	2.663.563.000			2.663.563.000	4%		
22	Kepaniteraan	9.836.462.000			9.836.462.000	15%		
<b>TOTAL</b>		<b>135.642.665.000</b>	<b>135.642.665.000</b>	<b>100%</b>	<b>65.174.768.000</b>		<b>65.174.768.000</b>	<b>100%</b>

Operasional Perkantoran	26.346.905.000
Gaji dan Tunjangan	44.120.992.000
Total Anggaran tanpa Operasional dan Gaji	65.174.768.000

**9. Rekapitulasi Rincian Pagu dan Realisasi Anggaran Kegiatan KPPU TA 2022 dan Output (KRO/RO) Kegiatan pada Program Pengawasan Persaingan Usaha untuk pencapaian Prioritas Nasional (PN-1)\***

Kode	Unit Kerja	Kegiatan/KRO	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Kode KRO/RO	Output		Satuan
						(KRO)/RO		
						Target	Realisasi	
<b>Program Pengawasan Persaingan Usaha</b>								
3952	Direktorat Ekonomi	<b>Pemantauan dan Kajian Pelaku Usaha</b>	<b>2.977.964.000</b>	<b>2.939.608.617</b>				
			<b>2.977.964.000</b>	<b>2.939.608.617</b>	<b>PBB</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>Rekomendasi Kebijakan</b>
		(PBB) Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan	1.708.289.000	1.692.291.694	PBB.001	6	6	Rekomendasi Kebijakan
			1.059.675.000	1.042.494.747	PBB.002	3	3	Rekomendasi Kebijakan
			210.000.000	204.822.176	PBB.003	1	1	Rekomendasi Kebijakan
5162	Direktorat Kebijakan Persaingan	<b>Analisis Kebijakan Persaingan</b>	<b>1.778.569.000</b>	<b>1.684.206.939</b>				
			<b>1.678.569.000</b>	<b>1.586.571.139</b>	<b>PBB</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>Rekomendasi kebijakan</b>
		(PBB) Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan	1.150.363.000	1.089.665.968	PBB.001	5	5	Rekomendasi kebijakan
			293.166.000	265.040.306	PBB.002	3	3	Rekomendasi kebijakan

Kode	Unit Kerja	Kegiatan/KRO	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Kode KRO/ RO	Output		Satuan
						(KRO)/RO		
						Target	Realisasi	
			235.040.000	231.864.865	PBB.003	1	1	Rekomendasi kebijakan
		(UAB) Sistem Informasi Pemerintahan	<b>100.000.000</b>	<b>97.635.800</b>	<b>UAB</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>Sistem Informasi</b>
			100.000.000	97.635.800	UAB.001	1	1	Sistem Informasi
5194	Direktorat Advokasi Persaingan dan Kemitraan	<b>Advokasi Persaingan Usaha &amp; Kemitraan</b>	<b>2.356.975.000</b>	<b>2.355.038.381</b>				
		(PEB) Forum	<b>491.100.000</b>	<b>490.669.301</b>	<b>PEB</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>Forum</b>
			91.100.000	90.871.542	PEB.001	3	3	Forum
			400.000.000	399.797.759	PEB.002	2	2	Forum
		(QDB) Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	<b>752.180.000</b>	<b>751.279.178</b>	<b>QDB</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>Lembaga</b>
			101.076.000	100.898.428	QDB.001	2	2	Lembaga
			651.104.000	650.380.750	QDB.002	11	11	Lembaga
		(QDH) Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	<b>1.113.695.000</b>	<b>1.113.089.902</b>	<b>QDH</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>Badan Usaha</b>
			806.581.000	806.026.630	QDH.001	7	7	Badan Usaha



Kode	Unit Kerja	Kegiatan/KRO	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Kode KRO/RO	Output		Satuan
						(KRO)/RO		
						Target	Realisasi	
			307.114.000	307.063.272	QDH.002	2	2	Badan Usaha
3953	Direktorat Pengawasan Kemitraan	<b>Pengawasan Kemitraan</b>	<b>2.345.600.000</b>	<b>2.340.403.871</b>				
			<b>2.345.600.000</b>	<b>2.340.403.871</b>	<b>QCE</b>	<b>15</b>	<b>19</b>	<b>Perkara</b>
		(QCE) Penanganan Perkara	1.129.523.000	1.125.328.921	QCE.001	8	8	Perkara
			150.200.000	150.098.457	QCE.002	1	1	Perkara
			1.013.100.000	1.012.606.567	QCE.003	5	8	Perkara
			52.777.000	52.369.926	QCE.004	1	2	Perkara
3958	Direktorat Merger	<b>Penilaian Merger dan Akuisisi</b>	<b>2.387.199.000</b>	<b>2.368.354.884</b>				
		(QCD) Perkara Hukum Badan Usaha	<b>596.355.000</b>	<b>595.141.160</b>	<b>QCD</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>Perkara</b>
			596.355.000	595.141.160	QCD.002	5	10	Perkara
		(QIH) Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha	<b>1.649.744.000</b>	<b>1.635.375.609</b>	<b>QIH</b>	<b>24</b>	<b>531</b>	<b>Badan Usaha</b>
			950.514.000	938.914.691	QIH.001	15	320	Badan Usaha
			699.230.000	696.460.918	QIH.002	9	211	Badan Usaha
			<b>141.100.000</b>	<b>137.838.115</b>	<b>RAH</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>Unit</b>

Kode	Unit Kerja	Kegiatan/KRO	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Kode KRO/ RO	Output		Satuan
						(KRO)/RO		
						Target	Realisasi	
		(RAH) Sarana Bidang Industri dan Perdagangan	141.100.000	137.838.115	RAH.001	1	1	Unit
3956	Direktorat Investigasi	<b>Investigasi Dugaan Pelanggaran Persaingan Usaha Tidak Sehat</b>	<b>3.532.739.000</b>	<b>3.512.566.892</b>				
		(QCE) Penanganan perkara	<b>3.532.739.000</b>	<b>3.512.566.892</b>	<b>QCE</b>	<b>38</b>	<b>102</b>	<b>Perkara</b>
			1.550.039.000	1.549.164.893	QCE.001	22	86	Perkara
			786.000.000	782.554.879	QCE.002	7	7	Perkara
			1.146.200.000	1.136.291.120	QCE.003	7	7	Perkara
			50.500.000	44.556.000	QCE.004	2	2	Perkara
3957	Direktorat Penindakan	<b>Penindakan Pelanggaran Persaingan Usaha Sehat</b>	<b>2.663.563.000</b>	<b>2.659.290.526</b>				
		(QCE) Penanganan Perkara	<b>2.663.563.000</b>	<b>2.659.290.526</b>	<b>QCE</b>	<b>20</b>	<b>34</b>	<b>Perkara</b>
			488.735.000	486.645.244	QCE.001	4	11	Perkara (Pemberkasan)

Kode	Unit Kerja	Kegiatan/KRO	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Kode KRO/ RO	Output		Satuan
						(KRO)/RO		
						Target	Realisasi	
			1.478.994.000	1.477.730.911	QCE.002	10	15	Perkara (Penuntutan)
			695.834.000	694.914.371	QCE.003	6	8	Perkara (Litigasi)
5275	Kepaniteraan	<b>Penanganan Perkara Pelanggaran Persaingan Usaha</b>	<b>9.836.462.000</b>	<b>9.423.816.590</b>				
			<b>9.836.462.000</b>	<b>9.423.816.590</b>	<b>QCE</b>	<b>33</b>	<b>39</b>	<b>Perkara</b>
		(QCE) Penanganan Perkara	2.442.214.000	2.369.198.720	QCE.001	11	12	Perkara
			6.261.046.000	5.988.696.528	QCE.002	13	12	Perkara
			1.133.202.000	1.065.921.342	QCE.003	9	15	Perkara
3955	Kantor Wilayah	<b>Pengawasan Persaingan Usaha di Wilayah Kerja Kantor Wilayah KPPU</b>	<b>6.899.600.000</b>	<b>6.809.551.878</b>				
		(PBB) Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan	<b>2.037.630.000</b>	<b>2.017.435.436</b>	<b>PBB</b>	<b>15</b>	<b>21</b>	<b>Rekomendasi Kebijakan</b>



Kode	Unit Kerja	Kegiatan/KRO	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Kode KRO/RO	Output		Satuan
						(KRO)/RO		
						Target	Realisasi	
			262.990.000	259.050.670	PBB.001	2	2	Rekomendasi Kebijakan
			109.078.000	108.826.541	PBB.002	1	3	Rekomendasi Kebijakan
			170.465.000	169.032.376	PBB.003	2	4	Rekomendasi Kebijakan
			262.990.000	262.828.365	PBB.004	2	2	Rekomendasi Kebijakan
			447.349.000	439.829.327	PBB.005	3	3	Rekomendasi Kebijakan
			589.758.000	583.907.401	PBB.006	3	5	Rekomendasi Kebijakan
			195.000.000	193.960.756	PBB.007	2	2	Rekomendasi Kebijakan
			<b>1.871.889.000</b>	<b>1.827.974.745</b>	<b>QCE</b>	<b>14</b>	<b>17</b>	<b>Perkara</b>
		(QCE) Penanganan Perkara	562.635.000	543.059.485	QCE.001	3	3	Perkara
			371.207.000	361.822.685	QCE.002	3	3	Perkara
			159.299.000	157.449.999	QCE.003	2	2	Perkara
			92.635.000	92.580.992	QCE.004	1	1	Perkara
			153.720.000	142.855.305	QCE.005	1	2	Perkara
			252.515.000	250.547.870	QCE.006	2	4	Perkara





Kode	Unit Kerja	Kegiatan/KRO	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Kode KRO/ RO	Output		Satuan
						(KRO)/RO		
						Target	Realisasi	
			279.878.000	279.658.409	QCE.007	2	2	Perkara
		(UBA) Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	<b>2.990.081.000</b>	<b>2.964.141.697</b>	<b>UBA</b>	<b>35</b>		<b>Prov/Kab/Kota</b>
			285.578.000	279.177.331	UBA.001	3	3	Prov/Kab/Kota
			305.575.000	305.153.178	UBA.002	5	5	Prov/Kab/Kota
			537.469.000	533.390.487	UBA.003	6	6	Prov/Kab/Kota
			589.843.000	589.260.860	UBA.004	6	6	Prov/Kab/Kota
			545.817.000	539.708.905	UBA.005	7	9	Prov/Kab/Kota
			474.372.000	466.428.564	UBA.006	5	8	Prov/Kab/Kota
			251.427.000	251.022.372	UBA.007	3	3	Prov/Kab/Kota
<b>TOTAL</b>			<b>34.778.671.000</b>	<b>34.092.838.578</b>				

Keterangan: \*data berdasarkan aplikasi Sakti.Kemenkeu (Modul Pembayaran)

**10. Rekapitulasi Rincian Pagu dan Realisasi Anggaran Kegiatan KPPU TA 2022 dan Output (KRO/RO) Kegiatan pada Program Dukungan Manajemen untuk Kegiatan Pendukung Operasional Prioritas Nasional\***

Kode	Unit Kerja	Kegiatan/KRO	Kode KRO/ RO	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Output		Satuan
						Target	Realisasi	
<b>Program Dukungan Manajemen</b>								
<b>Kegiatan Pendukung Operasional Prioritas Nasional</b>								
5971	Biro SDM dan Umum	Pengelolaan Sumber Daya Manusia dan Umum		86.284.030.000	85.565.076.365			
		(EBA) Layanan Dukungan Manajemen Internal	EBA	74.970.026.000	74.277.709.862	5	5	Layanan
			EBA.956	1.080.093.000	1.063.026.710	1	1	Layanan
			EBA.959	1.831.056.000	1.830.687.825	1	1	Layanan
			EBA.960	986.996.000	960.798.318	1	1	Layanan
			EBA.962	603.984.000	596.169.260	1	1	Layanan
			EBA.994.001	44.120.992.000	43.672.673.650	1	1	Layanan

Kode	Unit Kerja	Kegiatan/KRO	Kode KRO/ RO	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Output		Satuan
						Target	Realisasi	
			EBA.994.002	26.346.905.000	26.154.354.099			
		(EBB) Layanan Sarana dan Prasarana Internal	<b>EBB</b>	<b>4.659.872.000</b>	<b>4.657.804.397</b>	<b>232</b>	<b>380</b>	<b>Unit</b>
			EBB.951	2.871.022.000	2.868.954.897	231	379	Unit
			EBB.971	1.788.850.000	1.788.849.500	1	1	Unit
		(EBC) Layanan Manajemen SDM Internal	<b>EBC</b>	<b>6.141.081.000</b>	<b>6.117.972.616</b>	<b>417</b>	<b>419</b>	<b>Orang</b>
			EBC.954	6.141.081.000	6.117.972.616	417	419	Orang
		(EBD) Layanan Manajemen Kinerja Internal	<b>EBD</b>	<b>513.051.000</b>	<b>511.589.490</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>Dokumen</b>
			EBD.953	171.579.000	170.512.400	1	1	Dokumen
			EBD.974	341.472.000	341.077.090	23	23	Dokumen
<b>5972</b>	<b>Unit Pelaksana Pendidikan dan Pelatihan</b>	<b>Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan</b>	<b>BDB</b>	<b>4.583.766.000</b>	<b>4.568.771.938</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>Lembaga</b>

Kode	Unit Kerja	Kegiatan/KRO	Kode KRO/ RO	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Output		Satuan
						Target	Realisasi	
		(BDB) Fasilitas dan Pembinaan Lembaga	BDB.001	166.100.000	165.940.319	4	4	Lembaga
			BDB.002	1.601.440.000	1.594.829.297	22	22	Lembaga
		(EBC) Layanan Manajemen SDM Internal	<b>EBC</b>	<b>2.739.310.000</b>	<b>2.731.174.645</b>	<b>690</b>	<b>705</b>	<b>Orang</b>
			EBC.996	2.739.310.000	2.731.174.645	690	705	Orang
		(EBD) Layanan Manajemen Kinerja Internal	<b>EBD</b>	<b>76.916.000</b>	<b>76.827.677</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>Dokumen</b>
		EBD.953	76.916.000	76.827.677	2	2	Dokumen	
5973	Unit Data dan Informasi	<b>Peningkatan Data dan Informasi</b>	<b>EBA</b>	<b>1.315.519.000</b>	<b>1.305.462.236</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>Layanan</b>
		(EBA) Layanan Dukungan Manajemen Internal	EBA.963	1.315.519.000	1.305.462.236	1	1	Layanan
5974	Biro Hukum	<b>Penyelenggaraan Bantuan Hukum dan Eksekusi</b>		<b>2.663.260.000</b>	<b>2.594.005.653</b>			

Kode	Unit Kerja	Kegiatan/KRO	Kode KRO/ RO	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Output		Satuan
						Target	Realisasi	
		(EBA) Layanan Dukungan Manajemen Internal	<b>EBA</b>	<b>2.592.036.000</b>	<b>2.524.261.453</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>Layanan</b>
			EBA.002	1.295.648.000	1.267.110.194	1	1	Layanan
			EBA.957	1.270.000.000	1.232.790.559	2	2	Layanan
			EBA.969	26.388.000	24.360.700	1	1	Layanan
		(EBD) Layanan Manajemen Kinerja Internal	<b>EBD</b>	<b>71.224.000</b>	<b>69.744.200</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>Dokumen</b>
			EBD.953	71.224.000	69.744.200	3	3	Dokumen
5975	Biro Humas dan Kerja Sama	<b>Penyelenggaraan Komunikasi Lembaga</b>		<b>2.413.921.000</b>	<b>2.328.735.464</b>			
		(AEB) Forum	<b>AEB</b>	<b>432.863.000</b>	<b>428.642.903</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>Forum</b>
			AEB.001	108.775.000	108.272.528	1	1	Forum
			AEB.002	324.088.000	320.370.375	2	2	Forum

Kode	Unit Kerja	Kegiatan/KRO	Kode KRO/ RO	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Output		Satuan
						Target	Realisasi	
		(AEC) Kerja Sama	<b>AEC</b>	<b>345.028.000</b>	<b>343.482.528</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>Kesepakatan</b>
			AEC.001	345.028.000	343.482.528	8	8	Kesepakatan
		(AED) Perjanjian	<b>AED</b>	<b>75.408.000</b>	<b>69.314.533</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>Perjanjian</b>
			AED.001	75.408.000	69.314.533	2	2	Perjanjian
		(BMA) Data dan Informasi Publik	<b>BMA</b>	<b>516.854.000</b>	<b>475.563.990</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>Layanan</b>
			BMA.001	269.694.000	235.691.489	1	1	Layanan
			BMA.002	247.160.000	239.872.501	1	1	Layanan
		(BMB) Komunikasi Publik	<b>BMB</b>	<b>178.947.000</b>	<b>177.252.276</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>Layanan</b>
			BMB.001	178.947.000	177.252.276	1	1	Layanan
		(EBA) Layanan Dukungan Manajemen Internal	<b>EBA</b>	<b>732.159.000</b>	<b>707.746.575</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>Layanan</b>
			EBA.958	732.159.000	707.746.575	1	1	Layanan

Kode	Unit Kerja	Kegiatan/KRO	Kode KRO/ RO	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Output		Satuan
						Target	Realisasi	
		(EBD) Layanan Manajemen Kinerja Internal	<b>EBD</b>	<b>132.662.000</b>	<b>126.732.659</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>Dokumen</b>
			EBD.953	132.662.000	126.732.659	1	1	Dokumen
5976	Satuan Pengawasan Internal	<b>Pengawasan Akuntabilitas dan Aparatur Negara KPPU</b>		<b>511.328.000</b>	<b>502.993.203</b>			
			<b>EBD</b>	<b>511.328.000</b>	<b>502.993.203</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>Dokumen</b>
		(EBD) Layanan Manajemen Kinerja Internal	EBD.001	421.480.000	413.484.456	6	6	Dokumen
			EBD.965	89.848.000	89.508.747	2	2	Dokumen
5977	Biro Perencanaan dan Keuangan	<b>Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran KPPU</b>		<b>3.092.170.000</b>	<b>3.056.738.493</b>			98,85%
		(EBD) Layanan Manajemen Kinerja Internal	<b>EBD</b>	<b>3.092.170.000</b>	<b>3.056.738.493</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>Dokumen</b>
			EBD.001	139.488.000	137.268.845	3	3	Dokumen

Kode	Unit Kerja	Kegiatan/KRO	Kode KRO/ RO	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Output		Satuan
						Target	Realisasi	
			EBD.002	146.076.000	145.538.780	1	1	Layanan
			EBD.952	545.231.000	539.918.056	6	6	Dokumen
			EBD.953	934.308.000	911.992.566	9	9	Dokumen
			EBD.955	1.327.067.000	1.322.020.246	5	5	Dokumen
<b>TOTAL</b>				<b>100.863.994.000</b>	<b>99.921.783.352</b>			

Keterangan: \*data berdasarkan aplikasi Sakti.Kemenkeu (Modul Pembayaran)



# KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Jl. Ir. H. Juanda No.36 Jakarta Pusat 10120

Website | [www.kppu.go.id](http://www.kppu.go.id)  
Email | [infokom@kppu.go.id](mailto:infokom@kppu.go.id)

## KANWIL I

Jalan Gatot Subroto No.148 B,  
Sekip, Medan Petisah  
Kota Medan, Sumatera Utara  
201113  
Telp. : 061-4558133 / 88741230  
Faks : 061-4148603  
Email: [kpd\\_medan@icc.go.id](mailto:kpd_medan@icc.go.id) /  
[kanwil1@kppu.go.id](mailto:kanwil1@kppu.go.id)

## KANWIL II

Jl. Diponegoro, Kel Sumur Batu,  
Kec Teluk Betung Utara, Kota  
Bandar Lampung, Lampung 35212  
Telp. : 0721-6013235  
Faks. : 0721-6016498  
email : [kanwil2@kppu.go.id](mailto:kanwil2@kppu.go.id)

## KANWIL III

Jl. PH. H. Mustofa No.22  
Kota Bandung  
Jawa Barat 40124  
Telp. : 022-20506680  
Faks. : 022-20506680  
email : [kanwil3@kppu.go.id](mailto:kanwil3@kppu.go.id)

## KANWIL IV

Gedung Mandiri  
Jl. Basuki Rahmat No.129-137 Lt.7  
Surabaya 60271.  
Telp. : 031-545 4146, 534 4410  
Faks : 031-5341949  
email:[kpd\\_surabaya@icc.go.id](mailto:kpd_surabaya@icc.go.id)/  
[kanwil4@kppu.go.id](mailto:kanwil4@kppu.go.id)

## KANWIL V

Gedung Keuangan Negara (GKN)  
Balikpapan Lt.3  
Jl. Jenderal Ahmad Yani No.28,  
Balikpapan  
Kalimatan Timur 76113  
Telp. : 0542-730373  
Faks : 0542-415-939  
email:[kpd\\_balikpapan@icc.go.id](mailto:kpd_balikpapan@icc.go.id) /  
[kanwil5@kppu.go.id](mailto:kanwil5@kppu.go.id)

## KANWIL VI

Gedung Keuangan Negara II Lt.6  
Jl. Urip Sumoharjo KM.4  
Makassar, Sulawesi Selatan.  
Telp. : 0411-429927/429957  
Faks. : 0411-429958  
email:[kpd\\_makassar@icc.go.id](mailto:kpd_makassar@icc.go.id) /  
[kanwil6@kppu.go.id](mailto:kanwil6@kppu.go.id)

## KANWIL VII

Jl. Tentara Rakyat Mataram No. 1,  
Pringgokusuman, Gedong Tengen,  
Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa  
Yogyakarta 55272.  
Telp. : 0274-5017163  
Faks. : 0274-5017163  
Email:[kanwil7@icc.go.id](mailto:kanwil7@icc.go.id) /  
[kanwil7@kppu.go.id](mailto:kanwil7@kppu.go.id)